

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, SUKU
BUNGA, NILAI TUKAR, DAN INFLASI TERHADAP
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO SUB
SEKTOR PERIKANAN DENGAN INVESTASI SEBAGAI
VARIABEL INTERVENING**

(Studi Pada Negara Indonesia Periode 2012-2017)

Skripsi

**Diajukan untuk Menempuh Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Bisnis pada
Universitas Brawijaya**

**RIZKA SRIHENDA
155030201111102**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
KONSENTRASI KEUANGAN
MALANG
2019**

MOTTO

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

(Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah)



“Ilmu itu tidaklah didapatkan dengan jasad yang santai”
(HR. Muslim)

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Suku Bunga, Nilai Tukar,
dan Inflasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto Sub
Sektor Perikanan dengan Investasi sebagai Variabel
Intervening (Studi Kasus pada Negara Indonesia Periode
2012-2017)

Disusun oleh : Rizka Srihenda

NIM : 155030201111102

Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Ilmu Administrasi Bisnis

Konsentrasi : Keuangan

Malang, 8 Juli 2019
Komisi Pembimbing
Ketua



Cacik Rut Damavanti, S.Sos.,M.Prof.,Acc.DBA
NIP. 1979090820 0501 2 001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa
 Tanggal : 16 Juli 2019
 Pukul : 13.00 – 14.00 WIB
 Skripsi atas nama : Rizka Srihenda
 Judul : Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Suku Bunga, Nilai Tukar, dan Inflasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto Sub Sektor Perikanan dengan Investasi sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada Negara Indonesia periode 2012-2017)

Dan dinyatakan

LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Cacik Rut Damayanti, S.Sos., M.Prof.Acc., D.BA
 NIP. 19790908 200501 2 001

Anggota

Anggota



Dr. Drs. Muhammad Saifi, M.Si
 NIP. 19570712 198503 1 001



Ari Darmawan., Dr., S.AB, M.AB
 NIP. 20120180 0914 1 001



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 8 Juli 2019



Nama : Rizka Srihenda

NIM : 155030201111102

RINGKASAN

Srihenda, Rizka. 2019. **Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Suku Bunga, Nilai Tukar, dan Inflasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto dengan Investasi sebagai Variabel Intervening**, Cacik Rut Damayanti, S.Sos, M.Prof.Acc. DBA; 184 Halaman + xvi

Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya kontribusi PDB sub sektor perikanan yang diindikasikan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap PDB nasional dan rendahnya investasi sub sektor perikanan, sebagai salah satu komponen pembentuk PDB sub sektor perikanan di Indonesia pada tahun 2012-2017. Melihat hal tersebut peneliti tertarik untuk melihat dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi investasi dan PDB sub sektor perikanan, termasuk faktor-faktor makroekonomi. Beberapa variabel makroekonomi yang digunakan untuk dilihat pengaruhnya terhadap PDRB (Y) dan investasi (Z) adalah pengeluaran pemerintah (X_1), suku bunga (X_2), nilai tukar (X_3), dan inflasi (X_4).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *explanatory* dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan bersumber dari *website* resmi kementerian keuangan untuk variabel pengeluaran pemerintah, bank Indonesia untuk suku bunga dan inflasi, kementerian perdagangan untuk nilai tukar, dan Badan Pusat Statistik untuk PDRB dan investasi. Penelitian ini dilakukan di 10 Provinsi dengan kriteria produksi rata-rata ikan terbanyak yang dijual di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagai sampel pada penelitian ini.

Berdasarkan hasil perhitungan ketepatan model menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah, suku bunga, nilai tukar, inflasi berkontribusi sebesar 58% terhadap PDRB dan investasi sebagai variabel intervening, sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Hasil uji melalui analisis jalur menunjukkan bahwa hanya variabel pengeluaran pemerintah dan nilai tukar yang signifikan mempengaruhi PDRB melalui investasi, sedangkan suku bunga dan inflasi tidak signifikan mempengaruhi PDRB melalui investasi.

Kata kunci: Pengeluaran pemerintah, Suku Bunga, Nilai Tukar, Inflasi, PDRB, Investasi, PDRB, Sub Sektor Perikanan

SUMMARY

Srihenda, Rizka. 2019. *The Effect of Government Expenditure, Interest Rate, Exchange Rate, and Inflation on Gross Domestic Regional Product of fisheries sub-sector in Indonesia with investment as intervening variable*. Cacik Rut Damayanti, S.Sos, M.Prof.Acc. DBA, 184 pages + xvi

Background of this study by the high contribution of GDP sub-sector that indicated to significant influence on national GDP and low investment sub-sector of fishery, as one component of the forming of sub-sector GDP Fisheries in Indonesia in 2012-2017. From this condition, author was interested to seeing and explaining the factors affecting to investments and GDP, including macroeconomic factors. Some macroeconomic variables used to be seen influence on GDRP (Y) and investment (Z) are government Expenditure (X1), interest rates (X2), exchange rate (X3), and inflation (X4).

This study is an explanatory study with quantity approach. Data used was taken from official website of Kementrian keuangan for government expenditure, website of Bank Indonesia for interest rates dan inflation, website of kementrian perdagangan for exchange rate, and Badan Pusat Statistik for GDRP and investment. This study was conducted in 10 provinces with the highest average production criteria sold at fish auction site (TPI) as a sample on this study.

Based on the accuracy calculation of the Products model that the government spending variable, interest rate, exchange rate, inflation contributed 58% to the GDRP and investment as a intervening variable, the rest is explained by other factors Not described in this study. Path Analysis showed that only expenditure of government and exchange rate are significant in affecting GDRP through investment, while interest rates and inflation did not significant effect GDRP through investment.

Keywords: *government expenditure, interest rate, exchange rate, inflation, GDRP, investment, GDRP, fishery Sub-sector*

LEMBAR PERSEMBAHAN

KUPERSEMBAHKAN KARYAKU
KEPADA AYAH DAN IBU TERCINTA
ADIK-ADIKKU TERSAYANG, RAIHAN, RARA, NADIF DAN ADVAN
NENEK, KELUARGAKU SERTA SEMUA SAHABAT-SAHABATKU



KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayat, dan kemudahanNya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Suku Bunga, Nilai tukar, dan Inflasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto Sub Sektor Perikanan dengan Investasi sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Negara Indonesia Periode 2012-2017)’’.

Penelitian ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Bisnis pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Peneliti menyadari tanpa bimbingan, dorongan, doa, serta bantuan dari berbagai pihak, peneliti tidak mungkin dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
2. Bapak Dr. Drs. Mochammad Al Musadieg, MBA selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya
3. Bapak Mohammad Iqbal, S.Sos., MIB., DBA., CMA selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya
4. Ibu Nila Firdausi Nuzula, Ph.D selaku Ketua Program Studi Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya dan selaku Dosen Pembimbing Akademik Peneliti

5. Bapak Dr. Ari Darmawan, S.AB., M.AB selaku sekretaris Prodi Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya
6. Ibu Cacik Rut Damayanti, S.Sos., M.Prof., Acc., DBA selaku dosen pembimbing peneliti yang tidak pernah lelah memberikan waktu, saran, serta pengetahuan baru selama melaksanakan bimbingan skripsi ini
7. Seluruh Dosen Jurusan Administrasi Bisnis serta seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya
8. Ibu, Ayah, Nenek, Adikku Raihan, Rara, Nadif, dan Advan tersayang, yang selalu mendoakan, menguatkan, dan memberi dukungan baik materil maupun moril kepada peneliti
9. Seluruh keluarga, sahabat, dan teman peneliti yang selalu memberikan semangat, doa, dan selalu kebersamai peneliti.

Peneliti

DAFTAR ISI

MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vii
RINGKASAN	viii
SUMMARY	ix
LEMBAR PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kontribusi Penelitian.....	12
E. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Empiris	15
B. Tinjauan Teoritis	30
1. Produk Domestik Bruto (PDB)	30
2. Investasi.....	33
3. Makroekonomi	35
C. Kajian Teori.....	53
1. Teori Keynes	53
2. Teori Mundell-Fleming	55
D. Pengaruh Antar Variabel.....	57

1.	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Investasi Sub Sektor Perikanan.....	57
2.	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB Sub Sektor Perikanan.....	58
3.	Pengaruh Suku Bunga terhadap Investasi Sub Sektor Perikanan...	60
4.	Pengaruh Suku Bunga terhadap PDRB Sub Sektor Perikanan	61
5.	Pengaruh Nilai Tukar terhadap Investasi Sub Sektor Perikanan...	62
6.	Pengaruh Nilai Tukar terhadap PDRB Sub Sektor Perikanan	63
7.	Pengaruh Inflasi Terhadap Investasi Sub Sektor Perikanan.....	64
8.	Pengaruh Inflasi terhadap PDRB Sub Sektor Perikanan	65
9.	Pengaruh Investasi Terhadap PDRB Sub Sektor Perikanan.....	66
D.	Model Konsep	67
E.	Model Hipotesis	68

BAB III METODE PENELITIAN 70

A.	Jenis Penelitian.....	70
B.	Lokasi Penelitian	71
C.	Populasi dan Sampel	71
1.	Populasi	71
2.	Sampel	73
D.	Variabel dan Pengukurannya	73
E.	Sumber Data.....	76
F.	Teknik Pengumpulan Data.....	77
G.	Teknik Analisis Data.....	77
1.	Analisis Statistik Deskriptif.....	77
2.	Uji Asumsi Klasik	78
3.	Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>)	80
5.	Pengujian Hipotesis	81

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 83

A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	83
B.	Penyajian Data.....	98
C.	Analisis dan Interpretasi.....	104

1. Hasil Analisis Deskriptif	104
2. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	107
3. Hasil <i>Path Analysis</i>	114
4. Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis	129
BAB V PENUTUP.....	142
A. Kesimpulan.....	142
B. Saran.....	144
DAFTAR PUSTAKA	147
LAMPIRAN.....	152



DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1:	Laju Pertumbuhan PDB Seri 2010 (Persen) Kategori A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2011-2017	2
Tabel 2:	Rata-rata Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam dan Luar Negeri menurut Sektor Ekonomi tahun 2010-2017	3
Tabel 3:	Laju Pertumbuhan PDB sektor perikanan dan tingkat Inflasi Indonesia tahun 2010-2017	8
Tabel 4:	Penelitian Terdahulu	24
Tabel 5:	Populasi Penelitian.....	71
Tabel 6:	Operasional Variabel	75
Tabel 7:	Pengeluaran Pemerintah untuk Kementerian Perikanan tahun 2012-2017	99
Tabel 8:	Suku Bunga Indonesia tahun 2012-2017	100
Tabel 9 :	Nilai tukar USD terhadap Rupiah tahun 2012-2017	100
Tabel 10:	Tingkat Inflasi Indonesia tahun 2012-2017	101
Tabel 11:	PDRB sub sektor perikanan masing-masing Provinsi	101
Tabel 12:	Investasi pada sub sektor perikanan tahun 2012-2017	103
Tabel 13:	Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	105
Tabel 14:	Hasil Analisis Statistik Uji Multikolinearitas dengan Z (Investasi)	110
Tabel 15:	Hasil Analisis Statistik Uji Multikolinearitas dengan Y (Produk Domestik Regional Bruto).....	110
Tabel 16:	Hasil dari Uji Koefisien Jalur Pengeluaran Pemerintah terhadap investasi.....	115
Tabel 17:	Hasil dari Uji Koefisien Jalur Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB	116
Tabel 18:	Hasil dari Uji Koefisien Jalur Suku Bunga terhadap investasi	116
Tabel 19:	Hasil dari Uji Koefisien Jalur Suku Bunga terhadap PDRB.....	117
Tabel 20:	Hasil dari Uji Koefisien Jalur Nilai Tukar terhadap Investasi	118
Tabel 21:	Hasil dari Uji Koefisien Jalur Nilai Tukar terhadap PDRB.....	119
Tabel 22:	Hasil dari Uji Koefisien Jalur Inflasi terhadap Investasi	120
Tabel 23:	Hasil dari Uji Koefisien Jalur Inflasi terhadap PDRB	120
Tabel 24:	Hasil dari Uji Koefisien Jalur Investasi terhadap PDRB	121
Tabel 25:	Beta dan Signifikansi pada Model Analisa Jalur	123
Tabel 26:	Ringkasan pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung dan pengaruh total	129
Tabel 27:	Hubungan pengeluaran pemerintah dan Realisasi Investasi pada sub sektor perikanan di Indonesia	131
Tabel 28:	Hubungan Suku bunga dan Realisasi Investasi pada Sub Sektor Perikanan di Indonesia	133
Tabel 29:	Hubungan Suku bunga dan PDRB Sub Sektor Perikanan Provinsi Jawa Timur	135
Tabel 30:	Hubungan Nilai tukar dan PDRB sub sektor perikanan Provinsi Jawa Timur 2012-2017	136

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1:	Model Konsep	68
Gambar 2:	Model Hipotesis	68
Gambar 3:	Hasil uji Normalitas dengan Z (Investasi)	108
Gambar 4:	Hasil Uji Normalitas dengan Y (PDRB)	109
Gambar 5:	Hasil Analisis Statistik Uji Autokorelasi dengan Z (Investasi)	112
Gambar 6:	Hasil Analisis Statistik Uji Autokorelasi dengan Y (Produk Domestik Regional Bruto).....	112
Gambar 7 :	Hasil Uji Heterokedastisitas dengan Z (Investasi) Sumber: data diolah (2019)	113
Gambar 8:	Hasil Uji Heterokedastisitas dengan Z (Produk Domestik Regional Bruto)....	114
Gambar 9:	Diagram Hasil Analisa Jalur	122
Gambar 10:	Diagram Pengaruh langsung	124
Gambar 11:	Konsumsi Ikan Nasional tahun 2012-2017	139



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1:	Uji Deskriptif.....	152
Lampiran 2:	Hasil Uji t dengan Z (Investasi)	152
Lampiran 3:	Lampiran 4: Hasil Uji t dengan Z (Produk Domestik Regional Bruto).....	152
Lampiran 5:	Hasil Uji Z (Investasi) dengan Y (Produk Domestik Regional Bruto).....	153
Lampiran 6:	Hasil Uji R^2 dengan Z (Investasi).....	153
Lampiran 7:	Hasil Uji R^2 dengan Y (Produk Domestik Regional Bruto).....	153
Lampiran 8:	APBN-P Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2012.....	154
Lampiran 9:	APBN-P Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2013.....	155
Lampiran 10:	APBN-P Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2014.....	156
Lampiran 11:	APBN-P Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015.....	157
Lampiran 12:	APBN-P Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2016.....	158
Lampiran 13 :	APBN-P Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2017.....	159
Lampiran 14:	Suku Bunga	147
Lampiran 15:	Nilai Tukar	148
Lampiran 18:	Inflasi.....	150
Lampiran 19:	Realisasi Investasi Dalam Negeri Menurut Sektor Ekonomi 2012-2017.....	152
Lampiran 20 :	Realisasi Investasi Dalam Negeri Menurut Sektor Ekonomi 2012-2017.....	153
Lampiran 21 :	Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah tahun 2012.....	154
Lampiran 22 :	Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah tahun 2013 - 2017	155
Lampiran 23 :	Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur tahun 2012.....	156
Lampiran 24 :	Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur tahun 2013-2017	157
Lampiran 25 :	Produk Domestik Regional Bruto Jawa Barat tahun 2012.....	158
Lampiran 26 :	Produk Domestik Regional Bruto Jawa Barat tahun 2013-2017.....	159
Lampiran 27 :	Produk Domestik Regional Bruto Aceh tahun 2012	160
Lampiran 28 :	Produk Domestik Regional Bruto Aceh tahun 2013-2017	161
Lampiran 29 :	Produk Domestik Regional Bruto DKI Jakarta tahun 2012	162
Lampiran 30 :	Produk Domestik Regional Bruto DKI Jakarta tahun 2013-2017	163
Lampiran 31 :	Produk Domestik Regional Bruto Sulawesi Selatan tahun 2012	164
Lampiran 32 :	Produk Domestik Regional Bruto Sulawesi Selatan tahun 2013-2017	165
Lampiran 33 :	Produk Domestik Regional Bruto Sulawesi Utara tahun 2012	166
Lampiran 34 :	Produk Domestik Regional Bruto Sulawesi Utara tahun 2013-2017	167
Lampiran 35 :	Produk Domestik Regional Bruto Kalimantan Timur tahun 2012	168
Lampiran 36 :	Produk Domestik Regional Bruto Kalimantan Timur tahun 2013 – 2017 ...	169
Lampiran 37 :	Produk Domestik Regional Bruto Bali tahun 2012	170
Lampiran 38 :	Produk Domestik Regional Bruto Bali tahun 2013-2017.....	171
Lampiran 39 :	Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Utara tahun 2012.....	172
Lampiran 40 :	Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Utara tahun 2013-2017	173

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendapatan nasional merupakan ukuran penting dalam kinerja ekonomi suatu negara (Lipsey et.al. 1997: 12). Salah satu ukuran pendapatan nasional yang paling umum digunakan adalah Produk Domestik Bruto (PDB). Menurut Mankiw (2006: 17), PDB sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian suatu negara, tujuannya adalah meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu. PDB merupakan “Jumlah hasil dari semua kegiatan produksi yang dilakukan oleh semua produsen dalam satu negara dari berbagai sektor ekonomi dalam satu tahun” (Suparmoko, 2000: 83).

Sektor ekonomi yang menjadi indikator perhitungan PDB terbagi menjadi sembilan sektor, salah satunya ialah sektor pertanian (Suparmoko, 2007:84). Sektor pertanian Indonesia berhasil memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap sektor pertanian dunia, dibuktikan dengan berhasilnya Indonesia untuk menduduki peringkat ke lima dunia dalam memberikan kontribusi terhadap sektor pertanian dunia.

Menurut *website Statistics Times* yang bersumber dari data *CIA World Factbook (2018)*, “China is the largest contributor followed by India. China and India accounts for 19.49 and 7.39 percent of total global agriculture output. World’s largest economy United States is at third place. Next in line come Brazil and Indonesia.”

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pertanian terdiri berbagai macam sub sektor, yaitu jasa pertanian, kehutanan, penebangan kayu serta perikanan.

Indonesia merupakan negara yang sebagian besar wilayahnya adalah perairan. Menurut Badan Informasi Geospasial (2015), Indonesia memiliki 13.466 pulau yang bernama dan berkoordinat dengan luas wilayah perairan 6.315.222 km² serta panjang garis pantai 99.093 km² yang membuat Indonesia menjadi salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Letak geografis tersebut, membuat Indonesia memiliki potensi ekonomis yang strategis di bidang sektor kelautan terutama pada komoditas perikanan. Potensi tersebut mengakibatkan besarnya pengaruh sumbangan PDB yang diberikan oleh sub sektor perikanan.

Tabel 1: Laju Pertumbuhan PDB Seri 2010 (Persen) Kategori A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2011-2017

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata
Jasa Pertanian	3,47	4,58	3,85	3,85	3	3,26	3,57	3,65
Kehutanan dan Penebangan Kayu	1,04	0,24	0,61	0,58	1,76	-1,03	2,08	0,75
Perikanan	7,65	6,29	7,24	7,35	7,89	5,19	5,71	6,79

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah penulis (2019)

Tabel 1 menunjukkan laju pertumbuhan PDB kategori sektor pertanian pada tahun 2011 sampai dengan 2017 berdasarkan harga konstan tahun 2010. Dapat terlihat bahwa sumbangan PDB sub sektor perikanan sepanjang tahun 2011 sampai 2017 memiliki rata-rata tertinggi yaitu sebesar 6,79% kemudian diikuti dengan sub sektor jasa pertanian sebesar 3,65% dan sub sektor kehutanan dan penebangan kayu sebesar 0,75% . Tingginya kontribusi sub sektor perikanan terhadap sektor pertanian dapat diindikasikan bahwa sub sektor perikanan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap PDB Nasional.

Salah satu komponen pembentuk PDB adalah investasi (Mankiw *et.al*, 2014: 9). Menurut Sugiarto (2015), investasi memiliki korelasi positif dengan PDB. Secara

umum dapat dikatakan jika investasi naik, maka PDB cenderung naik, begitu juga sebaliknya, jika investasi turun maka PDB juga akan mengalami penurunan. Investasi dapat berasal dari luar negeri berupa penanaman modal asing (*foreign direct investment*), maupun berasal dari dalam negeri berupa penanaman modal pengusaha atau pelaku ekonomi dalam negeri.

Menurut Eddy Cahyono Sugiarto (2012), kegiatan investasi dalam bentuk akumulasi *capital domestic* maupun luar negeri akan menjadi faktor yang dibutuhkan suatu negara dalam menggerakkan mesin ekonomi untuk mengawal pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, Investasi masih menjadi tantangan yang sulit bagi pembangunan sektor perikanan di Indonesia. Menurut Notohamijoyo (2019), keterbatasan infrastruktur pendukung, kapasitas nelayan, akses permodalan dan lainnya masih sulit diselesaikan secara tuntas akibat keterbatasan pemerintah. Masih diperlukan investasi dalam jumlah cukup besar untuk mendorong pengembangan sektor perikanan secara menyeluruh. Rendahnya investasi pada sub sektor perikanan di Indonesia juga dapat dilihat melalui tabel realisasi investasi penanaman modal dalam dan luar negeri dibawah ini:

Tabel 2: Rata-rata Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam dan Luar Negeri menurut Sektor Ekonomi tahun 2010-2017

No.	Sektor Ekonomi	Dalam Negeri (Miliar Rupiah)	Luar Negeri (juta US\$)
1	Pertanian	13156.14	1609.18
2	Kehutanan	129.32	38
3	Perikanan	43.48	32.25
4	Pertambangan dan Penggalian	9121.69	3836.51
5	Perindustrian	64907.21	11546.79
6	Listrik, gas, air	18769.77	2211.08
7	Konstruksi	10615.26	561.03
8	Perdagangan	1731.39	768.26
9	Restoran dan Hotel	1908.33	620.13
10	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	17750.02	2758.7

Lanjutan tabel 2 rata-rata realisasi investasi

No.	Sektor Ekonomi	Dalam Negeri (Miliar Rupiah)	Luar Negeri (juta US\$)
11	Real Estate dan Jasa Perusahaan	6158.24	1390.72
12	Jasa Masyarakat, Sosial, dan Perorangan	2100.21	612.6

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah penulis 2009

Berdasarkan tabel 2 dapat terlihat bahwa investasi pada sub sektor perikanan masih sangat rendah dibanding dengan sektor lainnya, yaitu sebesar Rp 43.48 miliar untuk investasi dalam negeri dan 32.25 US\$ untuk investasi luar negeri. Pemerintah masih perlu memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi daya tarik orang atau negara lain untuk berinvestasi, sehingga akan semakin berdampak positif untuk pertumbuhan PDB sektor perikanan. Tingginya kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDB sektor pertanian dapat diindikasikan bahwa sub sektor perikanan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap PDB Nasional. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus kepada sub sektor perikanan guna meningkatkan pertumbuhan sub sektor perikanan dengan memperhatikan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi investasi dan PDB sub sektor perikanan, termasuk faktor-faktor makroekonomi.

Menurut Putong (2013:273) “Tujuan ilmu ekonomi makro adalah untuk memahami peristiwa/fenomena ekonomi dan untuk memperbaiki kebijakan ekonomi. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dimengerti bahwa makroekonomi adalah suatu fenomena yang menggambarkan kegiatan ekonomi secara menyeluruh dan untuk diambil kebijakan untuk memperbaiki kebijakan sebelumnya. Menurut ekonomi Keynesian, kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal (Yuana, 2010: 277).

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang lebih baik (diinginkan) dengan cara mengubah jumlah uang yang beredar, sedangkan kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang lebih baik (diinginkan) dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah (Rahardja dan Manurung, 2008:7). Kebijakan fiskal dalam hal ini melibatkan pemerintah dalam mengalokasikan penerimaan negara dalam bentuk pajak maupun bukan pajak ke dalam belanja negara.

Keynes berpendapat bahwa ada dua pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan kebijakan fiskal, yaitu: *income approach* (melalui pajak) dan *expenditure approach* (melalui pengeluaran). Perekonomian akan tumbuh dengan baik jika pemerintah menurunkan pajak atau menaikkan pengeluarannya (Mankiw:2013). Penelitian ini melihat pengeluaran pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum (Machmud, 2016: 120).

Pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah berpengaruh pada peningkatan pembangunan (Sukirno, 2013: 168). Peningkatan pembangunan suatu negara berpengaruh juga pada peningkatan investasi. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (---), melalui pembangunan infrastruktur Indonesia, maka akan semakin banyak juga investor yang ikut

memajukan daerah tersebut dan membuat Indonesia semakin mencapai apa yang telah dicita-citakannya selama ini. Meningkatnya investasi pada suatu negara, tentu juga dapat meningkatkan pendapatan negara tersebut. Berdasarkan hal tersebut, dapat diambil hipotesis bahwa pengeluaran pemerintah akan mempengaruhi investasi dan selanjutnya akan mendorong PDB sub sektor perikanan di Indonesia.

Disisi lain, kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui bank sentral guna mengatur penawaran uang dan tingkat bunga dalam tingkat yang wajar dan aman (Putong, 2013:322). Dalam hal ini kebijakan moneter ditinjau dari suku bunga, nilai tukar, dan inflasi. Suku bunga merupakan bagian kebijakan moneter yang dipengaruhi oleh perubahan uang. Analisis Keynes menunjukkan bahwa penambahan penawaran uang akan dapat menambah pendapatan nasional. Efek perubahan penawaran uang dalam teori Keynes akan menimbulkan perubahan atas suku bunga, selanjutnya perubahan suku bunga akan mengubah investasi, dan perubahan investasi akan mengubah pengeluaran dan diikuti oleh perubahan pendapatan nasional (Sukirno, 2013: 305). Berdasarkan Analisis Keynes dapat diambil hipotesis bahwa perubahan suku bunga akan mempengaruhi investasi pada sub sektor perikanan dan kemudian diikuti dengan perubahan pendapatan nasional melalui PDB sub sektor perikanan.

Selanjutnya adalah nilai tukar. Nilai tukar muncul karena keterbukaan negara yang terjadi sebagai akibat adanya transaksi jual beli barang atau jasa antar penduduk di negara berbeda yang menggunakan mata uang berbeda. Nilai tukar atau kurs valuta asing didefinisikan sebagai “jumlah uang domestik yang dibutuhkan, yaitu banyaknya rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing”

(Sukirno, 2013:397). Nilai tukar berpengaruh terhadap PDB dan investasi suatu negara melalui tingkat ekspor dan impor. Menurut Syarifuddin (2015), nilai tukar memiliki pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perekonomian. Secara langsung, nilai tukar akan mempengaruhi perekonomian suatu negara melalui harga barang ekspor dan impor suatu negara. Sementara secara tidak langsung, nilai tukar dapat mempengaruhi perekonomian melalui kegiatan ekspor dan impor.

Perubahan tingkat ekspor dan impor tersebut akan berdampak pada perubahan investasi dan PDB. Menurut Handoko dalam Amir dan Fithra (2015: 69), gangguan pada ekspor akan mempengaruhi minat investor asing dalam menanamkan modalnya pada sektor-sektor yang berorientasi ekspor. Jika prospek ekspor sudah tidak menarik lagi, investor juga tidak akan menanamkan modalnya pada sektor tersebut. Perubahan terhadap investasi tersebut kemudian diikuti dengan perubahan PDB sub sektor perikanan. Berdasarkan hal tersebut, dapat diambil hipotesis bahwa perubahan nilai tukar akan berpengaruh terhadap investasi sub sektor perikanan kemudian diikuti dengan perubahan PDB sub sektor perikanan.

Kebijakan moneter selanjutnya adalah Inflasi. Inflasi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Aliran Keynesian juga berpendapat bahwa inflasi merupakan suatu gejala moneter yang dipengaruhi karena adanya perubahan uang (Suseno dan Astiyah,2009). Menurut Sukirno (2003: 15), Inflasi yang serius cenderung untuk mengurangi investasi yang produktif, mengurangi ekspor dan menaikkan impor. Kecendrungan tersebut akan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Tujuan jangka panjang pemerintah adalah menjaga agar inflasi yang berlaku berada pada tingkat yang sangat rendah (Sukirno 2013: 333). Inflasi di Indonesia masih tergolong dalam kategori *creeping inflation* (inflasi rendah), karena besarnya masing kurang dari 10% per tahun. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 3: Laju Pertumbuhan PDB sektor perikanan dan tingkat Inflasi Indonesia tahun 2010-2017

Tahun	Laju Pertumbuhan PDB sektor Perikanan	Inflasi
2010	6 %	5,12%
2011	7,65 %	5,38%
2012	6,29 %	4,27%
2013	7,24 %	6,96%
2014	7,35 %	6,41%
2015	7,89 %	6,38%
2016	5,15 %	3,53%
2017	6,79 %	3,8%

Sumber: Bank Indonesia, data diolah peneliti (2019)

Tabel 3 menunjukkan laju pertumbuhan PDB sub sektor perikanan dan kondisi tingkat inflasi di Indonesia tahun 2010 sampai dengan tahun 2017. Kondisi laju pertumbuhan PDB sektor perikanan dan tingkat inflasi di Indonesia cenderung mengalami pergerakan yang fluktuatif. Tabel tersebut menjelaskan Indonesia pernah mengalami tingkat inflasi tertinggi di tahun 2013 dan terendah di tahun 2016.

Tahun 2013 ketika inflasi mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 2,76%, pertumbuhan PDB sub sektor perikanan mengalami kenaikan sebesar 0,4%, begitu juga dengan dua tahun berikutnya yang cenderung stabil dengan tahun 2013. Namun pada tahun 2016 ketika inflasi mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 2,85% laju pertumbuhan PDB juga mengalami penurunan yang cukup

signifikan sebesar 2,74%, begitu juga dengan tahun 2017 ketika inflasi kembali mengalami kenaikan sebesar 0,27% laju pertumbuhan PDB perikanan juga mengalami kenaikan sebesar 1,64%.

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa penurunan inflasi tidak diikuti oleh kenaikan PDB sub sektor perikanan. Ketika inflasi mengalami kenaikan seharusnya berdampak terhadap penurunan PDB sub sektor perikanan. Menurut Suseno & Astiyah (2009), laju inflasi yang tinggi akan berakibat negatif terhadap suatu perekonomian secara keseluruhan, baik terhadap individu, dunia usaha, serta anggaran pendapatan dan belanja pemerintah. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada tahun 2012 sampai dengan 2017.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah, suku bunga, nilai tukar, dan inflasi terhadap sub sektor perikanan melalui investasi yang juga mempengaruhi pendapatan nasional yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sub sektor perikanan pada masing-masing provinsi selama kurun waktu 2012 sampai dengan 2017. Untuk melihat hal tersebut peneliti akan mengambil sampel pada sepuluh provinsi dengan kriteria produksi rata-rata ikan terbanyak yang di jual di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Indonesia. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Suku Bunga, Nilai tukar dan Inflasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto Sub Sektor dengan Investasi sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada Negara Indonesia Periode 2012-2017)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap investasi sub sektor perikanan di Indonesia?
2. Apakah suku bunga berpengaruh terhadap investasi sub sektor perikanan di Indonesia sub sektor perikanan di Indonesia?
3. Apakah nilai tukar berpengaruh terhadap investasi sub sektor perikanan di Indonesia sub sektor perikanan di Indonesia?
4. Apakah inflasi berpengaruh terhadap investasi sub sektor perikanan di Indonesia sub sektor perikanan di Indonesia?
5. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto sub sektor perikanan di Indonesia?
6. Apakah suku bunga berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto sub sektor perikanan di Indonesia?
7. Apakah nilai tukar berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto sub sektor perikanan di Indonesia?
8. Apakah inflasi berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto sub sektor perikanan di Indonesia?
9. Apakah investasi berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto sub sektor perikanan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap investasi sub sektor perikanan di Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh suku bunga terhadap investasi sub sektor perikanan di Indonesia.
3. Mengetahui pengaruh nilai tukar terhadap investasi sub sektor perikanan di Indonesia.
4. Mengetahui pengaruh inflasi terhadap investasi sub sektor perikanan di Indonesia.
5. Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto sub sektor perikanan di Indonesia.
6. Mengetahui pengaruh suku bunga terhadap Produk Domestik Regional Bruto sub sektor perikanan di Indonesia.
7. Mengetahui pengaruh nilai tukar terhadap Produk Domestik Regional Bruto sub sektor perikanan di Indonesia
8. Mengetahui pengaruh inflasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto sub sektor perikanan di Indonesia
9. Mengetahui pengaruh investasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto sub sektor perikanan di Indonesia.

D. Kontribusi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk berbagai pihak, antara lain:

1. Kontribusi Akademis

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat membantu akademisi dalam memahami pengaruh pengeluaran pemerintah, suku bunga, nilai tukar, dan inflasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto sub sektor perikanan di Indonesia dengan investasi sebagai variabel intervening. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengaplikasikan model dalam penelitian ini untuk penelitian yang sama. Hal tersebut disebabkan karena masih sedikit penelitian terdahulu yang membahas tentang pengaruh makroekonomi terhadap PDRB dan investasi di Indonesia.

2. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai keterkaitan pengaruh makroekonomi terhadap pertumbuhan sub sektor perikanan di Indonesia, sehingga dapat dijadikan masukan pemerintah dan pihak terkait lainnya sebagai pengambilan keputusan dalam membuat kebijakan yang tepat dalam perekonomian. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan pemerintah dalam peningkatan pertumbuhan sub sektor perikanan di Indonesia.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh dan memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, maka peneliti

mengklasifikasikan penulisan penelitian ini dalam bab dan sub bab. Berikut sistematika pembahasan dalam penelitian ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang topik pembahasan yang dipilih oleh peneliti, rumusan masalah yang akan dikaji, tujuan dari dilakukannya penelian, kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka menjelaskan tentang penelitian terdahulu sebagai rujukan dari penelitian ini yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas, selain itu juga menguraikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pengeluaran pemerintah, suku bunga, nilai tukar, dan inflasi. Dua teori yang digunakan sebagai landasan penelitian ini yaitu Teori Keynes dan Mundel-Fleming. Pada bab ini juga diuraikan mengenai pengaruh antar variabel, model konsep penelitian, serta model hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian menjelaskan mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian beserta pengukurannya, teknis pengumpulan data, dan teknik analisis data.

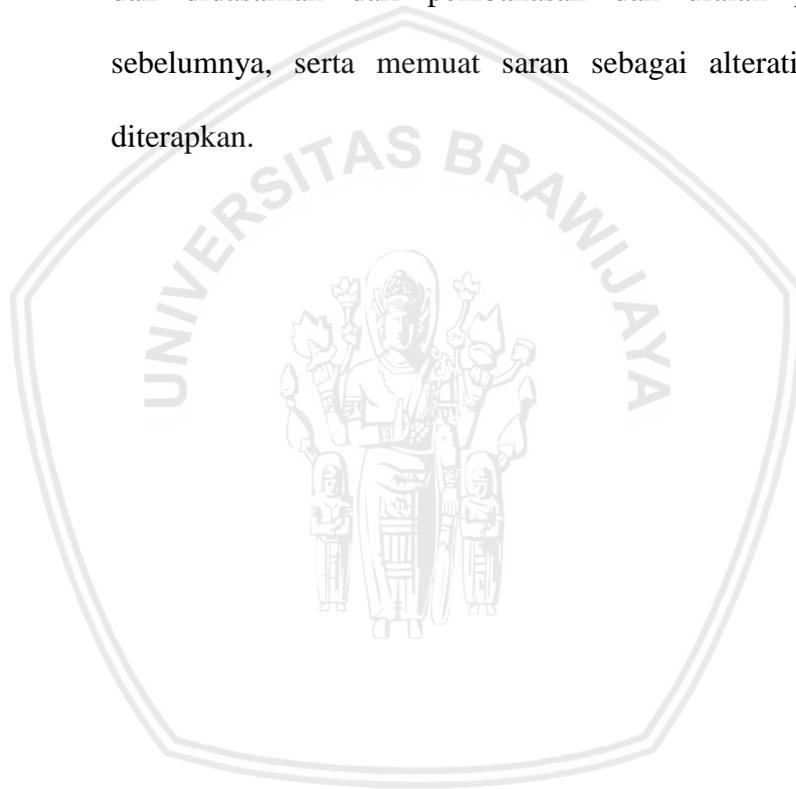
BAB IV : HASIL DAN PENELITIAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang mencakup gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, analisis data, pembahasan

hasil penelitian apakah variabel-variabel terikat tersebut berpengaruh terhadap variabel bebas.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang didapatkan dari hasil analisa penelitian teori-teori yang berkaitan dengan pokok permasalahan dan didasarkan dari pembahasan dan uraian pada bab-bab sebelumnya, serta memuat saran sebagai alteratif yang dapat diterapkan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

Penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wang (2005)

Penelitian dengan judul “*Effects of government expenditure on private investment: Canadian empirical evidence*” ini meneliti berbagai bentuk pengeluaran pemerintah terhadap investasi swasta di Kanada pada tahun 1961-2000. Variabel pengeluaran pemerintah dilihat dari berbagai macam pengeluaran, yaitu pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, modal, infrastruktur, perlindungan orang dan harta, biaya utang, dan pelayanan sosial. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kointegrasi dan mekanisme koreksi kesalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap investasi. Pengeluaran pemerintah untuk modal dan infrastruktur berpengaruh negatif terhadap investasi. Sedangkan pengeluaran pemerintah untuk perlindungan orang dan harta, pengeluaran atas beban utang, dan pelayanan sosial tidak memiliki pengaruh terhadap investasi.

2. Adam dan Hermawan (2011)

Penelitian dengan judul “Pengaruh aspek fiskal dan moneter terhadap Produk Domestik Bruto sektor pertanian” ini menilai pengaruh aspek fiskal dan aspek moneter terhadap PDB sub sektor pertanian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel pengeluaran pemerintah, jumlah uang beredar, subsidi, pajak, dan tingkat suku bunga. Penelitian ini menguji pengaruh variabel aspek fiskal dan aspek moneter terhadap sub sektor pertanian di Indonesia dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS).

Hasil penelitian menunjukkan variabel jumlah uang beredar dan subsidi yang memiliki pengaruh positif terhadap PDB sektor pertanian pada tahun 1995-2009. Variabel pajak, tingkat suku bunga dan kondisi ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap PDB sektor pertanian, sedangkan variabel pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap PDB sektor pertanian di Indonesia pada tahun 1995-2009. Hal tersebut diduga berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan yang di mulai dari sekitar bulan April dan Agustus sampai bulan Oktober dan Desember setiap tahunnya, sehingga pelaksanaan pembangunan pada tahun berjalan belum secara langsung memberikan pengaruh terhadap PDB sektor pertanian.

3. Ahmad et.al (2013)

Penelitian dengan judul “*Exchange Rate and Economic Growth in Pakistan (1975-2011)*” ini menyelidiki dampak inflasi, nilai tukar nominal, FDI, dan modal saham pada pertumbuhan ekonomi di Pakistan dengan

menggunakan data time series tahun 1975-2011. Penelitian ini menggunakan teknik regresi berganda untuk menganalisa hubungan antara variabel dependen (PDB) dan variabel independen (inflasi, investasi asing langsung, nilai tukar dan modal saham). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi dan nilai tukar berdampak negatif dan signifikan terhadap PDB di Pakistan. Modal saham tidak memiliki pengaruh terhadap PDB di Pakistan, dan FDI berdampak positif dan signifikan terhadap PDB di Pakistan.

4. Bahtiar (2013)

Penelitian dengan judul “Dampak Pengeluaran Pemerintah terhadap Investasi Swasta” ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kebijakan fiskal terhadap investasi swasta di Indonesia pada tahun 1990-2013. Penelitian ini dilakukan dengan Analisis uji kointegrasi dan OLS (*Ordinary Least Square*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi swasta, sedangkan defisit anggaran berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap investasi swasta.

5. Mahdi (2014)

Penelitian dengan judul “Elastisitas Investasi dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan PDB Sektor Pertanian di Indonesia” ini memiliki ruang lingkup penelitian yang mencakup perkembangan investasi dalam pembangunan nasional Indonesia tahun 1994-2003. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dan besarnya elastisitas investasi terhadap pertumbuhan PDB sektor pertanian di Indonesia.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel investasi dalam negeri, investasi luar negeri, dan PDB sektor pertanian di Indonesia. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dan diolah melalui bantuan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi dalam dan luar negeri mempengaruhi pertumbuhan PDB sektor pertanian di Indonesia pada tahun 1994-2003 sebesar 87,5% sedangkan sisanya 12,5% dipengaruhi oleh faktor lainnya.

6. Pridayanti (2014)

Penelitian ini berjudul “Pengaruh ekspor, impor, dan nilai tukar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 2002-2012” ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh ekspor, impor, dan nilai tukar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data time series dari tahun 2002-2012. Model penelitian yang digunakan untuk membuktikan hipotesis penelitian adalah dengan model *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sedangkan variabel impor dan nilai tukar berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

7. Hasnul (2015)

Penelitian dengan judul “*The effect of government expenditure on economic growth: the case of Malaysia*”. Penelitian ini melihat hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Malaysia selama 45 tahun terakhir, tahun 1970 – 2014. Penelitian ini menggunakan teknik

OLS untuk menemukan efek tetap dari pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini mengklasifikasikan pengeluaran pemerintah, yaitu pengeluaran pembangunan, perumahan, pendidikan, pertahanan, perawatan kesehatan. Hasilnya menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah yang lebih besar dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah.

Pengeluaran pembangunan dan pengeluaran perumahan secara signifikan mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Sedangkan, pengeluaran pendidikan, pertahanan, perawatan kesehatan, dan pengeluaran pembangunan tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini menunjukkan bahwa hipotesis Keynesian tidak berlaku dalam perekonomian Malaysia. Mengingat hubungan negatif antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi, itu mungkin merupakan sinyal dimana pengeluaran pemerintah bukan merupakan penyebab pertumbuhan ekonomi.

8. Lubis, et.al (2015)

Penelitian dengan judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi Investasi Asing Langsung pada Sektor Perkebunan di Indonesia”. Penelitian ini menggunakan matriks SWOT untuk meningkatkan sektor perkebunan Indonesia dengan tujuan untuk menganalisis faktor-faktor penentu investasi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah investasi langsung asing, nilai ekspor, nilai tukar, suku bunga domestik, suku bunga Amerika Serikat, Produk Domestik Bruto (PDB), dan Indeks Harga Konsumen (IHK),

dan krisis sebagai variabel dummy. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh nilai ekspor, nilai tukar, suku bunga domestik, suku bunga Amerika Serikat, PDB, dan IHK, dan krisis terhadap investasi asing langsung sektor perkebunan, baik positif maupun negatif.

9. Rahman, et.al (2015)

Penelitian dengan judul “*Effects of Government Expenditure on Private Investment: Evidence from Pakistan*” ini melihat hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan investasi swasta di Pakistan selama periode 1974-2010. Variabel pengeluaran pemerintah dilihat dari berbagai macam pengeluaran, yaitu pengeluaran pemerintah pada pertanian, pertahanan, pelayanan masyarakat, pelayanan utang, pendidikan, kesehatan, manufaktur, transportasi, dan komunikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor pertanian, kesehatan, transportasi, dan komunikasi berdampak positif dan signifikan terhadap investasi. Pengeluaran pemerintah pada pelayanan masyarakat dan pelayanan utang berdampak negatif dan signifikan terhadap investasi swasta. Sedangkan pengeluaran pemerintah pada pendidikan berpengaruh positif dan pertahanan negatif tapi tidak signifikan.

10. Septifany,et.al (2015).

Penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Inflasi, Tingkat Suku Bunga, Nilai Tukar Rupiah, dan Cadangan Devisa terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel inflasi, suku bunga, nilai tukar terhadap dollar, dan cadangan devisa

terhadap penanaman modal asing di Indonesia. Penelitian ini melihat pengaruh tersebut dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2014.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel inflasi, suku bunga SBI, nilai tukar, cadangan devisa, dan penanaman modal asing di Indonesia. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan data time series dari Bank Indonesia. Hasil penelitian ini adalah variabel inflasi, suku bunga SBI, nilai tukar rupiah terhadap dollar, dan cadangan devisa secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia. Variabel Suku bunga SBI dan cadangan devisa memiliki efek positif dan signifikan terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia, sementara variabel inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap dolar memiliki efek negatif dan berpengaruh signifikan terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia.

11. Chandio, et.al (2016)

Penelitian dengan judul “*Impact of Government Expenditure on Agricultural Sector and Economic Growth in Pakistan*” ini meneliti dampak pengeluaran pemerintah pada sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi di Pakistan pada tahun 1983-2011. Penelitian ini menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS) untuk menguji hubungan antar variabel pengeluaran pemerintah dan investasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara pengeluaran pemerintah sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi di Pakistan.

12. Lumbantobing (2017)

Penelitian dengan judul “Pengaruh investasi dalam negeri, investasi luar negeri, dan pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto di DKI Jakarta” ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh investasi dalam dan luar negeri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan teknik analisis linear berganda. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa terdapat pengaruh antara pengeluaran pemerintah dan PDRB DKI Jakarta, dan tidak terdapat pengaruh antara investasi dalam dan luar negeri terhadap PDRB DKI Jakarta, hal tersebut karena masih kurangnya penanaman modal yang masuk ke Provinsi DKI Jakarta.

13. Larasati et.al. (2018)

Penelitian dengan judul “Pengaruh Inflasi, Ekspor dan Tenaga Kerja terhadap Produk Domestik Bruto ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh inflasi, ekspor, dan tenaga kerja terhadap PDB di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa gabungan dari data *cross-section* dan *time series* (data panel), pada tahun 2007-2016. Populasi dalam penelitian ini ialah inflasi, ekspor, tenaga kerja, dan Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari tahun 2006 hingga 2017.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel inflasi, ekspor, tenaga kerja, dan PDB. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan model *fixed effect*. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa variabel inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDB Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Variabel ekspor dan tenaga kerja berdampak positif terhadap PDB Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand.



Tabel 4 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Wang (2005)	Effects of government expenditure on private investment: Canadian empirical evidence	a. Pengeluaran Pemerintah b. Investasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk pertanian, kesehatan, dan Transportasi dan Komunikasi memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap investasi swasta. Pengeluaran pemerintah untuk pelayanan masyarakat dan utang pelayanan memiliki pengaruh negatif kepada investasi swasta. Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan memberikan pengaruh positif dan pertahanan berpengaruh negatif tapi tidak signifikan terhadap investasi swasta.	Penelitian ini melihat pengeluaran pemerintah terhadap investasi pada negara Kanada.
2.	Adam dan Hermawan (2011)	Pengaruh aspek fiskal dan moneter terhadap PDB sub sektor Pertanian	c. Pengeluaran Pemerintah untuk sektor pertanian d. Jumlah uang beredar e. Subsidi Pajak f. Tingkat Suku Bunga g. PDB	Hasil estimasi menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian tidak secara signifikan mempengaruhi produk domestik bruto di bidang pertanian. Sementara jumlah uang beredar dan subsidi berpengaruh positif terhadap produk domestik bruto di bidang pertanian. Pajak, suku bunga, dan kondisi ekonomi memengaruhi secara negatif produk domestik bruto di bidang pertanian	Penelitian ini melihat pada sektor pertanian.
3.	Ahmad et.al. (2013)	Exchange Rate and Economic Growth in	a. PDB b. inflasi c. Nilai tukar d. FDI	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi dan nilai tukar berdampak negatif dan signifikan terhadap PDB. Modal saham	Penelitian ini melihat nilai tukar, inflasi, FDI pada pertumbuhan ekonomi di

Lanjutan tabel 4 penelitian terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
		Pakistan (1975-2011)	e. Modal Saham	tidak memiliki pengaruh terhadap PDB. FDI berdampak positif dan signifikan terhadap PDB.	Pakistan.
4.	Bahtiar (2013)	Dampak Pengeluaran Pemerintah terhadap Investasi Swasta	a. Pengeluaran Pemerintah b. Devisit Anggaran c. Investasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap investasi swasta, sedangkan defisit anggaran berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap investasi swasta.	Penelitian hanya melihat variabel pengeluaran pemerintah terhadap investasi swasta.
5.	Mahdi (2014)	Elastisitas Investasi dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan PDB Sektor Pertanian di Indonesia	a. Investasi dalam negeri b. Investasi luar negeri c. PDB sektor pertanian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investasi dalam dan luar negeri berpengaruh signifikan terhadap PDB sektor pertanian.	Penelitian ini melihat pengaruh investasi terhadap PDB sektor pertanian.
6.	Pridayanti (2014)	Pengaruh Ekspor, Impor, Nilai tukar terhadap pertumbuhan ekonomi di	a. PDB Indonesia b. Ekspor c. Impor d. Nilai tukar	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sedangkan variabel impor dan nilai tukar berpengaruh negatif terhadap	Penelitian ini melihat pengaruh ekspor, impor, dan nilai tukar terhadap PDB Indonesia

Lanjutan tabel 4 penelitian terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
		Indonesia periode 2002-2012		pertumbuhan ekonomi.	
7.	Hasnul (2015)	The effects of government expenditure on economic growth: the case of Malaysia	a. Pengeluaran pemerintah b. Pertumbuhan ekonomi	Hasilnya menunjukkan bahwa ada korelasi negatif antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Malaysia selama 45 tahun terakhir. Temuan ini dapat memberikan gambaran umum kepada para pembuat kebijakan Malaysia untuk mengoptimalkan efek pengeluaran pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi	Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel, yaitu pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi.
8.	Lubis et.al (2015)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi Asing Langsung pada Sektor Perkebunan di Indonesia	a. Investasi langsung Asing b. Nilai tukar c. Nilai ekspor d. Suku bunga domestic e. Suku bunga di Amerika Serikat f. IHK g. PDB h. Krisis	Hasil dari model menyarankan bahwa: 1. Dalam jangka pendek, variabel nilai tukar, nilai ekspor, suku bunga AS, PDB, dan IHK memiliki dampak positif terhadap investasi asing langsung. Krisis memiliki dampak negatif. 2. Jangka Panjang, suku bunga domestik, IHK, dan PDB memiliki dampak positif, tetapi krisis memiliki dampak negatif.	Penelitian ini hanya melihat variabel investasi pada Sektor Perkebunan.

Lanjutan tabel 4 penelitian terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
9.	Rahman, et.al (2015)	Effects of Government Expenditure on Private Investment: Evidence from Pakistan	a. Pengeluaran Pemerintah b. Investasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pada pendidikan, kesehatan, transportasi, dan komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi swasta. Pengeluaran pemerintah pada pelayanan masyarakat dan pelayanan utang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap investasi swasta. Pengeluaran pemerintah pada pendidikan positif, pada pertahanan negatif, tapi tidak signifikan.	Penelitian ini melihat pengaruh pengeluaran pemerintah pada investasi swasta di Pakistan.
10.	Septifany, et.al. (2015)	Analisis Pengaruh Inflasi, Tingkat Suku Bunga, Nilai Tukar Rupiah dan Cadangan Devisa terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia	a. Inflasi b. Suku Bunga c. Nilai Tukar d. Cadangan Devisa e. Penanaman Modal Asing	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel inflasi, suku bunga, nilai tukar rupiah terhadap dollar, dan cadangan devisa secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penanaman modal asing di Indonesia. Variabel suku bunga dan cadangan devisa memiliki efek positif dan signifikan terhadap penanaman modal asing di Indonesia sementara variabel inflasi dan nilai tukar rupiah memiliki dampak negatif dan berpengaruh signifikan terhadap penanaman modal asing di Indonesia.	Penelitian ini melihat pengaruh inflasi, suku bunga, dan nilai tukar rupiah terhadap penanaman modal asing.

Lanjutan tabel 4 penelitian terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
11.	Chandio, et.al. (2016)	Impact of Government Expenditure on Agricultural Sector and Economic Growth in Pakistan	a. Pengeluaran Pemerintah b. Pertumbuhan ekonomi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh antara pengeluaran pemerintah sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi di Pakistan.	Penelitian ini melihat pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Pakistan
12.	Lumbantobing (2017)	Pengaruh Investasi Dalam Negeri, Investasi Luar Negeri, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto di DKI Jakarta	c. Investasi Dalam Negeri d. Investasi Luar Negeri e. Pengeluaran Pemerintah PDRB DKI Jakarta	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari investasi dalam negeri terhadap PDRB di DKI Jakarta. (2) Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari investasi luar negeri terhadap PDRB DKI Jakarta (3) Terdapat pengaruh yang signifikan dari pengeluaran pemerintah terhadap PDRB DKI Jakarta	Penelitian melihat pengaruh investasi dalam dan luar negeri terhadap PDRB di DKI Jakarta.

Lanjutan tabel 4 penelitian terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
	Larasati dan Sulasmiyati (2018)	Pengaruh Inflasi, Ekspor, dan Tenaga Kerja terhadap Produk Domestik Bruto	<ul style="list-style-type: none"> a. Inflasi b. Ekspor c. Tenaga Kerja d. PDB 	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) variabel inflasi, ekspor, dan tenaga kerja berpengaruh secara langsung dan simultan terhadap PDB (2) variabel inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PDB 3) variabel ekspor berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB. (4) variabel tenaga kerja berpengaruh positif signifikan terhadap PDB.	Penelitian ini hanya melihat pengaruh inflasi terhadap PDB Indonesia

Sumber: Data diolah Peneliti (2019)



B. Tinjauan Teoritis

1. Produk Domestik Bruto (PDB)

Pendapatan nasional atau dikenal juga dengan output nasional pada umumnya digunakan sebagai ukuran untuk perbandingan kondisi ekonomi suatu negara. Ada tiga hal penting yang dapat diketahui dari pendapatan nasional. Menurut Pratama (2014: 13), pendapatan nasional menunjukkan beberapa hal penting dalam sebuah perekonomian. Pertama, besarnya output nasional merupakan gambaran awal tentang seberapa efisien sumber daya yang digunakan dalam perekonomian untuk memproduksi barang dan jasa. Kedua, besarnya output nasional merupakan gambaran awal tentang produktivitas dan tingkat kemakmuran suatu negara, dan yang ketiga, besarnya output nasional merupakan gambaran awal tentang masalah-masalah struktural (mendasar) yang dihadapi suatu negara.

Istilah yang paling sering digunakan untuk pendapatan nasional adalah Produk Domestik Bruto (PDB). Produk Domestik Bruto (PDB) atau dalam istilah inggrisnya *Gross Domestic Bruto* (GDP) adalah “total pendapatan yang dihasilkan semua orang baik warga negara sendiri maupun warga negara asing dari semua barang dan jasa yang di dalam suatu negara” (Hasyim, 2017: 9). PDB sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian karena tujuan dari PDB adalah untuk meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode tertentu (Mankiw 2006:17).

a. Komponen PDB

Terdapat tiga metode perhitungan PDB yang banyak digunakan oleh setiap negara, diantaranya metode dengan cara pengeluaran, cara produk neto, dan cara pendapatan. Namun, yang paling sering digunakan adalah dengan pendekatan pengeluaran. Menurut Sukirno (2013:37), data pendapatan nasional dan komponen-komponen data yang dihitung dengan cara pengeluaran dapat digunakan sebagai landasan untuk mengambil langkah-langkah dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi.

Berikut persamaan dalam menghitung pendekatan pengeluaran:

$$Y = C + I + G + XN.$$

Sumber: (Mankiw, 2006: 25)

Mankiw (2006), menjelaskan bahwa PDB (Y) merupakan jumlah konsumsi, investasi, pembelian pemerintah, dan ekspor neto.

1) Konsumsi (C)

Konsumsi merupakan barang atau jasa yang dibeli oleh masyarakat.

Konsumsi terdiri dari tiga sub kelompok, yaitu barang tidak tahan lama (barang yang habis dipakai dalam waktu pendek, seperti makanan dan pakaian), barang tahan lama (barang yang memiliki usia panjang, seperti mobil dan TV), dan barang jasa (seperti potong rambut dan berobat ke dokter).

2) Investasi

Investasi merupakan barang yang dibeli untuk penggunaan di masa depan. Investasi dibedakan menjadi tiga sub kelompok, yaitu investasi tetap bisnis (pembelian pabrik dan peralatan baru oleh perusahaan), investasi residensial (pembelian rumah), dan investasi persediaan (peningkatan dalam persediaan barang di suatu perusahaan).

3) Pembelian pemerintah

Pembelian pemerintah adalah barang dan jasa yang dibeli oleh pemerintah, meliputi pembangunan infrastruktur seperti jalan layang, jasa yang diberikan pegawai pemerintah.

4) Ekspor neto

Ekspor neto merupakan perhitungan perdagangan dengan negara lain. Ekspor neto adalah nilai barang dan jasa yang diekspor ke negara lain dikurangi nilai barang dan jasa yang diimpor ke negara lain.

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perikanan

Menurut Badan Pusat Statistik (2019), pengertian domestik atau regional dalam PDRB merupakan provinsi/kota, dan transaksi yang dihitung dalam PDRB adalah transaksi yang terjadi di suatu wilayah domestik atau daerah tanpa memperhatikan apakah transaksi yang terjadi di suatu wilayah domestik atau daerah tanpa memperhatikan apakah transaksi dilakukan oleh masyarakat dari daerah tersebut atau masyarakat lain. Berdasarkan

pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa PDRB perikanan adalah transaksi perikanan yang terjadi di suatu wilayah domestik atau daerah tanpa memperhatikan apakah transaksi dilakukan oleh masyarakat dari daerah tersebut atau masyarakat.

2. Investasi

Investasi merupakan salah satu komponen dari pembentukan pendapatan nasional, sehingga pertumbuhan investasi akan berdampak terhadap pertumbuhan pendapatan nasional. Investasi juga merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Investasi akan mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, yang mencerminkan marak lesunya pembangunan. Dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap negara senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahkan investasi (Machmud, 2016: 100).

Investasi dapat didefinisikan sebagai tambahan bersih terhadap modal saham yang ada. Istilah lain dari investasi adalah akumulasi modal atau pembentukan modal (Machmud, 2016: 100). Menurut Maluya S.P Hasibuan dalam Mahmud (2016: 100), investasi merupakan alat untuk mempercepat pertumbuhan tingkat produksi di negara yang sedang berkembang, sehingga investasi berperan sebagai sarana untuk menciptakan kesempatan kerja.

a. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA)

Menurut Machmud (2016: 100), ditinjau dari sumbernya, investasi berasal dari dalam negeri (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan luar negeri (Penanaman Modal Asing). PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk

melakukan usaha di wilayah RI oleh investor atau penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah RI oleh penanam modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.

b. Investasi langsung dan Investasi tidak langsung

Menurut M.L. Jhingan dalam Machmud (2016: 101), Modal asing swasta atau negara yang ditanamkan dibedakan menjadi investasi langsung dan investasi tidak langsung:

- 1) Investasi langsung (*direct investment*) berarti perusahaan dari negara penanam modal melakukan pengawasan atas aset (aktiva) yang ditanamkan di negara pengimpor modal dengan cara investasi. Investasi langsung dapat mengambil beberapa bentuk, seperti pembentukan cabang perusahaan di negara pengimpor, pembentukan perusahaan di negara pengimpor yang semata-mata dibiayai oleh perusahaan yang berlokasi di negara penanam modal, pembentukan perusahaan di negara penanam modal untuk secara khusus beroperasi di negara lain, atau menaruh aset (aktiva) tetap di negara lain oleh perusahaan nasional dari penanam modal.
- 2) Investasi tidak langsung (*indirect investment*) lebih dikenal sebagai investasi *portofolio* atau *rentiler* yang sebagian besar terdiri dari penguasaan atas saham yang dapat dipindahkan (yang dikeluarkan atau dijamin oleh pemerintah atau negara pengimpor modal), dan

atas saham atau surat utang oleh warganegara dari beberapa negara lain. Para pemegang saham hanya mempunyai hak atas deviden saja.

c. Tujuan Penanaman Modal

Menurut pasal 3 ayat 2 UU Nomor 25 tahun 2007 bahwa tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
- 2) Menciptakan lapangan kerja
- 3) Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan
- 4) Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional
- 5) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional
- 6) Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan
- 7) Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri
- 8) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Makroekonomi

“Makroekonomi melihat kegiatan ekonomi dengan melihat gambaran kegiatan ekonomi secara menyeluruh.”(Sukirno, 2013:26). Menurut Putong (2013:273) “Tujuan ilmu ekonomi makro adalah untuk memahami peristiwa/fenomena ekonomi dan untuk memperbaiki kebijakan ekonomi. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dimengerti bahwa makroekonomi adalah suatu fenomena yang menggambarkan kegiatan ekonomi secara menyeluruh dan

untuk diambil kebijakan untuk memperbaiki kebijakan sebelumnya. Menurut ekonomi Keynesian, kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal (Yuana, 2010: 277).

Kaum fiskalis (Keynes), cenderung menginginkan peran aktif pemerintah mengambil kebijakan fiskal melalui pengeluaran pemerintah dan pajak sebagai perangkat kebijakan stabilitas untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Kebijakan moneter yang diatur oleh Bank Indonesia yaitu dengan instrumen perubahan uang beredar yang mempengaruhi suku bunga, inflasi, serta nilai tukar untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah yang dapat mempengaruhi investasi dan pendapatan. Hal tersebut sesuai dengan tujuan Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia.

Menurut Bank Indonesia (2018), “Kestabilan rupiah yang dimaksud mempunyai dua dimensi. Dimensi pertama kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan terhadap harga-harga dan barang jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi. Sementara itu, dimensi kedua terkait dengan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain”.

Bank Indonesia menetapkan suku bunga sebagai instrumen kebijakan utama untuk mencapai tujuan terpeliharanya kestabilan nilai tukar rupiah yang mempengaruhi aktivitas kegiatan perekonomian dengan tujuan akhir pencapaian inflasi. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa indikator makroekonomi yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengambil kebijakan fiskal dan moneter dalam penelitian ini untuk mempengaruhi perekonomian adalah pengeluaran pemerintah, suku bunga, nilai tukar dan inflasi. Berikut penjelasannya:

a. Pengeluaran Pemerintah

Mankiw et.al. (2014: 11), pengeluaran pemerintah adalah pembelanjaan untuk barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah. Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang lebih baik (diinginkan) dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah (Hasyim, 2017:7). Menurut (Suparmoko, 2000:143), kebijakan fiskal adalah “kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan cara memanipulasi anggaran pendapatan dan belanja negara; artinya pemerintah dapat meningkatkan atau menurunkan pendapatan negara atau belanja negara dengan tujuan untuk mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pendapatan nasional”.

1) Penentu-Penentu Pengeluaran Pemerintah

Menurut Sukirno (2013:168), jumlah pengeluaran pemerintah yang akan dilakukan dalam suatu periode tertentu tergantung kepada banyak faktor, yang penting diantaranya yaitu:

a) Proyeksi jumlah pajak yang diterima

Pajak merupakan salah satu faktor penting yang menentukan besarnya pengeluaran pemerintah. Semakin banyak jumlah pajak yang diterima maka semakin banyak juga belanja pemerintah yang akan dapat di lakukan. Dengan demikian, pemerintah sebelum menyusun anggaran belanja harus terlebih dahulu membuat proyeksi mengenai jumlah pajak yang akan di terimanya.

b) Tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai

Faktor yang lebih penting dalam penentuan pengeluaran pemerintah adalah tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai pemerintah. Kegiatannya dapat memanipulasi/mengatur kegiatan ekonomi ke arah yang diinginkan.

c) Pertimbangan politik dan keamanan

Salah satu tujuan penting dalam menyusun anggaran belanja pemerintah adalah dengan melihat pertimbangan-pertimbangan politik dan kestabilan suatu negara. Kekacauan politik, perselisihan di antara berbagai golongan masyarakat dan daerah menyebabkan perbelanjaan daerah semakin meningkat. Pemerintah akan membelanjakan uang yang jauh lebih besar dari pendapatan pajak.

2) Macam Anggaran

Berdasarkan tujuan fiskal diatas, yaitu untuk mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan didalam pengeluaran pemerintah dikenal adanya politik anggaran. Menurut Rahardja dan Manurung (2008: 266), Politik anggaran dapat dibedakan menjadi 3, yaitu:

a) Anggaran Defisit (*Deficit Budget*)

Anggaran defisit adalah anggaran yang memang direncanakan untuk defisit, yang berarti rencana pengeluaran pemerintah lebih besar dari penerimaan pemerintah. Politik anggaran defisit dilakukan pemerintah untuk menstimulir pertumbuhan ekonomi. Hal ini umum dilakukan jika suatu perekonomian berada dalam kondisi resesi.

b) Anggaran Surplus (*Surplus Budget*)

Anggaran surplus merupakan kebalikan dari anggaran defisit. Pemerintah merencanakan penerimaan lebih besar dari pengeluarannya. Melalui anggaran surplus pemerintah mengerem pengeluarannya untuk menurunkan tekanan permintaan atau mengurangi daya beli dengan menaikkan pajak. Politik ini dilakukan jika perekonomian sedang dalam tahap ekspansi dan terus memanas (*overheating*).

c) Anggaran Berimbang (*Balanced Budget*)

Pemerintah dapat menempuh politik anggaran berimbang jika bila pengeluaran direncanakan sama dengan penerimaan yang diterima. Dalam politik anggaran berimbang tidak ada ketentuan kondisi ekonomi seperti apa politik anggaran berimbang ditempuh. Jika pemerintah memilih politik anggaran berimbang, ada dua hal utama yang ingin dicapai, yaitu peningkatan kedisiplinan dan kepastian anggaran.

3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia

Menurut Rahardja dan Manurung (2008:275), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah kebijakan fiskal dalam konteks pembangunan Indonesia. APBN dilaksanakan berdasarkan kepercayaan bahwa sektor ekonomi pemerintah sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan trilogi pembangunan: pertumbuhan, pemerataan, dan stabilisasi. APBN berlaku sebagai pedoman dan program kerja pemerintah untuk waktu satu tahun yang menyangkut kepentingan rakyat banyak.

4) **Pengurusan APBN di Indonesia**

Menurut Gilarso (2004: 142), ada lima langkah pelaksanaan dalam pengurusan APBN sesuai dengan UUD 1945 pasal 23:

a) Perencanaan

Pada tahap ini setiap tahun Presiden dibantu Menteri Keuangan bertugas menyusun suatu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk tahun yang akan datang. RAPBN adalah suatu rencana rinci mengenai jumlah biaya yang diperlukan untuk tahun yang akan datang, serta perkiraan sumber-sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran yang direncanakan tersebut. Proses penyusunan RAPBN selalu didasarkan atas sejumlah asumsi, seperti laju pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan, perkembangan kurs dollar, laju inflasi, suku bungam produksi dan harga minyak mentah, dan sebagainya.

b) Pengesahan RAPBN oleh DPR

Setiap tahun presiden selaku pemerintah mengajukan nota keuangan dan RAPBN kepada DPR. Tiga puluh hari sebelum tanggal 1 Januari, DPR harus sudah selesai mengadakan pembahasan nota keuangan dan RAPBN. Jika disetujui, dengan atau tanpa reevisi, maka RAPBN tersebut dapat disahkan menjadi undang-undang APBN dan disampaikan kepada pemerintah untuk dilaksanakan, dan jika ditolak, pemerintah harus menggunakan APBN tahun lalu (atau mengadakan revisi seperlunya).

c) Pelaksanaan APBN oleh Pemerintah

Setelah disahkan, APBN berlaku sebagai pedoman dan program kerja pemerintah untuk waktu satu tahun. berdasarkan Undang-undang APBN tersebut presiden menetapkan peraturan pelaksanaan dalam Keputusan Presiden agar undang-undang tersebut dapat segera dilaksanakan.

d) Pengawasan

APBN menyangkut dengan kepentingan rakyat, untuk itu perlu diadakan pengawasan yang ketat untuk menjamin tercapainya sasaran yang ditentukan. Adapun instansi pengawas terhadap pelaksanaan APBN adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku instansi tertinggi, Direktur Jendral Pengawasan Keuangan Negara (atas nama Menteri Keuangan) untuk mengawasi intern pada tingkat eksekutif, dan Inspektorat Jendral untuk mengawasi intern dalam lingkungan departemen.

e) Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBN oleh Pemerintah kepada DPR

Pertanggung jawaban pemerintah tentang keuangan negara kepada DPR dituangkan dalam bentuk Perhitungan Anggaran Negara (PAN), serta neraca kekayaan negara. Setiap laporan pertanggung jawaban departemen harus diperiksa oleh BPK dan disahkan oleh Menteri Keuangan, kemudian hasil pemeriksaan tersebut diberitahukan kepada DPR untuk diteliti dan dipertanggung jawabkan.

5) Jenis Pengeluaran Pemerintah

Menurut Machmud (2016: 126-127), Pengeluaran atau belanja negara adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah:

a) Belanja Pemerintah Pusat

Jenis belanja pemerintah pusat adalah sebagai berikut:

- i) Belanja Pegawai adalah kompensasi baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.
- ii) Belanja barang dalam negeri dan luar negeri adalah pembelian barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, termasuk biaya pemeliharaan serta biaya perjalanan
- iii) Belanja modal adalah pengeluaran atau belanja yang dikeluarkan dalam rangka pembentukan modal, yang terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, belanja modal lainnya, dan belanja modal non-fisik
- iv) Pembayaran bunga utang adalah pembayaran atas biaya pinjaman yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman
- v) Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan atau lembaga yang memproduksi, menjual, mengeskpor, atau mengimpor barang dan jasa

vi) Belanja Hibah adalah transfer rutin atau modal yang sifatnya tidak wajib dari pemerintah pusat kepada negara lain dan kepada organisasi internasional

vii) Bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadi risiko sosial

b) Transfer ke Daerah

Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja negara dalam rangka membiayai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dan penyesuaian. Rincian dana transfer ke daerah adalah:

i) Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas: Dana bagi hasil, yaitu dana untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi; Dana Alokasi Umum (DAU), dana yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah demi mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi; Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu dana dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional

ii) Dana Otonomi Khusus, yaitu dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Dana ini dibatasi hanya 20 tahun, yang saat ini untuk Provinsi Papua dan Nanggroe Aceh Darussalam.

iii) Dana Penyesuaian, yaitu dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan membantu mendukung percepatan pembangunan di daerah.

b. Suku Bunga

Menurut Karl dan Fair dalam buku Ekonomi Moneter (Hasoloan, 2014:173), suku bunga adalah pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman, dalam bentuk persentase dari pinjaman yang diperoleh dari jumlah bunga yang diterima tiap tahun dibagi dengan jumlah pinjaman. Suku bunga dipengaruhi oleh perubahan uang. Suku bunga sebagai fenomena moneter memiliki pengaruh dalam kegiatan ekonomi serta pendapatan nasional. Keynesian menerangkan efek perubahan uang kepada kegiatan ekonomi melalui rangkaian peristiwa berikut: (a) efek perubahan penawaran uang ke atas suku bunga, (b) efek perubahan suku bunga ke atas investasi, dan (c) efek perubahan investasi ke atas pengeluaran agregat dan pendapatan nasional.

1) Jenis Suku Bunga

Menurut Hasoloan (2014:192), ada 2 jenis suku bunga, yaitu:

- a) Suku Bunga Tetap
Suku bunga tetap adalah suku bunga pinjaman tersebut tidak berubah sepanjang masa kredit
- b) Suku Bunga Mengambang

Suku bunga mengambang adalah suku bunga yang berubah-ubah selama masa kredit berlangsung dengan mengikuti suatu kurs referensi tertentu.

2) Fungsi Suku Bunga

Fungsi suku bunga menurut Sunariyah dalam buku Ekonomi moneter (Hasoloan, 2014:192), adalah:

- a) Sebagai daya tarik bagi para penabung yang mempunyai dana lebih untuk diinvestasikan.
- b) Dapat digunakan sebagai alat moneter dalam rangka pengendalian penawaran dan permintaan uang yang beredar
- c) Pemerintah dapat memanfaatkan suku bunga untuk mengatur sirkulasi keuangan dalam suatu sistem perekonomian.

c. Nilai Tukar

Sukirno (2013:397), menjelaskan bahwa kurs (*exchange rate*) “menunjukkan harga atau nilai mata uang sesuatu negara dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain. Kurs valuta asing dapat juga didefinisikan sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan, yaitu banyaknya rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing”. Menurut Syarifuddin (2015), nilai tukar mempengaruhi perekonomian dan aktivitas bisnis melalui 2 saluran yaitu, saluran langsung maupun tidak langsung.

Secara langsung, nilai tukar akan mempengaruhi perekonomian suatu negara melalui harga barang ekspor dan impor suatu negara. Sementara secara tidak langsung, nilai tukar dapat mempengaruhi perekonomian melalui kegiatan ekspor dan impor. Selain itu, di dalam teori nilai tukar model *Mundell-Fleming* disebutkan bahwa nilai tukar yang terdepresiasi menyebabkan tingkat ekspor bertambah dan impor berkurang, dan sebaliknya nilai tukar yang terapresiasi

menyebabkan tingkat ekspor berkurang dan impor bertambah (Syarifuddin, 2016: 18). Perubahan tingkat ekspor dan impor tersebut akan berdampak pada perekonomian, dalam hal ini dilihat melalui perubahan investasi dan PDB.

1) Sistem Penetapan Kurs Valuta Asing

Menurut Putong (2013:367), sistem penetapan kurs terbagi menjadi tiga, yaitu:

a) Sistem Kurs Tetap (*Fixed Exchange Rate – FIER*)

Sistem kurs tetap adalah sistem kurs yang mematok nilai kurs mata uang asing terhadap mata uang negara yang bersangkutan dengan nilai tertentu yang selalu sama dalam periode tertentu (artinya tidak terpengaruhi oleh konjungtur ekonomi). Sistem kurs tetap disetarakan oleh suatu lembaga keuangan internasional (IMF) atau oleh masing-masing negara sesuai dengan kemampuan ekonominya (biasanya berdasarkan nilai dari *Hard Currency*).

Berdasarkan perjanjian Bretton Woods ketentuan pokok dari FIER (Putong, 2013: 368) adalah sebagai berikut:

- a. Sistem moneter internasional (SMI) didasarkan pada standar emas, dengan pengertian bahwa setiap negara yang menjadi anggota IMF (*International Monetary Fund*) mata uangnya dapat ditukar dengan emas;
- b. Sistem nilai tukar atau FIER antar negara anggota IMF harus tetap dan stabil;
- c. Kurs nilai tukar hanya boleh berfluktuasi antara 1% - 2,5% di atas atau di bawah kurs yang berlaku resmi;
- d. Setiap anggota IMF pada dasarnya dilarang melakukan devaluasi (penurunan nilai mata uangnya) ataupun revaluasi (menaikkan nilai mata uangnya) untuk memperbaiki posisi neraca pembayarannya (*BOP – Balance of Payment*);
- e. Negara anggota IMF yang mengalami defisit BOP dapat meminta bantuan IMF dalam bentuk *Special Drawing Right* (SDR), yaitu uang kertas emas yang dikeluarkan oleh IMF sebagai mata uang cadangan dan likuiditas selain Dollar AS.

b) Sistem Kurs Mengambang (*Floating Exchange Rate – FER*)

Menurut sistem kurs mengambang, nilai mata uang suatu negara ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran pada pasar uang (resmi). Sistem pada FER terbagi menjadi dua, yaitu Sistem ini terbagi dua macam yaitu, *Clean Float* (mengambang murni) dan *Dirty Float* (mengambang terkendali). *Clean Float* (mengambang murni) yaitu apabila penentuan nilai kurs tanpa adanya campur tangan pemerintah, sedangkan *Dirty Float* (mengambang terkendali) turut dengan adanya campur tangan pemerintah. Campur tangan pemerintah biasanya secara langsung masuk ke pasar uang dengan kebijakan moneter kuantitatif dan kebijakan fiskalnya, ataupun yang bersifat tidak langsung seperti himbaun dan sebagainya.

c) Sistem Kurs Terkait (*Pegged Exchange Rate – PER*)

Sistem kurs terkait yaitu nilai tukar yang dikaitkan dengan nilai mata uang negara lain, atau sejumlah mata uang tertentu. Jika kedua sistem kurs tetap dan sistem kurs mengambang menggunakan nilai kurs tertinggi terakhir, maka sistem PER menggunakan nilai kurs tengah mata uang tertentu yang mensyaratkan lebih atau kurang dari kurs tengah sebesar 2,5%.

2) Faktor yang mempengaruhi nilai tukar

Menurut Putong (2013:368-371), secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing adalah sebagai berikut:

a) Permintaan dan Penawaran valuta asing

Sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran, harga valuta asing akan menjadi lebih mahal jika permintaan akan mata uang tersebut lebih banyak dibanding yang ditawarkan. Sebaliknya harga valuta asing akan menjadi murah jika permintaan lebih sedikit dibandingkan penawarannya. Adapun sumber-sumber permintaan untuk valuta asing adalah:

- a. Impor barang dan jasa
- b. Ekspor modal atau transfer valas dari dalam negeri keluar negeri.

Sedangkan sumber-sumber penawaran valas adalah:

- a. Ekspor barang atau jasa yang menghasilkan valas
- b. Impor modal atau transfer valas dari luar negeri ke dalam negeri.

b) Tingkat Inflasi

Tingginya angka inflasi yang terjadi pada suatu negara mengindikasikan mahalnyanya harga-harga barang (tertentu) di negara tersebut. Mahalnya harga barang di suatu negara dibanding negara lain membuat negara yang mengalami inflasi tersebut mengimpor barang dari negara lain karena alasan harga yang lebih murah, hal tersebut mengakibatkan meningkatnya permintaan mata uang pada negara yang mengimpor dan menyebabkan rendahnya nilai mata uang negara yang

mengimpor terhadap mata uang negara yang memberikan impor barang tersebut.

c) Tingkat bunga

Tingkat suku bunga yang tinggi akan mengakibatkan banyaknya jumlah mata uang asing yang masuk kenegara tersebut. Ketika banyaknya aliran dana asing yang masuk ke suatu negara, maka permintaan mata uang lokal akan semakin tinggi, sehingga nilai mata uang lokal akan semakin naik.

d) Tingkat Pendapatan dan Produksi

Pertumbuhan ekonomi yang relatif pesat mengindikasikan semakin tingginya tingkat pendapatan masyarakat, dan meningkatnya daya beli masyarakat di negara tersebut. Pada kondisi yang sama kapasitas produksi negara tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan/permintaan masyarakatnya, maka negara tersebut akan mengimpor dari negara lain. Semakin besar nilai barang yang diimpor maka akan semakin besar juga permintaan mata uang asing tersebut, sehingga harganya relatif akan semakin naik dari harga semula terhadap mata uang lokal.

e) *Balance of Payment* (Neraca Pembayaran Luar Negeri)

Ada tiga hal yang sangat penting dalam melihat neraca perdagangan yaitu nilai dari *Current Account* = neraca transaksi berjalan (TB), *Capital account* = neraca modal (NM) dan *Monetary account* = lalu lintas moneter (LLM). Transaksi berjalan + neraca modal akan

memperlihatkan besarnya perubahan cadangan devisa. Jika $TB > NM$, maka berarti cadangan devisa bertambah. Dari cadangan devisa yang bernilai positif akan mengindikasikan bahwa penawaran uang mata asing lebih besar dari pada permintaannya, dan ini akan memberikan sentimen positif kepada nilai tukar mata uang lokal sehingga nilainya akan semakin menguat, dan sebaliknya.

f) Pengawasan Pemerintah

Pengawasan pemerintah dalam rangka mengawasi nilai tukar adalah dengan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Melalui kebijakan fiskal pemerintah menaikkan nilai pajak dan mengetatkan belanja negara agar jumlah penawaran mata uang lokal semakin sedikit dan ini diharapkan akan berdampak pada naiknya nilai mata uang lokal terhadap mata uang asing. Melalui kebijakan moneter, pemerintah melakukan pengetatan uang beredar atau sebaliknya untuk menaikkan atau menurunkan tingkat bunga untuk mengawasi nilai tukar.

d. Inflasi

Menurut Suseno dan Astiya (2009: 2), “Inflasi secara singkat dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus”. Terdapat dua pengertian dalam pengertian tersebut, yang pertama kenaikan harga secara umum dan yang kedua adalah terus menerus. Kenaikkan harga secara umum, artinya inflasi harus menggambarkan kenaikan harga sejumlah besar barang dan jasa yang dipergunakan (atau konsumsi) dalam suatu perekonomian.

1) Sifat Inflasi

Menurut Putong (2013:422), berdasarkan sifatnya inflasi dibagi menjadi 4 kategori utama yaitu:

- a) Inflasi merayap/rendah (*creeping inflation*), yaitu inflasi yang besarnya kurang dari 10% pertahun.
- b) Inflasi menengah (*galloping inflation*) besarnya antara 10 - 30% pertahun. Inflasi ini biasanya ditandai oleh naiknya harga-harga secara cepat dan relatif besar. Angka inflasi ini disebut inflasi 2 digit, misalnya 15%, 20%, 30% dan sebagainya.
- c) Inflasi berat (*high inflation*), yaitu inflasi yang besarnya antara 30 – 100% pertahun. Dalam kondisi ini harga-harga secara umum naik dan bahkan menurut istilah ibu-ibu rumah tangga harga berubah.
- d) Inflasi sangat tinggi (*hyper inflation*) yaitu inflasi yang ditandai oleh naiknya harga secara drastic hingga mencapai 4 digit (di atas 100%). Pada kondisi ini masyarakat tidak ingin lagi menyimpan uang, karena nilainya merosot sangat tajam, sehingga lebih baik ditukarkan dengan barang.

2) Penyebab Inflasi

Menurut Putong (2013:423), berdasarkan penyebab inflasi dibagi 2 yaitu:

a) *Demand Pull Inflation.*

Inflasi yang timbul karena adanya permintaan yang tinggi. Sesuai dengan hukum permintaan, akibatnya jika permintaan banyak sementara penawaran tetap maka harga akan naik. Inflasi ini jika terjadi secara terus menerus akan mengakibatkan inflasi yang berkepanjangan. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya produksi baru dengan penambahan tenaga kerja baru.

b) *Cost Push Inflation*

Inflasi ini terjadi karena turunnya produksi yang terjadi sebagai akibat naiknya biaya produksi (naiknya biaya produksi dapat terjadi

karena tidak efisiennya perusahaan, nilai kurs mata uang negara yang bersangkutan jatuh/menurun, kenaikan harga bahan baku industri, adanya tuntutan kenaikan upah dari serikat buruh yang kuat dan sebagainya). Dampak yang terjadi adalah produsen menaikkan harga produknya dengan jumlah penawaran yang sama atau jumlah penawaran yang sama, atau harga produknya naik (karena tarik menarik permintaan dan penawaran) karena penurunan jumlah produksi.

3) Indikator Inflasi

Menurut Rahardja dan Manurung (2008), ada beberapa indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengetahui laju inflasi selama satu periode tertentu, yaitu:

a) Indeks Harga Konsumen (*Consumer Price Index*)

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam satu periode tertentu. Angka IHK diperoleh dengan menghitung harga-harga barang dan jasa utama yang dikonsumsi masyarakat dalam satu periode tertentu. IHK menggambarkan besarnya kenaikan biaya hidup bagi konsumen karena IHK memasukkan komoditas-komoditas yang relevan (pokok) yang biasanya dikonsumsi masyarakat.

b) **Indeks Harga Perdagangan Besar (*Wholesale Price Index*)**

Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) melihat inflasi dari sisi produsen. IHPB menunjukkan tingkat harga yang diterima produsen pada berbagai tingkat produksi.

c) **Indeks Harga Implisit (*GDP Deflator*)**

Indeks Harga Implisit (IHI) digunakan untuk mendapatkan gambaran inflasi yang paling mewakili keadaan sebenarnya, karena IHI melihat kegiatan ekonomi sampai ke seluruh pelosok wilayah.

4) Kebijakan Mengatasi Inflasi

Menurut Sukirno (2013:354), beberapa kebijakan untuk mengatasi inflasi, yaitu:

- a) Kebijakan fiskal: menambah pajak dan mengurangi pengeluaran pemerintah.
- b) Kebijakan moneter: mengurangi, menaikkan suku bunga dan membatasi kredit.
- c) Dasar segi penawaran: melakukan langkah-langkah yang dapat mengurangi biaya produksi dan menstabilkan harga seperti mengurangi pajak impor dan pajak atas bahan mentah, melakukan penetapan harga, menggalakkan pertambahan produksi dan menggalakkan perkembangan teknologi.

C. Kajian Teori

1. Teori Keynes

Teori makroekonomi lahir dari kritik Keynes terhadap teori ekonomi klasik. Kaum klasik menyatakan bahwa setiap individu bebas dalam melakukan kegiatan ekonomi apapun (dalam batas tertentu). Kaum klasik beranggapan

bahwa dengan diberikannya kebebasan kepada individu untuk berusaha dalam kegiatan ekonomi maka akan bisa mencapai kemakmuran. Peranan pemerintah dibatasi semaksimal mungkin, pemerintah hanya diprioritaskan pada bidang yang tidak bisa dilakukan oleh pihak swasta, seperti pertahanan, hukum, dan ketatanegaraan (Putong 2013: 288)

Sangat berbeda dengan kaum klasik, Keynes berpendapat bahwa dalam perekonomian, pihak swasta tidak sepenuhnya diberikan kekuasaan untuk mengelola perekonomian, karena pada kondisi tertentu sebagaimana pandangan kaum sosialis menyatakan bahwa pihak swasta selalu mementingkan dirinya sendiri untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, agar kegiatan swasta dapat terjamin berada pada jalur yang tepat maka harus ada pihak yang dapat mengontrol dan mengaturnya, dalam hal ini adalah pemerintah. Campur tangan pemerintah bukan hanya sekedar sebagai “*Night Guard*” atau “Penjaga malam”, melainkan juga ikut langsung menentukan dan mengarahkan perekonomian ke arah yang lebih baik dan benar melalui kebijakan ekonomi (Putong, 2013: 294).

Menurut Rahardja dan Manurung (2008: 10), implikasi pandangan Keynes adalah diperlukan peranan pemerintah dalam pengelolaan perekonomian, baik melalui kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang lebih baik (diinginkan) dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kaum fiskalis (Keynes) cenderung menginginkan peran aktif pemerintah dalam mengatur pengeluaran pemerintah dan pajak sebagai

perangkat kebijakan stabilitas, dan ini ditempuh untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Melalui kebijakan fiskal, pengeluaran agregat dapat ditambah, sehingga akan menaikkan pendapatan nasional (Hasyim, 2017: 5).

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang lebih baik (diinginkan) dengan cara mengubah jumlah uang yang beredar. Keynes berpendapat bahwa uang dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Implikasinya adalah bahwa kebijakan moneter dapat dipergunakan sebagai salah satu instrumen kebijakan aktif untuk mempengaruhi naik turunnya kegiatan ekonomi (Warjiyo dan Solikin, 2003: 27). Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam teori keynes diperlukan peranan pemerintah untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi, yaitu melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.

2. Teori Mundell-Fleming

Model Mundell-Fleming dilukiskan sebagai “model kebijakan dominan untuk mempelajari kebijakan moneter dan fiskal pada perekonomian terbuka”(Mankiw, 2006: 327). Model Mundell-Fleming menunjukkan bahwa kekuatan kebijakan moneter dan fiskal untuk mempengaruhi pendapatan agregat tergantung pada sistem kurs yang diadopsinya apakah itu kurs mengambang atau kurs tetap. Di bawah kurs mengambang (*floating exchange rate*), kurs ditentukan oleh pasar dan di biarkan berfluktuasi dengan bebas untuk menanggapi kondisi perekonomian yang sedang berubah. Model Mundell-Fleming menunjukkan bahwa, di bawah kurs mengambang, hanya kebijakan

moneter yang bisa mempengaruhi pendapatan. Kebijakan fiskal tidak memberikan pengaruh terhadap pendapatan di bawah kurs mengambang karena dampak ekspansi kebijakan fiskal, menyebabkan mata uang terapresiasi, yang menyebabkan turunnya ekspor dan menghapus dampak ekspansioner terhadap pendapatan agregat.

Di bawah kurs tetap (*fixed exchange rates*), bank sentral mengumumkan nilai kurs, dan mempertahankan kurs sesuai dengan tingkat yang diumumkan. Model Mundell-Fleming menunjukkan bahwa, di bawah kurs tetap hanya kebijakan fiskal yang memberikan pengaruh terhadap pendapatan. Kebijakan moneter tidak mempengaruhi pendapatan. Karena setiap usaha dari kebijakan moneter, untuk mempengaruhi jumlah uang akan percuma, karena jumlah uang beredar harus disesuaikan untuk menjamin bahwa kurs tetap berada pada tingkat yang diumumkan (Mankiw, 2006: 356)

Berdasarkan hal tersebut, disimpulkan bahwa Model Mundell-Fleming memiliki sejumlah implikasi terkait dengan keefektifan kebijakan fiskal dan moneter dalam menciptakan keseimbangan ekonomi. Naik turunnya nilai tukar yang terjadi akibat kebijakan moneter ataupun fiskal menyebabkan perubahan pada tingkat ekspor. Perubahan tingkat ekspor tersebut akan mempengaruhi naik pertumbuhan ekonomi suatu negara (Syarifuddin, 2016).

D. Pengaruh Antar Variabel

1. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Investasi Sub Sektor Perikanan

Pengeluaran pemerintah memiliki dampak positif terhadap investasi. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah, seperti membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan, membuka lapangan pekerjaan dan membiayai berbagai jenis infrastruktur guna untuk peningkatan pembangunan (Sukirno 2013, 168). Peningkatan pengeluaran pemerintah untuk peningkatan pembangunan sub sektor perikanan seperti membangun sarana dan prasana untuk meningkatkan produksi perikanan yang akan berdampak pada pertumbuhan sub sektor perikanan. Pertumbuhan sub sektor perikanan tersebut akan meningkatkan investasi pada sub sektor perikanan.

Berdasarkan hal tersebut diindikasikan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap investasi sub sektor perikanan, dengan artian peningkatan investasi sub sektor perikanan diikuti dengan peningkatan pengeluaran pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan Teori Keynes yang sangat menekankan peranan pemerintah melalui pengeluaran pemerintah dalam mendorong kemajuan pertumbuhan ekonomi dalam hal ini melalui investasi. Beberapa penelitian yang melakukan penelitian tentang pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap investasi dilakukan oleh Wang (2005), Bahtiar (2013), dan Rahman et.al (2015).

Wang (2005) melakukan penelitian tentang “*Effects of government expenditure on private investment: Canadian empirical evidence*”. Bahtiar melakukan penelitian tentang “Dampak pengeluaran pemerintah terhadap investasi swasta”. Rahman et.al (2015) melakukan penelitian tentang “*Effects of Government Expenditure on Private Investment: Evidence from Pakistan*”.

Menurut hasil penelitian Wang (2005), menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap investasi, pengeluaran pemerintah untuk modal dan infrastruktur berpengaruh negatif terhadap investasi dan pengeluaran pemerintah untuk perlindungan orang dan harta, pengeluaran atas beban utang, dan pelayanan sosial tidak memiliki pengaruh terhadap investasi. Menurut hasil penelitian Bahtiar (2011), menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap investasi swasta dan penelitian Rahmat et.al (2015), menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor pertanian, kesehatan, transportasi, dan komunikasi berdampak positif dan signifikan terhadap investasi, pengeluaran pemerintah pada pelayanan masyarakat dan pelayanan utang berdampak negatif dan signifikan terhadap investasi swasta dan pengeluaran pemerintah pada pendidikan berpengaruh positif dan pertahanan negatif tapi tidak signifikan pada investasi.

2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB Sub Sektor Perikanan

Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah, seperti membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai

kegiatan-kegiatan pembangunan, membuka lapangan pekerjaan dan membiayai berbagai jenis infrastruktur guna untuk peningkatan pembangunan (Sukirno 2013, 168). Begitu juga pada pengeluaran pemerintah untuk sub sektor perikanan yang bertujuan agar roda perekonomian dapat berkembang dengan semakin meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh pemerintah. Pembangunan sarana prasarana, infrastruktur pada sub sektor perikanan akan semakin meningkatkan kinerja sub sektor perikanan, seperti misalnya pemerintah menunjang penyediaan benih yang diperlukan bagi pengembangan budidaya perikanan air tawar, yang berdampak pada semakin meningkatnya produksi ikan air tawar dan diikuti pada peningkatan pendapatan per daerah.

Berdasarkan hal tersebut diindikasikan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap PDRB sub sektor perikanan, dengan artian peningkatan PDRB sub sektor perikanan diikuti dengan peningkatan pengeluaran pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan Teori Keynes yang sangat menekankan peranan pemerintah melalui pengeluaran pemerintah dalam mendorong kemajuan pertumbuhan ekonomi. Beberapa penelitian yang melakukan penelitian tentang pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi diantaranya dilakukan oleh, Adam dan Hermawan (2011), Hasnul (2015), Chandio et.al (2016), dan Lumbantobing (2016).

Adam dan Hermawan (2011) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh aspek fiskal dan moneter terhadap Produk Domestik Bruto Sektor Pertanian”. Hasnul (2015) melakukan penelitian yang berjudul ‘*The effect of government*

expenditure on economic growth: the case of Malaysia”. Chandio et.al. (2016) melakukan penelitian berjudul “*Impact of Government Expenditure on Agricultural Sector and Economic Growth in Pakistan*” dan Lumbantobing (2017) melakukan penelitian berjudul “Pengaruh investasi dalam negeri, investasi luar negeri, dan pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto di DKI Jakarta.

Hasil penelitian Adam dan Hermawan (2011), menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap PDB sub sektor pertanian, hal ini diduga karena pelaksanaan pembangunan untuk sektor pertanian belum memberikan pengaruh secara langsung terhadap sektor pertanian. Hasil penelitian Hasnul menunjukkan bahwa terhadap korelasi yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Malaysia, hal tersebut di duga karena kemungkinan pengeluaran pemerintah bukan merupakan penyebab pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian Chandio et.al (2016), menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pertanian berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Pakistan. Hasil penelitian Lumbantobing (2017), menunjukkan pengaruh positif antara pengeluaran pemerintah dengan Produk Domestik Regional Bruto di DKI Jakarta.

3. Pengaruh Suku Bunga terhadap Investasi Sub Sektor Perikanan

Suku bunga merupakan pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman (Hasoloan, 2014: 173). Suku bunga memiliki pengaruh yang negatif terhadap investasi. Menurut Sukirno (2013: 127), apabila suku bunga tinggi, jumlah investasi akan berkurang sebaliknya, suku bunga yang rendah akan mendorong

investasi. Berdasarkan hal tersebut, diasumsikan bahwa perubahan suku bunga mempengaruhi tingkat investasi pada sub sektor perikanan yang mana jika suku bunga meningkat maka akan menurunkan investasi dan sebaliknya, penurunan suku bunga akan menaikkan investasi pada sub sektor perikanan di Indonesia.

Suku bunga merupakan bagian dari kebijakan moneter yang dipengaruhi oleh perubahan uang. Sesuai dengan teori Keynes yang menyebutkan bahwa kebijakan moneter dapat dipergunakan sebagai salah satu instrumen kebijakan aktif untuk mempengaruhi naik turunnya kegiatan ekonomi. Beberapa penelitian yang melakukan penelitian tentang pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi diantaranya dilakukan oleh Lubis et.al (2015) dan Septifany et.al (2015).

Lubis et.al (2015), melakukan penelitian dengan judul ‘‘ Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi Asing Langsung pada Sektor Perkebunan di Indonesia’’. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh suku bunga terhadap investasi asing langsung pada sektor perkebunan. Septifany, et.al (2015), melakukan penelitian dengan judul ‘‘ Analisis Pengaruh Inflasi, Tingkat Suku Bunga, Nilai Tukar Rupiah, dan Cadangan Devisa terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suku bunga berpengaruh terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia.

4. Pengaruh Suku Bunga terhadap PDRB Sub Sektor Perikanan

Suku bunga merupakan pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman (Hasoloan, 2014: 173). Suku bunga memiliki pengaruh negatif dengan PDRB. Hal ini berarti bahwa semakin meningkatnya tingkat suku bunga, maka PDRB

sub sektor pertanian akan semakin menurun. Pengaruh suku bunga terhadap PDRB melalui kredit dan investasi. Menurut Bank Indonesia (---), Bank Indonesia sebagai bank sentral menggunakan kebijakan moneter yang ekspansif melalui penurunan suku bunga untuk mendorong aktifitas ekonomi. Penurunan suku bunga akan meningkatkan kredit. Penurunan suku bunga juga menurunkan modal perusahaan untuk melakukan investasi, yang berdampak pada peningkatan konsumsi dan investasi, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hal tersebut, diasumsikan bahwa perubahan suku bunga mempengaruhi PDRB pada sub sektor perikanan yang mana jika suku bunga meningkat maka akan menurunkan PDRB dan sebaliknya, penurunan suku bunga akan menaikkan PDRB sub sektor perikanan di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan teori Keynes, dengan menggunakan kebijakan moneter yaitu suku bunga dalam mempengaruhi perekonomian, dalam hal ini adalah PDRB sub sektor perikanan. Beberapa penelitian yang melakukan penelitian tentang pengaruh suku bunga terhadap PDB diantaranya dilakukan oleh Adam dan Hermawan (2011) dengan judul "Pengaruh aspek fiskal dan moneter terhadap Produk Domestik Bruto Sektor Pertanian". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa suku bunga memiliki pengaruh negatif terhadap sektor pertanian di Indonesia.

5. Pengaruh Nilai Tukar terhadap Investasi Sub Sektor Perikanan

Perubahan nilai tukar dipengaruhi oleh peranan pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga stabilitas rupiah. Nilai tukar dapat mempengaruhi investasi melalui tingkat ekspor. Menurut Handoko (2015: 69),

Gangguan pada ekspor akan mempengaruhi minat investor asing dalam menanamkan modalnya pada sektor-sektor yang berorientasi ekspor. Jika prospek sektor-sektor yang berorientasi ekspor sudah tidak menarik lagi, investor juga tidak akan menanam modalnya pada sektor tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diasumsikan bahwa apresiasi nilai tukar rupiah akan berdampak negatif pada investasi sub sektor perikanan dan sebaliknya. Depresiasi nilai tukar rupiah akan berdampak positif pada investasi sub sektor perikanan. Hal tersebut sesuai dengan teori Mundell-Fleming yang menyebutkan bahwa nilai tukar dapat mempengaruhi perekonomian melalui tingkat ekspor dan impor. Beberapa penelitian yang melakukan penelitian tentang pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi diantaranya dilakukan oleh Lubis et.al (2015) dan Septifany et.al (2015).

Lubis at.al (2015), melakukan penelitian dengan judul “ Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi Asing Langsung pada Sektor Perkebunan di Indonesia”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh nilai tukar terhadap investasi asing langsung pada sektor perkebunan. Septifany, et.al (2015), melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Inflasi, Tingkat Suku Bunga, Nilai Tukar Rupiah, dan Cadangan Devisa terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai tukar berpengaruh negatif terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia.

6. Pengaruh Nilai Tukar terhadap PDRB Sub Sektor Perikanan

Perubahan nilai tukar dipengaruhi oleh peranan pemerintah melalui kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga stabilitas rupiah. Nilai tukar

mempengaruhi PDB melalui tingkat ekspor. Nilai tukar memiliki dampak yang negatif terhadap PDB. Menurut Syarifuddin (2015), nilai tukar yang terapresiasi menyebabkan tingkat ekspor berkurang dan impor bertambah yang diikuti oleh penurunan PDB. Berdasarkan hal tersebut diasumsikan bahwa apresiasi nilai tukar rupiah akan berdampak negatif pada PDRB sub sektor perikanan dan sebaliknya, depresiasi nilai tukar rupiah akan berdampak positif pada PDRB sub sektor perikanan.

Hal tersebut sesuai dengan teori Mundell-Fleming yang menyebutkan bahwa nilai tukar dapat mempengaruhi perekonomian melalui tingkat ekspor dan impor. Beberapa penelitian yang melakukan penelitian tentang pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi diantaranya dilakukan oleh Ahmad et.al (2013) dan Pridayanti (2014). Ahmad et.al. melakukan penelitian dengan judul "*Exchange Rate and Economic Growth in Pakistan (1975-2011)*".

Pridayanti (2014) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Ekspor, Impor, dan Nilai Tukar terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia". Hasil penelitian Ahmad et.al (2013), menunjukkan bahwa nilai tukar berdampak negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi di Pakistan dan penelitian hasil penelitian Pridayanti (2014), menunjukkan bahwa nilai tukar berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

7. Pengaruh Inflasi Terhadap Investasi Sub Sektor Perikanan

Inflasi secara singkat dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus

(Suseno dan Astiya, 2009:2). Aliran Keynesian berpendapat bahwa Inflasi merupakan suatu gejala moneter yang dipengaruhi karena adanya perubahan uang (Suseno dan Astiya, 2009). Tingginya tingkat inflasi membuat konsumsi masyarakat berkurang karena menurunnya kemampuan masyarakat untuk membeli barang dan jasa (Putong 2013: 264). Ketidakstabilan ekonomi suatu negara dapat menghambat investasi yang masuk. Artinya, Inflasi memiliki dampak negatif terhadap investasi sub sektor perikanan.

Beberapa penelitian yang melakukan penelitian tentang pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi diantaranya dilakukan dan Septifany et.al (2015 yang melakukan penelitian dengan judul ‘‘Analisis Pengaruh Inflasi, Tingkat Suku Bunga, Nilai Tukar Rupiah, dan Cadangan Devisa terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia.

8. Pengaruh Inflasi terhadap PDRB Sub Sektor Perikanan

Aliran Keynesian berpendapat bahwa Inflasi merupakan suatu gejala moneter yang dipengaruhi karena adanya perubahan uang (Suseno dan Astiya, 2009). Inflasi juga berdampak negatif terhadap PDRB sub sektor perikanan. Inflasi yang serius cenderung untuk mengurangi investasi yang produktif, mengurangi ekspor dan menaikkan impor. Kecendrungan tersesebut akan memperlambat pertumbuhan sub sektor perikanan di Indonesia (Sukirno, 2013: 15). Artinya, semakin tinggi tingkat inflasi maka, akan semakin menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Beberapa penelitian yang melakukan penelitian tentang pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi diantaranya dilakukan oleh Ahmad et.al (2013) dan Larasati et.al (2018). Ahmad et.al melakukan penelitian dengan judul “*Exchange Rate and Economic Growth in Pakistan (1975-2011)*” dan Larasati et.al melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh inflasi, ekspor, dan tenaga kerja terhadap Produk Domestik Bruto”. Hasil penelitian Ahmad et.al (2013) menunjukkan bahwa inflasi berdampak negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pakistan dan hasil penelitian Larasati et.al (2018), menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh terhadap PDB negara Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand.

9. Pengaruh Investasi Terhadap PDRB Sub Sektor Perikanan

Investasi merupakan salah satu komponen pembentuk PDB (Mankiw et.al, 2014: 9). Menurut Sugiarto (2015), investasi memiliki korelasi positif dengan PDB. Secara umum dikatakan jika investasi naik, maka PDB cenderung naik, begitu sebaliknya jika investasi turun maka PDB juga mengalami penurunan. Berdasarkan hal tersebut, diasumsikan bahwa perubahan tingkat investasi pada sub sektor perikanan diikuti juga dengan perubahan tingkat PDRB sub sektor perikanan.

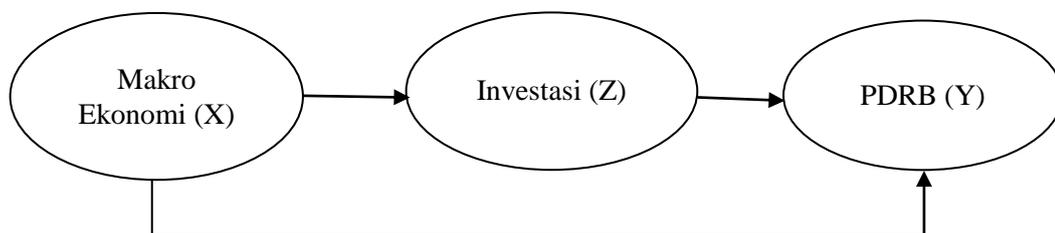
Beberapa penelitian yang melakukan penelitian tentang pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi diantaranya dilakukan Ahmad et.al (2013), Mahdi (2014) dan Lumbantobing (2017). Ahmad et.al (2013), melakukan penelitian dengan judul “*Exchange Rate and Economic Growth in Pakistan (1975-2011)*”. Mahdi (2014) melakukan penelitian dengan judul

‘Elastisitas investasi dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan PDB Sektor Pertanian di Indonesia’” dan Lumbantobing (2017) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh investasi dalam negeri, luar negeri, dan pengeluaran pemerintah terhadap PDRB DKI Jakarta”

Hasil penelitian Ahmad et.al (2013), menunjukkan bahwa *Foreign Direct Investment* memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pakistan. Hasil penelitian Mahdi (2014), menunjukkan bahwa investasi dalam dan luar negeri berpengaruh terhadap PDB sektor pertanian. Hasil penelitian Lumbantobing (2017), menunjukkan bahwa investasi dalam dan luar negeri tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB DKI Jakarta, hal tersebut di duga masih kurangnya optimalnya investasi pada provinsi DKI Jakarta.

D. Model Konsep

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditentukan model konsep tentang variabel makroekonomi, variabel PDRB, dan variabel investasi sebagai variabel *intervening*. Konsep penelitian merupakan kerangka acuan peneliti dalam mendesain instrument penelitian (Bungin, 2008: 67). Konsep dibangun dari teori-teori yang digunakan untuk menjelaskan variabel-variabel yang akan diteliti. Model konsep penelitian ini menggambarkan bahwa makroekonomi mempengaruhi investasi dan mempengaruhi PDRB sub sektor perikanan. Pengaruh konsep tersebut dipaparkan dalam gambar dibawah ini:

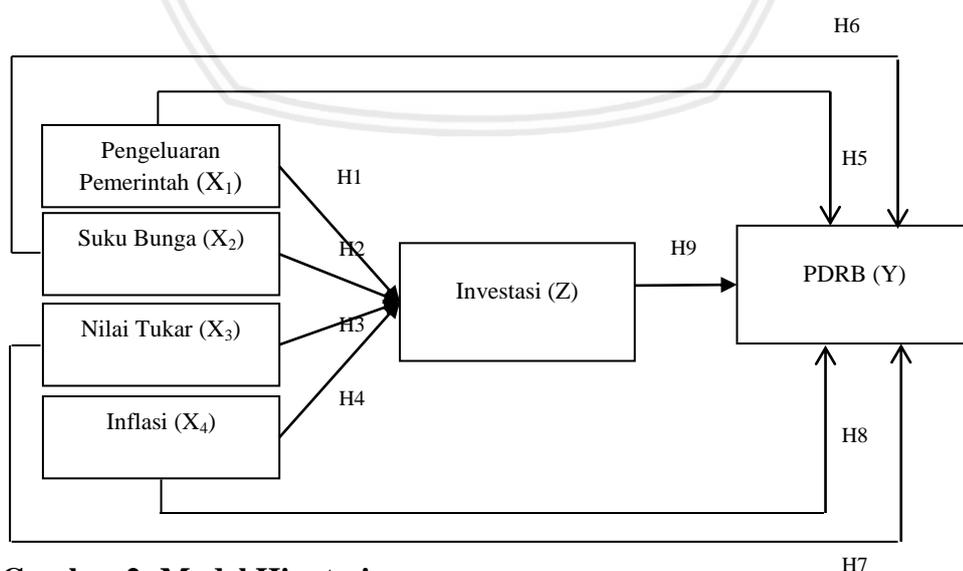


Gambar 1: Model Konsep

Sumber: diolah peneliti, 2019

E. Model Hipotesis

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji (Martono, 2016: 67). Menurut Bungin (2008: 85), “dengan hipotesis, penelitian menjadi jelas arah pengujiannya, dengan kata lain hipotesis membimbing peneliti dalam melaksanakan penelitian”. Dari model konsep yang telah ditulis di atas, maka dapat untuk menentukan model hipotesis pada penelitian ini yang dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 2: Model Hipotesis

Sumber: data diolah peneliti (2019)

Berdasarkan model hipotesis tersebut, maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁ : Pengeluaran Pemerintah (X₁) berpengaruh terhadap Investasi sub sektor perikanan di Indonesia (Z)

H₂ : Suku Bunga (X₂) berpengaruh terhadap Investasi sub sektor perikanan di Indonesia (Z)

H₃ : Nilai tukar (X₃) berpengaruh secara parsial terhadap Investasi sub sektor perikanan di Indonesia (Z)

H₄ : Inflasi (X₃) berpengaruh terhadap Investasi sub sektor perikanan di Indonesia(Z)

H₅ : Pengeluaran Pemerintah (X₁) berpengaruh terhadap PDRB sub sektor perikanan di Indonesia (Y)

H₆ : Suku Bunga (X₂) berpengaruh terhadap PDRB sub sektor perikanan di Indonesia (Y)

H₇ : Nilai tukar (X₃) berpengaruh terhadap PDRB sub sektor perikanan di Indonesia(Y)

H₈ : Inflasi (X₄) berpengaruh terhadap PDRB sub sektor perikanan di Indonesia (Y)

H₉ : Investasi sub sektor perikanan (Z) berpengaruh terhadap PDRB sub sektor perikanan di Indonesia(Y)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *explanatory* dengan pendekatan kuantitatif. *Explanatory* atau penelitian eksplanatif adalah penelitian yang bermaksud “untuk menjelaskan suatu generalisasi sampel terhadap populasinya atau menjelaskan hubungan, perbedaan, pengaruh, satu variabel dengan variabel yang lain” (Bungin, 2014: 46). Jenis penelitian ini dipilih karena peneliti ingin menjelaskan berbagai pengaruh yang timbul dari variabel-variabel yang menjadi objek penelitian, yaitu antara variabel makroekonomi dengan variabel PDRB, dan variabel investasi sebagai variabel *intervening* pada sub sektor perikanan di Indonesia.

Metode kuantitatif digunakan karena metode ini menekankan pada eksperimentasi, deksripsi, survei, dan menentukan korelasi antar variabel yang menjadi objek penelitian. Menurut Bungin (2008:36), Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul yang menjadi objek penelitian berdasarkan apa yang terjadi. Peneliti ingin mengetahui pengaruh antar variabel makroekonomi dengan PDRB dan investasi sub sektor perikanan di Indonesia.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana unit analisis penelitian berada (Noor, 2015: 31). Lokasi penelitian ini dilakukan di Indonesia yaitu pada Provinsi yang menjadi sampel pada penelitian melalui *website* resmi Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id), Kementerian keuangan (www.kemenkeu.go.id), Kementerian perdagangan (www.kemendag.go.id), dan Bank Indonesia (www.bi.go.id). Lokasi penelitian dipilih dengan pertimbangan bahwa *website* tersebut yang memiliki data lengkap mengenai pengeluaran pemerintah, suku bunga, nilai tukar, inflasi, investasi dan PDRB sub sektor perikanan yang dikategorikan berdasarkan data tahunan.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Priadana (2009:103), populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau gejala sesuatu yang memiliki karakteristik tertentu. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh provinsi yang menjual hasil produksi perikanan laut di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) pada tahun 2012-2017. Berikut Populasi pada penelitian ini:

Tabel 5: Populasi Penelitian

No.	Provinsi	Produksi Perikanan Laut Yang Dijual Di TPI (Ton)						Rata-Rata
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	JATENG	210495	178259	193939.1	214505.3	221842.8	195968	27995.42
2	JATIM	40506	60953	93498.9	71696.8	59520.2	156599.7	22371.38
3	JABAR	40412	85996	78975.5	52361.5	46470.2	44613.42	6373.346
4	ACEH	12747	9438	117171.2	45190.9	21479.5	43305.88	6186.554
5	DKI JAKARTA A	21203	23846	26601.1	24035.1	104956.9	31228.34	4461.191

Lanjutan tabel 5 Populasi Penelitian

No.	Provinsi	Produksi Perikanan Laut Yang Dijual Di TPI (Ton)						Rata-Rata
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
6	SULSEL	8549	14568	23483.2	29684.7	20601.5	45546.4	6506.629
7	SULUT	3270	814	11848.2	9595	15306.1	51908.9	7415.557
8	KALTIM	8756	6216	4612.5	12433.4	18694.2	14336.18	2048.026
9	SUMUT	8662	7305	7221	3965.3	4571.7	15436.76	2205.251
10	BALI	2799	4506	11058.3	11153.2	8664.5	8451.25	1207.321
11	MALUT	3272	6470	7173.2	7778.2	-	11291.03	1613.004
12	KEP. BABEL	8462	16970	1438.7	1242.4	2936.6	4755.81	679.4014
13	BANTEN	4624	4071	7525.5	5401.3	5758.4	6474.66	924.9514
14	SULTEN G	5088	5172	4030.9	4161.8	5920.4	6678.31	954.0443
15	NTB	5302	5637	5689	6122.6	3530.5	3185.07	455.01
16	GORONT ALO	3567	5348	4466.7	4383.4	3188.8	3219.02	459.86
17	SULTEN G	2152	2314	3341.3	3455.3	4149.5	3409.3	487.0429
18	KALBAR	1836	1020	4125.8	4159.2	3838.1	2932.12	418.8743
19	BENGKU LU	2215	3929	3120	2615.4	2565.4	3441.58	491.6543
20	LAMPUN G	1193	2978	2816.6	4105.9	1159.2	1533.14	219.02
21	DI YOGYAK ARTA	1465	1397	2769.6	2339.5	1700	3088.7	441.2429
22	PAPUA	60	134	134.4	10667.2	-	-	1570.8
23	NTT	5739	3827	0	-	-	-	1366.571
24	SUMBAR	3074	1414	1775.6	1709.7	666.9	281.9	1274.586
25	KALSEL	8880	-	-	-	-	-	1268.571
26	LAINNY A	-	-	-	-	8774.5	-	1253.5
27	KALTEN G	-	-	4282.8	2948.9	-	6.36	1034.009
28	PABAR	5346	-	-	-	-	-	763.7143
29	RIAU	495	-	-	-	-	-	70.71429
30	MALUKU	264	-	-	-	-	-	37.71429
31	JAMBI	-	-	-	-	-	-	0
32	SUMSEL	-	-	-	-	-	-	0
33	KEP. RIAU	-	-	-	-	-	-	0
34	KALUT	-	-	-	-	-	-	0
35	SULBAR	-	-	-	-	-	-	0

Sumber: Badan Pusat Statistik, data diolah peneliti 2019

Tabel 5 merupakan daftar Provinsi yang menjual hasil perikanan laut di TPI setelah di urutkan berdasarkan rata-rata tertinggi. Terdapat 35 Provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia yang menjadi populasi pada penelitian ini.

Berdasarkan tabel tersebut juga dapat terlihat bahwa Provinsi Jawa Tengah (Jateng) merupakan Provinsi tertinggi yang menjual hasil produksi laut di TPI dengan rata-rata sebesar 27995.42 ton per tahun dan Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi Provinsi terendah dengan rata-rata 0 ton per tahunnya.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2014:116). Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan teknik sampling kuota. Menurut Sugiyono (2015:85), menyatakan bahwa “Sampling kuota adalah teknik menentukan sampel dan populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan”.

Penelitian ini mengambil kuota 10 provinsi dengan kriteria produksi rata-rata ikan terbanyak yang di jual di Tempat Pelelangan Ikan selama kurun waktu 2012-2017. Berdasarkan tabel 4 dapat terlihat bahwa sepuluh Provinsi tertinggi adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Aceh, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, dan Bali. Provinsi tersebut telah menggambarkan lebih 50% dari rata-rata total populasi yang di ambil, yaitu sebesar 89,81% , sehingga peneliti mengambil 10 Provinsi yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

D. Variabel dan Pengukurannya

Variabel dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu variabel bebas (*independent*), variabel terikat (*dependent*), dan variabel Intervening.

1. Variabel Bebas / *Independent* (X)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat (Zulganef, 2013: 66). Dalam pengaruhnya terhadap variabel terikat, variabel bebas memiliki dua pengaruh yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positif diartikan bahwa nilai dari variabel bebas sejalan naik turunnya dengan variabel terikat. Pengaruh negatif dapat diartikan bahwa nilai dari variabel bebas naik turunnya berbanding terbalik dengan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah :

X1 = Pengeluaran Pemerintah

X2 = Suku Bunga

X3 = Nilai Tukar

X4 = Inflasi

2. Variabel Terikat / *Dependent* (Y)

Menurut Zulganef (2013 :65), “variabel terikat adalah variabel yang nilai – nilainya tergantung oleh nilai-nilai variabel lain atau variabel yang tergantung (*depend on*) kepada variabel lain”. Dipengaruhi sifat terikatnya maka variabel terikat ini nilainya naik turun tergantung naik turunnya variabel lainnya. Penelitian ini yang berperan sebagai variabel terikat (*dependent*) adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sub sektor perikanan.

3. Variabel Mediator/*Intervening* (Z)

Variabel intervening menurut Sugiyono (2014:60), “adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat atau memperlemah) hubungan antara variabel

Independen dan dependen”. Menurut Baron dan Kenny di dalam buku Aplikasi Analisis Multivariete, Ghozali (2016:235), “suatu variabel disebut mediator jika variabel tersebut ikut mempengaruhi hubungan antara variabel prediktor (independen) dan variabel kriteria (dependen). Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel mediator berada di antara variabel dependen dan independen. Variabel intervening dalam penelitian ini adalah investasi pada sub sektor perikanan.

Tabel 6: Operasional Variabel

No	Konsep	Variabel	Definisi Operasional	Satuan	Sumber
1.	Makro ekonomi (X)	Pengeluaran Pemerintah	Pengeluaran pemerintah adalah pembelian pemerintah ke atas barang/jasa untuk kepentingan masyarakat.	Rupiah	Kementerian Keuangan
		Suku Bunga	Suku bunga adalah pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman, dalam bentuk persentase dari pinjaman yang diperoleh dari jumlah bunga yang diterima tiap tahun dibagi dengan jumlah pinjaman.	%	Bank Indonesia
		Nilai tukar Rupiah terhadap USD	Nilai tukar atau kurs (<i>exchange rate</i>) adalah jumlah uang domestik yang dibutuhkan, yaitu banyaknya rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing	Rupiah	Kementerian Perdagangan
		Inflasi	Inflasi merupakan suatu kecenderungan meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus	%	Bank Indonesia

Lanjutan tabel 6 Populasi Penelitian

No	Konsep	Variabel	Definisi Operasional	Satuan	Sumber
2.	PDRB (Y)	PDRB sub sektor perikanan	PDRB adalah kegiatan produksi yang dilakukan oleh semua produsen perikanan yang terjadi di suatu wilayah domestik atau daerah tanpa memperhatikan apakah transaksi dilakukan oleh masyarakat daerah tersebut atau masyarakat lain.	Rupiah	Badan Pusat Statistik masing-masing Provinsi
3.	Investasi (Z)	Investasi pada sub sektor perikanan	Investasi dapat didefinisikan sebagai tambahan bersih terhadap modal saham yang ada.	Rupiah	Badan Pusat Statistik

Sumber: Data diolah peneliti, 2019

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Kuncoro (2009:148), data sekunder adalah “Data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data”. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, karena menggunakan data yang telah ada di *website* Badan Pusat Statistik, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan dan Bank Indonesia.

Data yang diperoleh dari *website* Badan Pusat Statistik adalah PDRB masing-masing Provinsi pada penelitian ini dan investasi. Data yang diperoleh dari *website* kementerian keuangan adalah data pengeluaran pemerintah. Data yang diperoleh dari *website* kementerian perdagangan adalah data nilai tukar. Data yang diperoleh dari *website* Bank Indonesia adalah data suku bunga dan investasi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Penggunaan teknik dokumentasi dilakukan karena penelitian ini menggunakan data sekunder. “Metode dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian” (Martono, 2016: 87). Penelitian ini mengumpulkan informasi dari *website* resmi Badan Pusat Statistik, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mengolah data menjadi informasi. Kegiatan dalam analisis data bertujuan untuk menjawab masalah dan menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2014:147). Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, dan minimum. Statistik deskriptif adalah “statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.” (Sugiyono, 2014:147). Penelitian ini akan mendeskripsikan pengaruh makroekonomi terhadap PDRB sub sektor perikanan dengan investasi.

2. Uji Asumsi Klasik

Penggunaan model analisis regresi berganda terikat dengan sejumlah asumsi dan harus memenuhi asumsi-asumsi klasik yang mendasari model tersebut. Pengujian asumsi klasik harus dipenuhi agar persamaan regresi dapat digunakan dengan baik. Uji asumsi klasik terdiri dari:

a. Uji Multikolinieritas

Ghozali (2012:103), uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan VIF (*variance inflation factor*). Dengan syarat:

- 1) Jika nilai toleransi $\leq 0,10$ atau $VIF \geq 10$ terjadi multikolinieritas
- 2) Jika nilai toleransi $> 0,10$ atau $VIF < 10$ tidak terjadi multikolinieritas

b. Uji Autokorelasi

Ghozali (2012:107), uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Autokorelasi dapat di deteksi dengan menggunakan uji Durbin-Watson.

Berikut adalah hipotesis pada pengujian Durbin Watson:

- 1) H_0 = tidak ada autokorelasi ($r = 0$)
- 2) H_1 = ada autokorelasi ($r \neq 0$)

Dasar keputusan pada uji Durbin Watson ialah:

- 1) Jika $0 < d < d_L$ atau $4 - d_L < d < 4$, maka H_0 ditolak yang berarti terdapat autokorelasi.
- 2) Jika $d_u < d < (4 - d_u)$, maka H_0 diterima yang berarti tidak terdapat autokorelasi.
- 3) Jika $d_L \leq d \leq d_u$ atau $4 - d_u \leq d \leq 4 - d_L$, maka tidak terdapat keputusan yang pasti tentang ada tidaknya autokorelasi (*No decision*).

c. Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2012:134), uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Cara mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan melihat pola pada grafik *scatterplot*. Dasar analisis yang dilakukan ialah:

- 1) Jika ada pola tertentu yang teratur maka hal ini mengindikasikan terjadinya heteroskedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola tertentu, dimana titik-titik tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2012:154), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik harus mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Peneliti menggunakan analisis grafik untuk melihat normalitas residual. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat pola

penyebaran data pada grafik normal P-Plot berupa titik pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusan dengan metode analisis grafik ialah:

- 1) Jika data tersebar menjauhi garis diagonal serta mengikuti arah garis maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data tersebar menjauhi garis diagonal serta tidak mengikuti arah garis maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

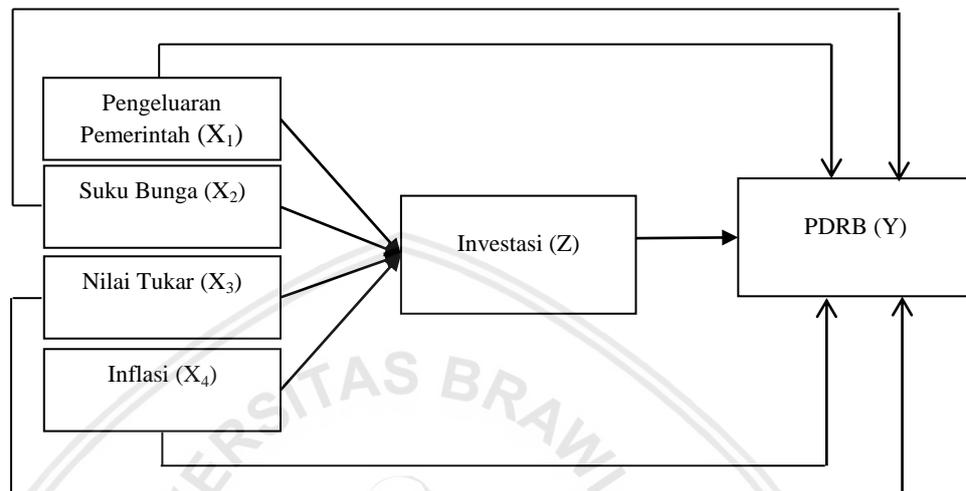
3. Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Menurut Ghozali (2016: 237), metode yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel *intervening* adalah dengan analisis jalur (*path analysis*). Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda, atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas (sebab-akibat) antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori. Menurut Ridwan dan Kuncoro pada buku SPSS vs LISREL (Sajono dan Julianita, 2013:117), *path analysis* bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah variabel makroekonomi, variabel yang menjadi variabel *intervening* dalam penelitian ini adalah variabel investasi, dan variabel terikat pada penelitian ini adalah variabel PDRB sub sektor perikanan.

4. Model Desain Analisa Jalur

Menurut Pardede dan Manurung (2014:19), “model jalur adalah suatu diagram yang menghubungkan antara variabel bebas, perantara dan tergantung”.

Pola hubungan ditunjukkan dengan anak panah. Berikut adalah gambar model analisa jalur:



Gambar 3: Model Desain Analisa Jalur

Sumber: Data diolah peneliti, 2019

5. Pengujian Hipotesis

a. Uji Parsial (t test)

Uji parsial (*t test*) digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen (X) secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Y) (Ghazali, 2016 :97). Uji parsial menggunakan beberapa dasar analisis untuk menentukan pengaruh dan hubungan variabel dalam penelitian. Dasar pengambilan uji parsial (*t test*) adalah dengan menggunakan taraf signifikan, yaitu:

H_0 diterima: Jika taraf signifikansi $> 0,05$ maka, hal ini menandakan bahwa secara parsial tidak terdapat pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.

Ha diterima : Jika taraf signifikansi $< 0,05$ maka, hal ini menandakan bahwa secara parsial terdapat pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen.

Pada penelitian ini selain menggunakan cara di atas, uji parsial juga dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t menurut tabel. Dasar pengambilan keputusan yang digunakan adalah apabila t hitung lebih tinggi dibandingkan dengan nilai t pada tabel maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.

b. Koefisien Determinan (R^2)

Ghozali (2012:95), Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur kemampuan model menerangkan variasi variabel dependen. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengujian ini:

- 1) Nilai R^2 harus berkisar $0 - 1$
- 2) Apabila $R^2 = 0$, maka tidak ada hubungan sama sekali antara variabel independen dengan variabel dependen.
- 3) Apabila $R^2 = 1$, maka terjadi kecocokan sempurna dari variabel independen yang menjelaskan variabel dependen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Jawa Tengah

Jawa tengah merupakan sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian tengah pulau Jawa, dengan ibukota adalah Semarang. Luas wilayah Jawa Tengah adalah 32.548 km², atau sekitar 28,94% dari luas pulau Jawa. Provinsi Jawa Tengah juga meliputi pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa. Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota. Administrasi pemerintahan kabupaten dan kota ini terdiri atas 545 kecamatan dan 8.490 desa/kelurahan.

a. Visi dan Misi

Visi : Jawa Tengah Berdikari dan Semakin Sejahtera

Misi:

- 1) Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religious, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 2) Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota

- 3) Mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan memperkuat basis ekonomi rakyat dan membuka ruang usaha baru
- 4) Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

Sumber: Portal Resmi Provinsi Jawa Tengah, 2019

2. Jawa Timur

Jawa timur adalah sebuah provinsi di bagian timur pulau jawa Indonesia. Ibukota Jawa Timur adalah Surabaya yang terletak antara 110.57 BT dan Garis Lintang 5,37” LS dan 8,48 ‘LS. Luas wilayah Jawa Timur adalah 47.922 km², dan jumlah penduduknya 37.070.731 jiwa (tahun 2005). Secara umum Jawa timur dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu Jawa Timur daratan dengan proporsi lebih luas hampir mencakup 90% dari seluruh luas wilayah Propinsi Jawa Timur dan wilayah Kepulauan Madura yang hanya sekitar 10 % saja.

Jawa Timur memiliki wilayah terluas di antara 6 provinsi di Pulau Jawa, dan memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat. Jawa Timur mempunyai 229 pulau terdiri dari 162 pulau bernama dan 67 pulau tak bernama, dengan panjang pantai sekitar 2.833,85 Km. Secara administratif Jawa Timur terbagi menjadi 29 kabupaten dan 9 kota, dengan Kota Surabaya sebagai ibukota provinsi. Ini menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia.

a. Visi dan Misi

Visi : Jawa Timur lebih sejahtera, berkeadilan, mandiri, berdaya saing, dan berakhlak

Misi:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan
- 2) Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi.
- 3) Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang
- 4) Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.
- 5) Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.

Sumber: Jatimprov.go.id, 2019

3. Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat memiliki luas Provinsi seluas 35.377,76 Km². Menurut data SIAK Provinsi Jawa Barat didiami penduduk sebanyak 46.497.175 jiwa. Secara administratif sejak tahun 2008, kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat berjumlah 26 kabupaten/kota terdiri atas 17 kabupaten dan 9 kota dengan 625 kecamatan dan 5.877 desa/kelurahan.

a. Visi dan Misi

Visi: Terwujudnya Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi.

Misi:

- 1) Membentuk manusia pancasila yang bertaqwa; melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban, dengan sasaran misi yaitu pesantren juara, masjid juara, dan ulama juara;
- 2) Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif, dengan sasaran misi yaitu kesehatan juara, perempuan juara, olahraga juara, budaya juara, sekolah juara, guru juara, ibu juara, millennial juara, perguruan tinggi juara, dan smk juara;
- 3) Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah, dengan sasaran misi yaitu transportasi juara, logistik juara, gerbang desa juara, kota juara, pantura juara, pansela juara, dan energi juara;
- 4) Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan, dengan sasaran misi yaitu nelayan juara, pariwisata juara, lingkungan juara, kelola sampah juara, tanggap bencana juara, ekonomi kreatif juara, buruh juara, industri juara, pasar juara, petani juara, umat juara, umkm juara, dan wirausaha juara; serta

- 5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dengan sasaran misi yaitu birokrasi juara, APBD juara, SN juara, dan BUMD juara.

Sumber: jabarprov.go.id, 2019

4. Aceh

Daerah Aceh yang terletak di bagian paling barat gugusan kepulauan Nusantara, menduduki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perniagaan dan kebudayaan yang menghubungkan Timur dan Barat sejak berabad-abad lampau. Luas Provinsi Aceh 5.677.081 ha, dengan hutan sebagai lahan terluas yang mencapai 2.270.080 ha, diikuti lahan perkebunan rakyat seluas 700.350 ha, sedangkan lahan industri mempunyai luas terkecil yaitu 2.096 ha. Provinsi Aceh terletak antara 01 derajat 58' 37,2" – 06 derajat 04' 33,6" Lintang Utara dan 94 derajat 57' 57,6" – 98 derajat 17' 13,2" Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Pada tahun 2013 Provinsi Aceh terdiri atas 18 Kabupaten dan 5 kota, 289 kecamatan, 779 mukim dan 6.474 gampong atau desa.

a. Visi dan Misi

Visi : Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani

Misi :

- 1) Reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan;
- 2) Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain;
- 3) Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian sebagai tindak lanjut prinsip-prinsip MoU Helsinki;
- 4) Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional melalui peningkatan mutu pendidikan secara merata, baik pada pendidikan vokasional, dayah dan pendidikan umum;
- 5) Memastikan semua rakyat Aceh mendapatkan akses layanan kesehatan secara mudah, berkualitas dan terintegrasi;
- 6) Menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan produktifitas dan nilai tambah hasil pertanian dan kelautan;
- 7) Menyediakan sumber energy yang bersih dan terbarukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat dan industri, sebagai komitmen Aceh dalam pembangunan rendah emisi;

- 8) Membangun dan melindungi sentra-sentra produksi dan industri jasa kreatif yang menghasilkan produk kompetitif untuk memperluas lapangan kerja serta memberikan kemudahan akses permodalan;
- 9) Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

Sumber: acehprov.go.id, 2019

5. DKI Jakarta

Ibukota Provinsi DKI Jakarta adalah Jakarta, berdasarkan Permendagri Nomor 39 Tahun 2015 provinsi DKI Jakarta memiliki luas wilayah 664,01 Km² dengan jumlah penduduk sebanyak 9.988.495 jiwa. Secara administratif provinsi DKI Jakarta terbagi atas 1 kabupaten, 5 kota, 44 kecamatan dan 267 kelurahan.

a. Visi dan Misi

Visi: Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua.

Misi:

- 1) Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.
- 2) Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan

kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.

- 3) Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.
- 4) Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.
- 5) Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

Sumber: ppid.jakarta.go.id, 2019

6. Sulawesi Selatan

Sulawesi Selatan (disingkat Sulsel) adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Sulawesi. Ibu kotanya adalah Makassar. Provinsi ini berbatasan dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat di utara, Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara di timur, Selat Makassar di barat dan Laut Flores di selatan.

a. Visi dan Misi

Visi: Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter

Misi:

- 1) Pemerintah yang berorientasi melayani, inovatif, dan berkarakter;
- 2) Peningkatan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel;

- 3) Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif;
- 4) Pembangunan manusia yang kompetitif dan inklusif;
- 5) Peningkatan produktivitas dan daya saing produk Sumber Daya Alam yang berkelanjutan;

Sumber: sulselprov.go.id, 2019

7. Sulawesi Utara

Sebuah daerah yang terletak di paling utara pulau Sulawesi. Sulawesi Utara merupakan sebuah provinsi yang beribukota Manado. Provinsi Sulawesi Utara mempunyai 15 Kabupaten kota. Berdasarkan data hasil sensus penduduk pada tahun 2010, jumlah penduduk yang berada di Provinsi Sulawesi Utara berjumlah 2.270.059 jiwa dengan perincian 1.159.903 laki-laki dan 1.110.693 berjenis kelamin perempuan.

a. Visi dan Misi

Visi: "Terwujudnya Sulawesi Utara Berdikari dlm Ekonomi, Berdaulat dlm Pemerintahan dan Politik, serta Berkepribadian dlm Budaya."

Misi:

- 1) Mewujudkan kemandirian ekonomi dgn memperkuat sektor pertanian dan sumberdaya kemaritiman sbg penjabaran provinsi kepulauan, serta mendorong sektor industri dan jasa.
- 2) Memantapkan pembangunan sumber daya manusia yg berkepribadian dan berdaya saing.

- 3) Mewujudkan Sulut sbg destinasi investasi dan pariwisata yg berdaya saing.
- 4) Mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yg tinggi maju dan mandiri.
- 5) Memantapkan pembangunan infrastruktur berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- 6) Mewujudkan Sulut sbg pintu gerbang Indonesia di kawasan timur.
- 7) Mewujudkan Sulut yg berkepribadian melalui tata kelola pemerintahan yg baik.

Sumber: sulutprov.go.id, 2019

8. Kalimantan Timur

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu Provinsi terluas kedua setelah Papua, memiliki potensi sumberdaya alam melimpah dimana sebagian besar potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Sumberdaya alam dan hasil-hasilnya sebagian besar diekspor keluar negeri, sehingga Provinsi ini merupakan penghasil devisa utama bagi negara, khususnya dari sektor Pertambangan, Kehutanan dan hasil lainnya.

Kalimantan Timur memiliki luas wilayah daratan 127.267,52 km² dan luas pengelolaan laut 25.656 km² terletak antara 113°44' Bujur Timur dan 119°00' Bujur Timur serta diantara 2°33' Lintang Utara dan 2°25' Lintang Selatan. Penduduk Kalimantan Timur tahun 2003 berjumlah 2.311.162 jiwa, tahun 2010 berdasarkan hasil sensus penduduk mencapai 3.047.500 jiwa.

a. Visi dan Misi

Visi: Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat.

Misi:

- 1) Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas.
- 2) Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan.
- 3) Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan.
- 4) Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.
- 5) Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Professional dan Berorientasi Pelayanan Publik.

Sumber: kaltimprov.go.id, 2019

9. Sumatera Utara

Sumatera Utara beribukota Medan, Terletak antara 10 - 40 LU, 980 - 1000 B.T. Batas wilayahnya sebelah utara provinsi Aceh dan Selat Sumatera, sebelah barat berbatasan dengan provinsi Sumatera Barat dan Riau, sedangkan sebelah Timur di batasi oleh Selat Sumatera.

a. Visi dan Misi

Visi: Sumatera utara yang maju, aman, dan bermartabat'

Misi:

- 1) Mewujudkan masyarakat Sumatera utara yang bertabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, ramah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.
- 2) Mewujudkan masyarakat Sumatera utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.
- 3) Mewujudkan masyarakat Sumatera utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri
- 4) Mewujudkan masyarakat Sumatera utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, protitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia tenggara dan dunia.
- 5) Mewujudkan masyarakat Sumatera utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, dan berperikemanusiaan, dan beradab.

Sumber: www.sumutprov.go.id, 2019

10. Bali

Ibu kota provinsi Bali adalah Denpasar. Bali juga merupakan salah satu pulau di Kepulauan Nusa Tenggara. Secara geografis, Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Mayoritas penduduk Bali adalah pemeluk agama Hindu. Di dunia, Bali terkenal sebagai tujuan pariwisata dengan keunikan berbagai hasil seni-budayanya, khususnya bagi para wisatawan Jepang dan Australia. Bali juga dikenal dengan julukan *Pulau Dewata* dan *Pulau Seribu Pura*.

a. Visi dan Misi

Visi: NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI"

Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru.

Misi:

- 1) Memastikan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam jumlah dan kualitas yang memadai bagi kehidupan Krama Bali.
- 2) Mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani.
- 3) Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang terjangkau, merata, adil dan berkualitas serta didukung dengan pengembangan sistem dan data base riwayat kesehatan Krama Bali berbasis kecamatan.

- 4) Memastikan tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas serta melaksanakan wajib belajar 12 tahun.
- 5) Mengembangkan sistem pendidikan dasar dan pendidikan menengah berbasis keagamaan Hindu dalam bentuk Pasraman di Desa Pakraman/Desa Adat.
- 6) Mengembangkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi yaitu berkualitas dan berintegritas: bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Krama Bali.
- 7) Mengembangkan sistem jaminan sosial secara komprehensif dan terintegrasi bagi kehidupan Krama Bali sejak mulai kelahiran, tumbuh dan berkembang sampai akhir masa kehidupannya.
- 8) Menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing tinggi serta memperluas akses kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri.
- 9) Mengembangkan sistem jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang komprehensif, mudah dijangkau, bermutu, dan terintegrasi bagi Krama Bali yang bekerja di dalam dan di luar negeri.
- 10) Memajukan kebudayaan Bali melalui peningkatan perlindungan, pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni, dan budaya Krama Bali.

- 11) Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali secara sakala dan niskala berdasarkan nilai-nilai filsafat Sad Kertih yaitu Atma Kertih, Danu Kertih, Wana Kertih, Segara Kertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih.
- 12) Memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi Desa Pakraman/ Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan krama Bali yang meliputi Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan.
- 13) Mengembangkan destinasi dan produk pariwisata baru berbasis budaya dan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi antar kabupaten/kota se-Bali.
- 14) Meningkatkan promosi pariwisata Bali di dalam dan di luar negeri secara bersinergi antar kabupaten/kota se-Bali dengan mengembangkan inovasi dan kreatifitas baru.
- 15) Meningkatkan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif.
- 16) Membangun dan mengembangkan pusat-pusat perekonomian baru sesuai dengan potensi kabupaten/kota di Bali dengan memberdayakan sumber daya lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dalam arti luas.
- 17) Membangun dan mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis budaya (branding Bali) untuk memperkuat perekonomian Krama Bali.

- 18) Meningkatkan pembangunan infrastruktur (darat, laut dan udara) secara terintegrasi serta konektivitas antar wilayah untuk mendukung pembangunan perekonomian serta akses dan mutu pelayanan publik di Bali.
- 19) Mengembangkan sistem keamanan terpadu yang ditopang dengan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang memadai untuk menjaga keamanan daerah dan Krama Bali serta keamanan para wisatawan.
- 20) Mewujudkan kehidupan Krama Bali yang demokratis dan berkeadilan dengan memperkuat budaya hukum, budaya politik dan kesetaraan gender dengan memperhatikan nilai-nilai budaya Bali.
- 21) Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali, menata wilayah, dan lingkungan yang, hijau, indah, dan bersih.
- 22) Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah.

Sumber: warmadewa.ac.id, 2019

B. Penyajian Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Kuncoro (2009:148), data sekunder adalah “Data yang telah dikumpulkan oleh

lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Penelitian ini menggunakan data sekunder, karena peneliti memperoleh data pengeluaran pemerintah melalui *website* resmi Kementerian Keuangan www.kemenkeu.go.id. Data suku bunga, dan inflasi peneliti peroleh dari *website* resmi Bank Indonesia www.bi.go.id. Data nilai tukar peneliti peroleh dari *website* resmi Kementerian Perdagangan www.kemendag.go.id. Data investasi dan PDRB pada sub sektor perikanan peneliti ambil melalui *website* resmi Badan Pusat Statistik (BPS) www.bps.go.id.

Pengambilan sampel menggunakan sampling kuota dengan jumlah kuota 10 dan dengan kriteria produksi rata-rata ikan terbanyak yang di jual di Tempat Pelelangan Ikan selama kurun waktu 2012-2017. Pengamatan dilakukan dengan data tahunan selama enam tahun dengan 10 sampel, maka diperoleh sampel 60 data pengamatan. Penyajian data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengeluaran Pemerintah

Tabel 7: Pengeluaran Pemerintah untuk Kementerian Perikanan tahun 2012-2017

Tahun	Pengeluaran Pemerintah
2012	Rp 6.014.100.000.000
2013	Rp 6.979.500.000.000
2014	Rp 5.748.700.000.000
2015	Rp 10.597.800.000.000
2016	Rp 10.567.500.000.000
2017	Rp 9.138.300.000.000

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Tabel 7 menunjukkan pengeluaran pemerintah pada tahun 2012-2017 melalui data Anggaran Pendapatan Belanja Negara – Perubahan (APBN-P)

Kementrian kelautan dan perikanan. Data menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk sub sektor perikanan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pengeluaran pemerintah untuk sub sektor perikanan tertinggi pada tahun 2015 sebesar Rp 10.597.800.000.000 dan terendah pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp 5.748.700.000.000.

2. Suku Bunga

Tabel 8: Suku Bunga Indonesia tahun 2012-2017

Tahun	Tingkat Suku Bunga (%)
2012	5.77
2013	6.47
2014	7.54
2015	7.52
2016	6
2017	4.56

Sumber: www.bi.go.id

Tabel 8 menunjukkan rata-rata tingkat suku bunga per tahun pada tahun 2012-2017. Data menunjukkan bahwa tingkat suku bunga tahun 2013 dan tahun 2014 selalu meningkat dari tahun sebelumnya, dan mengalami penurunan pada tahun 2015 hingga tahun 2017. Tingkat suku bunga tertinggi pada tahun 2014 yaitu sebesar 7.54 % dan terendah pada tahun 2017 yaitu sebesar 4.56%.

3. Nilai Tukar

Tabel 9 : Nilai tukar USD terhadap Rupiah tahun 2012-2017

Tahun	Nilai Tukar
2012	Rp 9.418
2013	Rp 10.562
2014	Rp 11.884
2015	Rp 13.457
2016	Rp 13.329
2017	Rp 13.398

Sumber: www.bi.go.id

Tabel 9 menunjukkan rata-rata nilai tukar USD terhadap Rupiah per tahun pada tahun 2012-2017. Data menunjukkan bahwa nilai tukar USD terhadap Rupiah rata-rata mengalami penurunan pada setiap tahunnya. Nilai tukar USD terhadap Rupiah tertinggi pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp 13.457 dan terendah pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp 9.418.

4. Inflasi

Tabel 10: Tingkat Inflasi Indonesia tahun 2012-2017

Tahun	IHK (%)
2012	4.27
2013	6.96
2014	6.41
2015	6.38
2016	3.53
2017	3.8

Sumber: Bank Indonesia, data diolah peneliti (2019)

Tabel 10 menunjukkan tingkat inflasi melalui Indeks Harga Konsumen (IHK) tahun 2012-2017. Data menunjukkan bahwa tingkat inflasi di Indonesia mengalami fluktuasi. Tingkat inflasi tertinggi pada tahun 2013 yaitu sebesar 6.96% dan terendah pada tahun 2012 yaitu 4.27%. Tingkat inflasi di Indonesia pada tahun 2012-2017 termasuk jenis inflasi rendah karena di bawah 10%.

5. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Tabel 11: PDRB sub sektor perikanan masing-masing Provinsi

Tahun	Provinsi	PDRB sub sektor perikanan (Berdasarkan harga Berlaku)
2012	Jawa Tengah	Rp 7.727.900.000.000

Lanjutan Tabel 11 PDRB Sub Sektor Perikanan

Tahun	Provinsi	PDRB sub sektor perikanan (Berdasarkan harga Berlaku)
	Jawa Timur	Rp 27.520.900.000.000
	Jawa Barat	Rp 9.681.620.000.000
	Aceh	Rp 5.189.330.000.000
	DKI Jakarta	Rp 600.550.000.000
	Sulawesi Selatan	Rp 15.018.200.000.000
	Sulawesi Utara	Rp 4.821.470.000.000
	Kalimantan Timur	Rp 5.370.460.000.000
	Bali	Rp 5.199.900.000.000
	Sumatera Utara	Rp 9.282.290.000.000
2013	Jawa Tengah	Rp 8.691.410.000.000
	Jawa Timur	Rp 32.104.100.000.000
	Jawa Barat	Rp 11.122.730.000.000
	Aceh	Rp 5.474.300.000.000
	DKI Jakarta	Rp 666.470.000.000
	Sulawesi Selatan	Rp 17.905.620.000.000
	Sulawesi Utara	Rp 5.506.640.000.000
	Kalimantan Timur	Rp 6.142.000.000.000
	Bali	Rp 5.711.940.000.000
Sumatera Utara	Rp 10.617.870.000.000	
2014	Jawa Tengah	Rp 9.582.410000.000
	Jawa Timur	Rp 37.474.100.000.000
	Jawa Barat	Rp 37.474.100.000.000
	Aceh	Rp 5.772.450.000.000
	DKI Jakarta	Rp 710.820.000.000
	Sulawesi Selatan	Rp 22.856.570.000.000
	Sulawesi Utara	Rp 6.619.120.000.000
	Kalimantan Timur	Rp 6.835.680.000.000
	Bali	Rp 6.678.160.000.000
Sumatera Utara	Rp 12.029.300.000.000	
2016	Jawa Tengah	Rp 10.519.420.000.000
	Jawa Timur	Rp 42.090.400.000.000
	Jawa Barat	Rp 14.415.450.000.000
	Aceh	Rp 6.333.470.000.000
	DKI Jakarta	Rp 768.120.000.000
	Sulawesi Selatan	Rp 27.580.490.000.000
	Sulawesi Utara	Rp 7.078.230.000.000
	Kalimantan Timur	Rp 7.568.420.000.000
	Bali	Rp 7.341.010.000.000
Sumatera Utara	Rp 13.532.630.000.000	

Lanjutan Tabel 11 PDRB Sub Sektor Perikanan

Tahun	Provinsi	PDRB sub sektor perikanan (Berdasarkan harga Berlaku)
2017	Jawa Tengah	Rp 12.240.360.000.000
	Jawa Timur	Rp 50.993.100.000.000
	Jawa Barat	Rp 17.284.710.000.000
	Aceh	Rp 7.206.520.000.000
	DKI Jakarta	Rp 871.950.000.000
	Sulawesi Selatan	Rp 34.886.880.000.000
	Sulawesi Utara	Rp 8.365.790.000.000
	Kalimantan Timur	Rp 8.624.820.000.000
	Bali	Rp 9.415.410.000.000
Sumatera Utara	Rp 16.063.870.000.000	

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 11 menunjukkan PDRB masing-masing provinsi sampel berdasarkan harga berlaku pada tahun 2012-2017. PDRB pada masing-masing provinsi ditiap tahunnya mengalami fluktuasi. Pada tabel 11 dapat terlihat PDRB tertinggi didapat pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 50.993.100.000.000 diperoleh oleh Provinsi Jawa Timur, dan PDRB terendah didapat pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp 600.550.000.000 diperoleh oleh Provinsi DKI Jakarta.

6. Investasi

Tabel 12 : Investasi pada sub sektor perikanan tahun 2012-2017

Tahun	Investasi
2012	Rp 287.822.000.000
2013	Rp 109.720.000.000
2014	Rp 441.205.200.000
2015	Rp 989.166.700.000
2016	Rp 579.745.700.000
2017	Rp 827.501.400.000

Sumber: www.bi.go.id

Tabel 12 menunjukkan jumlah realisasi investasi dalam dan luar negeri pada sub sektor perikanan tahun 2012-2017. Investasi pada sub sektor perikanan di Indonesia mengalami fluktuasi. Investasi tertinggi pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp 989.166.700.000 dan terendah pada tahun 2013 sebesar Rp109.720.000.000.

C. Analisis dan Interpretasi

Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh dari variabel bebas (independen) yaitu pengeluaran pemerintah, suku bunga, nilai tukar, dan inflasi terhadap variabel terikat (dependen) yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan variabel *intervening* yaitu investasi pada sub sektor perikanan. Analisis yang dilakukan pada penelitian ini adalah *path analysis*, dengan tujuan untuk mengetahui hubungan langsung variabel bebas dengan variabel terikat dan mengetahui hubungan tidak langsung variabel bebas dengan variabel terikat melalui variabel *intervening*. Mekanisme yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, uji asumsi klasik, *path analysis* serta melakukan pengujian hipotesis untuk kemudian dilakukan interpretasi hasil penelitian.

1. Hasil Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif adalah “statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.” (Sugiyono, 2014:147). Analisis ini dapat mempermudah pengamatan melalui perhitungan data secara garis besar karena

statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, maksimum, dan minimum.

Variabel yang dianalisis pada penelitian ini terdiri dari enam variabel yaitu pengeluaran pemerintah, suku bunga, nilai tukar, dan inflasi sebagai variabel independen, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai variabel dependen, dan investasi sebagai variabel intervening. Peneliti menggunakan aplikasi SPSS 23 untuk melakukan pengukuran deskriptif. Periode pengamatan yang berkelanjutan (*time series*) dilakukan untuk pengujian selama 6 tahun yaitu mulai tahun 2012 hingga 2017. Deskripsi data pada variabel penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 13: Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Devition
X1	60	5.748,7	10.597,8	8173,817	2038,393
X2	60	4,56	7,54	6,3100	1,046
X3	60	9.148	13.457	12.008	1572,601
X4	60	3,53	6,96	5,225	1,400
Z	60	109,72	989,17	539,1935	303,783
Y	60	600,55	50.993,10	12.817,118	11428,051

Sumber: Lampiran 1, 2019

a. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah pembelanjaan untuk barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah (Mankiw et.al., 2014: 11). Berdasarkan hasil analisis deskriptif menunjukkan nilai minimum sebesar Rp 5.748.700.000.000 dan nilai maksimum sebesar 10.597.800.000.000 dengan rata-rata Rp 8.173.800.000.000 per tahunnya dan standar deviasi sebesar 2038,393.

b. Suku Bunga

Suku bunga adalah pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman, dalam bentuk persentase dari pinjaman yang diperoleh dari jumlah bunga yang diterima tiap tahun dibagi dengan jumlah pinjaman (Hasoloan, 2014:173). Berdasarkan hasil analisis deskriptif menunjukkan nilai minimum sebesar 4,56% dan nilai maksimum sebesar 7,54% dengan rata-rata 6,31% per tahunnya dan standar deviasi sebesar 1,046.

c. Nilai tukar

Nilai tukar atau kurs (*exchange rate*) adalah jumlah uang domestik yang dibutuhkan, yaitu banyaknya rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing (Sukirno, 2013:397). Berdasarkan hasil analisis deskriptif menunjukkan nilai minimum Rp 9.148 dan nilai maksimum sebesar Rp 13.457 dengan rata-rata Rp12.008 per tahunnya dan standar deviasi sebesar 1572,601.

d. Inflasi

Inflasi merupakan suatu kecenderungan meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus (Suseno dan Astiya, 2009: 2). Berdasarkan hasil analisis deskriptif menunjukkan nilai minimum 3,53% dan nilai maksimum sebesar 6,96% dengan rata-rata 5,2250 per tahunnya dan standar deviasi sebesar 1,400.

e. Investasi

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang (Tandelilin, 2010:2). Berdasarkan hasil analisis deskriptif menunjukkan nilai minimum Rp 109.720.000.000 dan nilai maksimum sebesar Rp 989.170.000.000 dengan rata-rata Rp 539.193.500.000 per tahunnya dan standar deviasi sebesar 303,783.

f. Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Badan Pusat Statistik, PDRB adalah kegiatan produksi yang dilakukan oleh semua produsen perikanan yang terjadi di suatu wilayah domestik atau daerah tanpa memperhatikan apakah transaksi dilakukan oleh masyarakat daerah tersebut atau masyarakat lain. Berdasarkan hasil analisis deskriptif menunjukkan nilai minimum Rp 600.550.000.000 dan nilai maksimum sebesar Rp 50.993.100.000.000 dengan rata-rata Rp 12.817.110.000.000 per tahunnya dan standar deviasi sebesar 11428,051.

2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik yang dilakukan pada penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Hasil dari pengujian asumsi klasik adalah sebagai berikut:

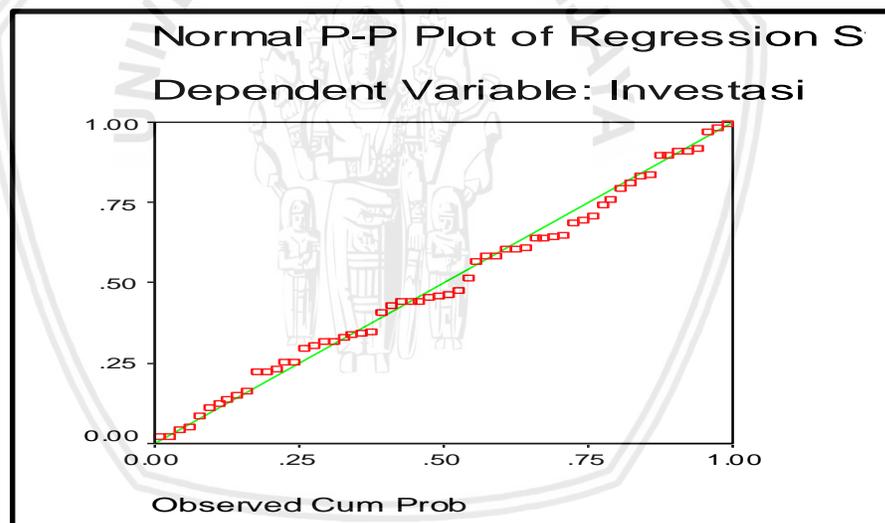
a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2012:154), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki

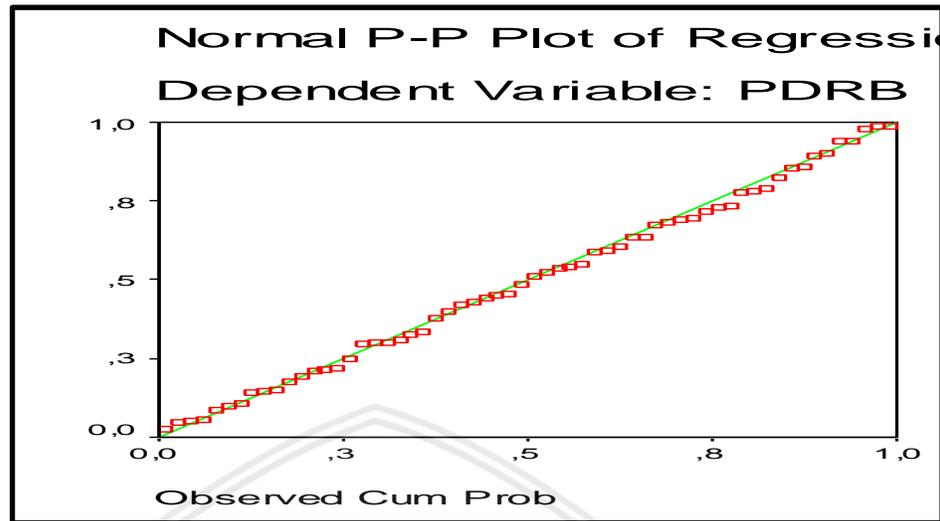
distribusi normal. Model regresi yang baik harus mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Normalitas dapat dideteksi dengan melihat pola penyebaran data pada grafik normal P-Plot berupa titik pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusan dengan metode analisis grafik ialah:

- 1) Jika data tersebar menjauhi garis diagonal serta mengikuti arah garis maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data tersebar menjauhi garis diagonal serta tidak mengikuti arah garis maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Hasil pengujian normalitas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 3: Hasil uji Normalitas dengan Z (Investasi)
Sumber: data diolah (2019)



Gambar 4: Hasil Uji Normalitas dengan Y (PDRB)
 Sumber: data diolah (2019)

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan grafik normal P-Plot menunjukkan bahwa persebaran data menyebar di sekitar garis diagonal. Data juga tersebar mengikuti arah garis diagonal. Berdasarkan hasil di atas, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dapat disimpulkan bahwa data telah memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2016: 103). Penelitian ini menguji adanya multikolinearitas dengan melihat nilai dari *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). *Tolerance* dan VIF digunakan untuk menjelaskan setiap variabel bebas yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Nilai *cut off* multikolinearitas yang digunakan adalah apabila nilai *tolerance* $\leq 0,10$ dan VIF $\geq 0,10$ maka disimpulkan bahwa terjadi

multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 14: Hasil Analisis Statistik Uji Multikolinearitas dengan Z (Investasi)

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pengeluaran Pemerintah	.915	1.092
	Suku Bunga	.936	1.068
	Nilai Tukar	.937	1.067
	Inflasi	.917	1.091

a. Dependent Variable: Investasi

Sumber: data diolah (2019)

Tabel 15: Hasil Analisis Statistik Uji Multikolinearitas dengan Y (Produk Domestik Regional Bruto)

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Pengeluaran Pemerintah	.915	1,092
	Suku Bunga	.936	1,068
	Nilai Tukar	.937	1,067
	Inflasi	.917	1,091

a. Dependent Variable: PDRB

Sumber: data diolah (2019)

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas dengan Z investasi dan Y Produk Domestik Regional Bruto menunjukkan tidak adanya variabel bebas yang nilai *tolerance* $\geq 0,10$ dan dilihat dari nilai VIF, masing-masing variabel menunjukkan nilai $VIF \leq 10$. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas dapat disimpulkan bahwa tidak adanya multikolinearitas antar variabel bebas pada penelitian ini.

c. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2016: 107), “uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya)”. Autokorelasi dapat di deteksi dengan menggunakan Uji Durbin-Watson. Berikut adalah hipotesis pada pengujian Durbin Watson.

- 1) H_0 = tidak ada Autokorelasi ($r = 0$)
- 2) H_1 = ada Autokorelasi ($r \neq 0$)

Dasar keputusan pada uji Durbin Watson adalah:

- 1) Jika $0 < d < d_L$ atau $4 - d_L < d < 4$, maka H_0 ditolak yang berarti terdapat autokorelasi.
- 2) Jika $d_u < d < (4 - d_u)$, maka H_0 diterima yang berarti tidak terdapat autokorelasi.
- 3) Jika $d_L \leq d \leq d_u$ atau $4 - d_u \leq d \leq 4 - d_L$, maka tidak terdapat keputusan yang pasti tentang ada tidaknya autokorelasi (*No decision*).

Tabel Durbin Watson untuk $n = 60$ dan $K = 4$ (banyaknya variabel bebas) diketahui nilai d_u adalah sebesar 1,7274 dan $4 - d_u$ sebesar 2,2726. Hasil uji autokorelasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Model Summary ^b	
Model	Durbin-Watson
1	1.866 ^a

a. Predictors: (Constant), Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar, Pengeluaran Pemerintah
b. Dependent Variable: Investasi

Gambar 5: Hasil Analisis Statistik Uji Autokorelasi dengan Z (Investasi)

Sumber: data diolah (2019)

Model Summary ^b	
Model	Durbin-Watson
1	1,750 ^a

a. Predictors: (Constant), Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar, Pengeluaran Pemerintah
b. Dependent Variable: PDRB

Gambar 6: Hasil Analisis Statistik Uji Autokorelasi dengan Y (Produk Domestik Regional Bruto)

Sumber: data diolah (2019)

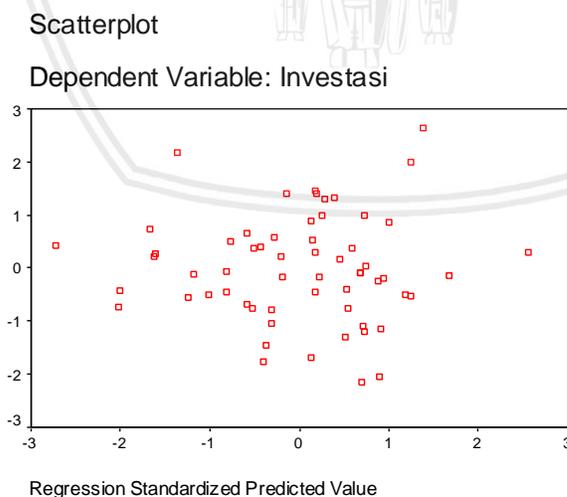
Berdasarkan hasil uji autokorelasi dengan investasi (Z) dan Produk Domestik Regional Bruto (Y) didapatkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,866 dan 1,750. Jika disesuaikan dengan dasar pengambilan keputusan dimana ($d_u < d < 4-d_u$) maka perhitungan untuk variabel Z menjadi ($1,7274 < 1,866 < 2,2726$) dan ($1,7274 < 1,750 < 2,2726$) untuk variabel Z. Nilai Durbin-Watson untuk Z dan Y berada di antara nilai d_u dan $4-d_u$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi pada investasi dan Produk Domestik Regional Bruto tidak terdapat autokorelasi.

d. Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghozali (2016: 134), uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Cara mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dapat dilihat dengan beberapa cara, salah satunya melihat pola pada grafik *scatterplot* (Sajono dan Julianita, 2013: 66). Dasar analisis yang dilakukan ialah:

- 1) Jika berbentuk pola tertentu yang teratur maka hal ini mengindikasikan terjadinya heteroskedastisitas
- 2) Jika tidak berbentuk suatu pola tertentu, dimana titik-titik tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

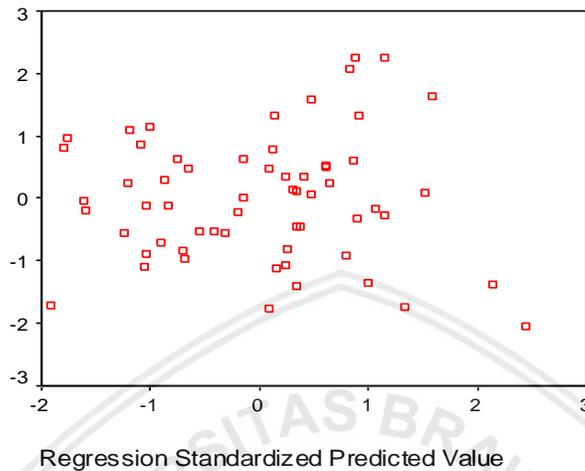


Gambar 7 : Hasil Uji Heterokedastisitas dengan Z (Investasi)

Sumber: data diolah (2019)

Scatterplot

Dependent Variable: PDRB



Gambar 8: Hasil Uji Heterokedastisitas dengan Z (Produk Domestik Regional Bruto)

Sumber: data diolah (2019)

Berdasarkan gambar *scarploott* di atas menunjukkan bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang teratur dan tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Berdasarkan hasil diagram tersebut maka dapat disimpulkan bahwa data bebas heterokedastisitas.

3. Hasil *Path Analysis*

Untuk menguji pengaruh antar variabel secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan pada model penelitian yang dilakukan maka digunakanlah analisa jalur atau *path analysis* (Ghozali, 2016: 237). Untuk mengetahui signifikansi analisis jalur yaitu menurut Ghozali (2016:237), dengan cara melihat t_{hitung} yang dibandingkan dengan t_{tabel} , apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka menunjukkan adanya pengaruh, t tabel pada penelitian ini ialah 2,042. Signifikansi $\leq 0,05$ maka

H_0 ditolak H_1 diterima yang memiliki arti signifikan, apabila signifikansi $\geq 0,05$ maka H_0 diterima H_1 ditolak yang memiliki arti tidak signifikan. Hasil pengujian dari setiap hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Koefisien Jalur Pengeluaran Pemerintah terhadap Investasi

Tabel 16: Hasil dari Uji Koefisien Jalur Pengeluaran Pemerintah terhadap investasi

Variabel Independen	Variabel Dependen	B	Beta	t_{hitung}	Signifikansi	Keputusan
Pengeluaran Pemeirintah	Investasi	22,842	0,153	1,185	0,241	Tidak Signifikan
N = 60						
$t_{tabel} = 2,004$						

Sumber: Lampiran 2

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_0 = Pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap investasi

H_1 = Pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap Investasi

Pada tabel hasil uji koefisien jalur pengeluaran pemerintah terhadap investasi diatas menunjukkan bahwa nilai koefisien beta (β) adalah sebesar 22,842. Variabel penelitian ini memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1,185. Nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} atau $1,185 < 2,004$. Signifikansi sebesar 0,241 dimana lebih besar dari 0,05 atau $0,241 > 0,05$. Disimpulkan dari analisis di atas bahwa pengujian hipotesis pengeluaran pemerintah (X1) berpengaruh terhadap investasi (Z) ditolak, H_0 diterima H_1 ditolak yang berarti bahwa pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap Investasi.

b. Koefisien Jalur Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB

Tabel 17: Hasil dari Uji Koefisien Jalur Pengeluaran Pemerintah terhadap PDRB

Variabel Independen	Variabel Dependen	B	Beta	t_{hitung}	Signifikansi	Keputusan
Pengeluaran Pemeirintah	PDRB	3,636	0,550	2.908	0,005	Signifikan
N = 60						
$t_{tabel} = 2,004$						

Sumber: Lampiran 3

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_0 = Pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap PDRB

H_2 = Pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap PDRB

Pada tabel hasil uji koefisien jalur pengeluaran pemerintah terhadap PDRB diatas menunjukkan bahwa nilai koefisien beta (β) adalah sebesar 3,636. Variabel penelitian ini memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2.908. Nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} atau $2.908 > 2,004$. Signifikansi sebesar 0,005 dimana lebih kecil dari 0,05 atau $0,005 < 0,05$. Disimpulkan dari analisis di atas bahwa pengujian hipotesis pengeluaran pemerintah (X1) berpengaruh terhadap PDRB (Y) bahwa H_2 diterima H_0 ditolak yang berarti bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap PDRB diterima.

c. Koefisien Jalur Suku Bunga terhadap Investasi

Tabel 18: Hasil dari Uji Koefisien Jalur Suku Bunga terhadap investasi

Variabel Independen	Variabel Dependen	B	Beta	t_{hitung}	Signifikansi	Keputusan
Suku Bunga	Investasi	25,958	0,089	0,789	0,434	Tidak Signifikan
N = 60						

$t_{\text{tabel}} = 2,004$

Sumber: Lampiran 2

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_0 = Suku bunga tidak berpengaruh terhadap investasi

H_3 = Suku bunga berpengaruh terhadap Investasi

Pada tabel hasil uji koefisien jalur suku bunga terhadap investasi diatas menunjukkan bahwa nilai koefisien beta (β) adalah sebesar 25,958. Variabel penelitian ini memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0,789. Nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} atau $0,789 < 2,004$. Signifikansi sebesar 0,434 dimana lebih besar dari 0,05 atau $0,434 > 0,05$. Disimpulkan dari analisis di atas bahwa pengujian hipotesis suku bunga (X_2) berpengaruh terhadap investasi (Z) ditolak, H_0 diterima H_a ditolak yang berarti bahwa suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap Investasi.

d. Koefisien Jalur Suku Bunga terhadap PDRB

Tabel 19: Hasil dari Uji Koefisien Jalur Suku Bunga terhadap PDRB

Variabel Independen	Variabel Dependen	B	Beta	t_{hitung}	Signifikansi	Keputusan
Suku Bunga	PDRB	3,399	0,264	1,592	0,117	Tidak Signifikan
N = 60						
$t_{\text{tabel}} = 2,004$						

Sumber: Lampiran 3

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_0 = Suku bunga tidak berpengaruh terhadap PDRB

H_4 = Suku bunga berpengaruh terhadap PDRB

Pada tabel hasil uji koefisien jalur suku bunga terhadap PDRB diatas menunjukkan bahwa nilai koefisien beta (β) adalah sebesar 3,399. Variabel penelitian ini memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1,592. Nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} atau $1,592 < 2,004$. Signifikansi sebesar 0,117 dimana lebih besar dari 0,05 atau $0,117 > 0,05$. Disimpulkan dari analisis di atas bahwa pengujian hipotesis suku bunga (X_2) berpengaruh terhadap PDRB (Y) ditolak, H_0 diterima H_a ditolak yang berarti bahwa suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB.

e. Koefisien Jalur Nilai tukar terhadap Investasi

Tabel 20 : Hasil dari Uji Koefisien Jalur Nilai Tukar terhadap Investasi

Variabel Independen	Variabel Dependen	B	Beta	t_{hitung}	Signifikansi	Keputusan
Nilai tukar	Investasi	0,135	0,700	5,569	0,000	Signifikan
N = 60						
$t_{tabel} = 2,004$						

Sumber: Lampiran 2

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_0 = Nilai tukar tidak berpengaruh terhadap investasi

H_5 = Nilai tukar berpengaruh terhadap investasi

Pada tabel hasil uji koefisien jalur pengeluaran pemerintah terhadap PDRB diatas menunjukkan bahwa nilai koefisien beta (β) adalah sebesar 0,135. Variabel penelitian ini memiliki nilai t_{hitung} sebesar 5,569. Nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} atau $5,569 > 2,004$. Signifikansi sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05 atau $0,000 < 0,05$. Disimpulkan dari analisis di atas

bahwa pengujian hipotesis nilai tukar (X3) berpengaruh terhadap Investasi (Z) bahwa H_5 diterima H_0 ditolak yang berarti bahwa nilai tukar berpengaruh signifikan terhadap investasi.

f. Koefisien Jalur Nilai tukar terhadap PDRB

Tabel 21: Hasil dari Uji Koefisien Jalur Nilai Tukar terhadap PDRB

Variabel Independen	Variabel Dependen	B	Beta	t_{hitung}	Signifikansi	Keputusan
Nilai tukar	PDRB	0,001	0,079	0,432	0,667	Tidak Signifikan
N = 60						
$t_{tabel} = 2,004$						

Sumber: Lampiran 3

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_0 = Nilai tukar tidak berpengaruh terhadap PDRB

H_6 = Nilai tukar berpengaruh terhadap PDRB

Pada tabel hasil uji koefisien jalur nilai tukar terhadap PDRB diatas menunjukkan bahwa nilai koefisien beta (β) adalah sebesar 0,001. Variabel penelitian ini memiliki nilai t_{hitung} sebesar 0,432. Nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} atau $0,432 < 2,004$. Signifikansi sebesar 0,667 dimana lebih besar dari 0,05 atau $0,667 > 0,05$. Disimpulkan dari analisis di atas bahwa pengujian hipotesis nilai tukar (X3) berpengaruh terhadap PDRB (Y) ditolak, H_0 diterima H_a ditolak yang berarti bahwa nilai tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB.

g. Koefisien Jalur Inflasi terhadap Investasi

Tabel 22: Hasil dari Uji Koefisien Jalur Inflasi terhadap Investasi

Variabel Independen	Variabel Dependen	B	Beta	t_{hitung}	Signifikansi	Keputusan
Inflasi	Investasi	-22,385	-0,103	-0,872	0.387	Tidak Signifikan
N = 60						
$t_{tabel} = 2,004$						

Sumber: Lampiran 2

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_0 = Inflasi tidak berpengaruh terhadap investasi

H_7 = Inflasi berpengaruh terhadap Investasi

Pada tabel hasil uji koefisien jalur suku bunga terhadap investasi diatas menunjukkan bahwa nilai koefisien beta (β) adalah sebesar -22,385. Variabel penelitian ini memiliki nilai t_{hitung} sebesar -0,872. Nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} atau $-0,872 < 2,004$. Signifikansi sebesar 0,387 dimana lebih besar dari 0,05 atau $0,387 > 0,05$. Disimpulkan dari analisis di atas bahwa pengujian inflasi (X4) berpengaruh terhadap investasi (Z) ditolak, H_0 diterima H_a ditolak yang berarti bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Investasi.

h. Koefisien Jalur Inflasi terhadap PDRB

Tabel 23: Hasil dari Uji Koefisien Jalur Inflasi terhadap PDRB

Variabel Independen	Variabel Dependen	B	Beta	t_{hitung}	Signifikansi	Keputusan
Inflasi	PDRB	-1,120	-0,116	-0,672	0.504	Tidak Signifikan
N = 60						
$t_{tabel} = 2,004$						

Sumber: Lampiran 3

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_0 = Inflasi tidak berpengaruh terhadap PDRB

H_8 = Inflasi berpengaruh terhadap PDRB

Pada tabel hasil uji koefisien jalur inflasi terhadap PDRB diatas menunjukkan bahwa nilai koefisien beta (β) adalah sebesar -1,120. Variabel penelitian ini memiliki nilai t_{hitung} sebesar -0,672. Nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} atau $-0,672 < 2,004$. Signifikansi sebesar 0.504 dimana lebih besar dari 0,05 atau $0.504 > 0,05$. Disimpulkan dari analisis di atas bahwa pengujian hipotesis inflasi (X4) berpengaruh terhadap PDRB (Y) ditolak, H_0 diterima H_a ditolak yang berarti bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB.

i. Koefisien Jalur Investasi terhadap PDRB

Tabel 24: Hasil dari Uji Koefisien Jalur Investasi terhadap PDRB

Variabel Independen	Variabel Dependen	B	Beta	t_{hitung}	Signifikansi	Keputusan
Investasi	PDRB	0,027	0,620	6,016	0.000	Signifikan
N = 60						
$t_{tabel} = 2,004$						

Sumber: Lampiran 4

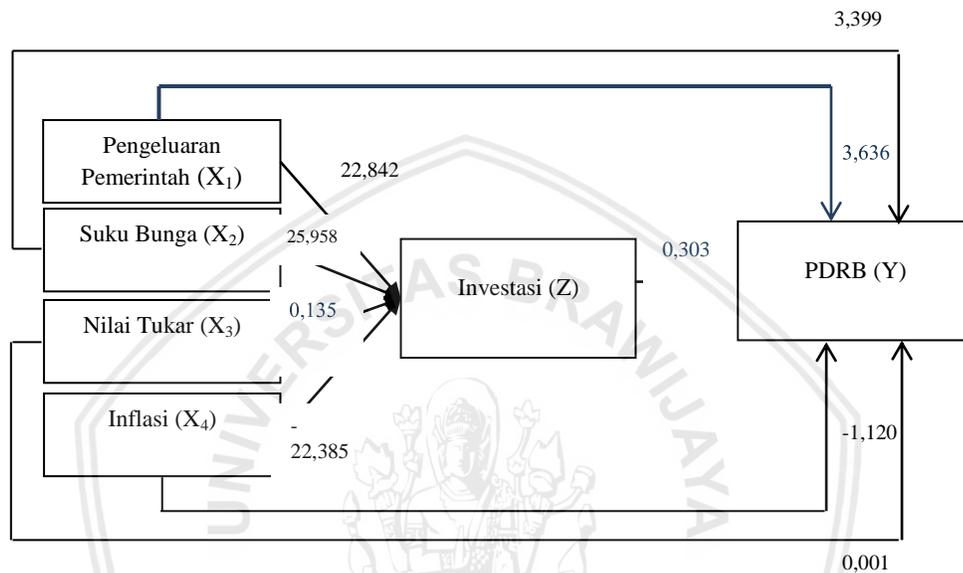
Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_0 = Investasi tidak berpengaruh terhadap PDRB

H_9 = Investasi berpengaruh terhadap PDRB

Pada tabel hasil uji koefisien jalur investasi terhadap PDRB diatas menunjukkan bahwa nilai koefisien beta (β) adalah sebesar 0,027. Variabel penelitian ini memiliki nilai t_{hitung} sebesar 6,016. Nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} atau $6,016 > 2,004$. Signifikansi sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari

0,05 atau $0,000 < 0,05$. Disimpulkan dari analisis di atas bahwa pengujian hipotesis investasi (Z) berpengaruh terhadap PDRB (Y) bahwa H_0 diterima H_1 ditolak yang berarti bahwa investasi berpengaruh signifikan terhadap PDRB diterima



Keterangan: → berpengaruh signifikan

Gambar 9: Diagram Hasil Analisa Jalur

Sumber: data diolah peneliti, 2019

Gambar di atas menunjukkan diagram hasil analisa jalur yang dilakukan dalam penelitian ini. Anak panah menunjukkan pengaruh antar variabel penelitian, sedangkan anak panah berwarna biru menunjukkan variabel yang memiliki pengaruh signifikan. Nilai beta dan Signifikasi masing-masing antar variabel dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 25: Beta dan Signifikansi pada Model Analisa Jalur

No.	Variabel	Investasi			PDRB		
		B	Beta	Sig.	B	Beta	Sig.
1.	Pengeluaran Pemerintah	22.842	0,153	0.241	3.636	0,550	0.005
2.	Suku Bunga	25.958	0,089	0.434	3.399	0,264	0.117
3.	Nilai Tukar	0.135	0,700	0.000	0.001	0,079	0.667
4.	Inflasi	-22.385	-0,103	0.387	-1.120	-0,116	0.504
5.	Investasi				0.027	0,620	0.000

Sumber: data diolah peneliti, 2019

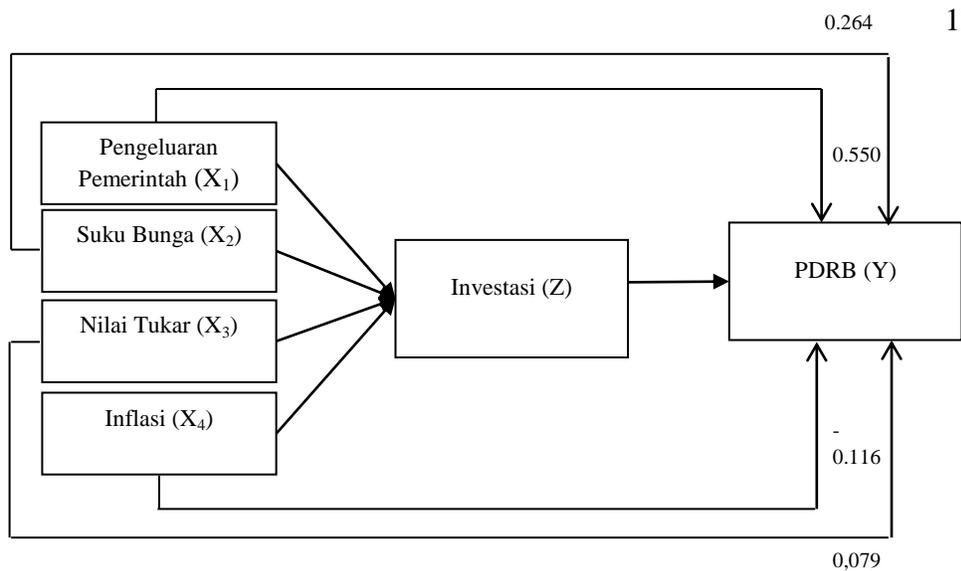
Persamaan struktural yang dihasilkan dari diagram analisa jalur pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Z = -1318,987 + 22,842X_1 + 25,958X_2 + 0,135X_3 - 0,22,385X_4 \quad (1)$$

$$Y = -36,728 + 3,636X_1 + 3,399X_2 + 0,001X_3 - 1,120X_4 \quad (2)$$

j. Pengaruh Antar Jalur (Pengaruh Langsung/*Direct Effect*)

Pengaruh secara langsung pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto menunjukkan pengaruh sebesar 3.636. Pengaruh langsung suku bunga terhadap Produk Domestik Regional Bruto adalah sebesar 3.399 Pengaruh langsung nilai tukar terhadap Produk Domestik Regional Bruto adalah sebesar 0.001, dan pengaruh langsung inflasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto adalah sebesar -1.120. Pengaruh langsung variabel X dengan variabel Y dapat digambarkan melalui gambar dibawah ini:



Gambar 10: Diagram Pengaruh langsung

a. Pengaruh tidak langsung/ *Indirect Effect*

Pengaruh tidak langsung atau *Indirect Effect* (IE) terjadi jika ada variabel ketiga yang menjadi mediasi hubungan antar variabel (Ghozali, 2013: 239). Hubungan pengaruh tidak langsung dilakukan untuk variabel pengeluaran pemerintah dan nilai tukar, karena dua variabel tersebut yang memiliki pengaruh dan signifikan terhadap PDRB dan investasi dan untuk menghitung pengaruh tidak langsung pada penelitian ini menggunakan *Beta Standardized Coefficient*. Menurut Ghozali (2013:100), Standardized Beta digunakan untuk “mengeliminasi perbedaan unit ukuran pada variabel independen”. Hasil pengaruh tidak langsung pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pengaruh tidak langsung pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto melalui investasi

Pengaruh tidak langsung pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto melalui investasi, dilakukan dengan

mengalikan hasil pengaruh langsung pada variabel yang dilewati, hasilnya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} IE &= (PX_1Z) (PZY) \\ &= (0,153) (0,620) \\ &= 0,09486 \end{aligned}$$

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung sebesar 0,09486. Hasil tersebut menunjukkan peran investasi sebagai perantara antara pengeluaran pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto adalah sebesar 0,09486.

- 2) Pengaruh tidak langsung nilai tukar terhadap Produk Domestik Regional Bruto melalui investasi

Pengaruh tidak langsung nilai tukar terhadap Produk Domestik Regional Bruto melalui investasi, dilakukan dengan mengalikan hasil pengaruh langsung pada variabel yang dilewati, hasilnya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} IE &= (PX_3Z) (PZY) \\ &= (0,700) (0,620) \\ &= 0,434 \end{aligned}$$

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung sebesar 0,434. Hasil tersebut menunjukkan peran investasi sebagai perantara antara nilai tukar dan Produk Domestik Regional Bruto adalah sebesar 0,434.

b. Pengaruh Total

Pengaruh total (TE) merupakan pengaruh keseluruhan dari berbagai hubungan variabel yang terdapat dalam penelitian. Pengaruh total diketahui dengan menjumlahkan hasil pengaruh langsung ditambah dengan pengalihan pengaruh tidak langsung X dan Z dan pengaruh X dan Y, dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Total pengaruh} = \text{PXY} + (\text{PXZ}) (\text{PZY})$$

(Sumber: Ghozali, 2016:238)

Hasil dari pengaruh total pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pengaruh total pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto melalui Investasi

$$\begin{aligned} \text{Total Pengaruh} &= \text{PX}_1\text{Y} + (\text{PX}_1\text{Z}) (\text{PZY}) \\ &= 0,550 + (0,153) (0,620) \\ &= 0,64486 \end{aligned}$$

Hasil pengaruh total yang diperoleh sebesar 0,64486. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh total pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto melalui Investasi sebagai variabel *intervening* lebih besar dari pada pengaruh langsung pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto ($0,64486 > 0,550$). Disimpulkan bahwa investasi sebagai variabel *intervening* diperlukan untuk memperkuat variabel pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

- 2) Pengaruh total nilai tukar terhadap Produk Domestik Regional Bruto melalui Investasi

$$\begin{aligned} \text{Total Pengaruh} &= PX_3Y + (PX_3Z) (PZY) \\ &= 0,079 + (0,700) (0,620) \\ &= 0,153 \end{aligned}$$

Hasil pengaruh total yang diperoleh sebesar. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh total pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto melalui Investasi sebagai variabel *intervening* lebih besar dari pada pengaruh langsung pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto ($0,153 > 0,079$). Disimpulkan bahwa investasi sebagai variabel *intervening* diperlukan untuk memperkuat variabel nilai tukar terhadap Produk Domestik Regional Bruto.

c. Ketepatan Model

Ketepatan model hipotesis dari data penelitian ini diukur dari besarnya koefisien determinasi (R^2) pada kedua persamaan. Menurut Ghozali (2016:95), “koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel-variabel independen”. Dalam model *path analysis* pada penelitian ini memiliki pengaruh *error*. Nilai R^2 dapat dilihat dalam lampiran 5 dan 6. Hasil dari pengaruh *error* sebagai berikut:

$$P_{ei} = \sqrt{1 - R^2}$$

(Sumber: Ghozali, 2013:239)

Keterangan:

P_{ei} = Nilai pengaruh *error*

R^2 = Koefisien Determinasi

$$P_{ei} = \sqrt{1 - R^2} = \sqrt{1 - 0,713} = 0,53572381$$

$$P_{ei} = \sqrt{1 - R^2} = \sqrt{1 - 0,386} = 0,78358152$$

$$\begin{aligned} R_m^2 &= 1 - (P_{e1})(P_{e2}) \\ &= 1 - (0,53572381)(0,78358152) \\ &= 1 - 0,41978328 \\ &= 0,5802167 \\ &= 58,02167\% \end{aligned}$$

Hasil perhitungan ketepatan model di atas menunjukkan bahwa kontribusi yang diberikan model untuk menjelaskan keenam variabel yang ada di dalam penelitian ini adalah besar 58,02167% sedangkan sisanya sebesar 41,97833% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti. Ringkasan dari perhitungan pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, pengaruh total, dan ketepatan model adalah sebagai berikut:

Tabel 26: Ringkasan pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung dan pengaruh total

Pengaruh Antar Variabel	Pengaruh		Pengaruh total
	Langsung	Tidak langsung	
Pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto melalui investasi	0,550	0,09486	0,64486
Nilai tukar terhadap Produk Domestik Regional Bruto melalui investasi	0,079	0,434	0,513

Sumber: Data diolah peneliti, 2019

4. Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis

a. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Investasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap investasi sub sektor perikanan di Indonesia periode 2012-2017. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori Keynes yang menyatakan bahwa ada pengaruh positif antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini yaitu investasi. Hasil penelitian juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bahtiar (2013), yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap investasi swasta dan penelitian Rahman *et.al* yang menyatakan bahwa pengeluaran berpengaruh terhadap investasi swasta baik positif maupun negatif.

Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wang (2005), yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk perlindungan orang dan harta, pengeluaran atas beban utang, dan pelayanan sosial tidak memiliki pengaruh terhadap investasi. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa perubahan pengeluaran pemerintah tidak mempengaruhi investasi di sub sektor perikanan.

Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap investasi menurut teori Keynes ialah, peningkatan pengeluaran pemerintah juga diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini adalah investasi. Namun, penelitian ini mendapatkan hasil yang berbeda. Hal tersebut dapat dilihat melalui tabel hubungan pengeluaran pemerintah dan investasi di bawah ini. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun 2013, ketika pengeluaran naik sebesar Rp 965.400.000.000 tidak diikuti dengan kenaikan investasi, sebaliknya penurunan investasi sebesar Rp 178.102.000.000. Pada tahun 2014, ketika pengeluaran turun sebesar Rp 1.230.800.000.000 tidak diikuti dengan penurunan investasi, sebaliknya diikuti dengan kenaikan investasi sebesar Rp 331.485.200.000. Pada tahun 2017, penurunan pengeluaran pemerintah sebesar Rp 1.429.200.000.000 tidak diikuti dengan penurunan investasi, sebaliknya diikuti dengan kenaikan investasi sebesar Rp 229.755.700.000.

Tabel 27: Hubungan pengeluaran pemerintah dan Realisasi Investasi pada sub sektor perikanan di Indonesia

Tahun	Pengeluaran Pemerintah	Investasi
2012	Rp 6.014.100.000.000	Rp 287.822.000.000
2013	Rp 6.979.500.000.000	Rp 109.720.000.000
2014	Rp 5.748.700.000.000	Rp 441.205.200.000
2015	Rp 10.597.800.000.000	Rp 989.166.700.000
2016	Rp 10.567.500.000.000	Rp 579.745.700.000
2017	Rp 9.138.300.000.000	Rp 827.501.400.000

Sumber: Data diolah peneliti, 2019

b. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Hasil hipotesis menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap PDRB sub sektor perikanan. Menurut teori Keynes, melalui kebijakan fiskal, pengeluaran agregat akan dapat ditambah, sehingga akan menaikkan pendapatan nasional (Hasyim, 2017:5). Hal ini berarti, bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif dengan PDRB, semakin meningkat pengeluaran pemerintah untuk sub sektor perikanan, maka PDRB sub sektor perikanan juga ikut meningkat.

Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa semakin besar pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah maka akan semakin meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis Teori Keynes dan sejalan dengan penelitian Chandio et.al (2016), dan Lumbantobing (2017).

Penelitian Chandio et.al (2016), menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pertanian berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Pakistan dan Penelitian Lumbantobing (2017), menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara pengeluaran pemerintah terhadap PDRB DKI Jakarta. Namun, penelitian tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adam dan Hermawan (2011) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah tidak mempengaruhi produk domestik bruto di bidang pertanian secara signifikan dan hasil penelitian Hasnul (2015) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki korelasi yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Malaysia.

c. Pengaruh Suku Bunga terhadap Investasi

Hasil hipotesis menunjukkan bahwa suku bunga berpengaruh terhadap investasi sub sektor perikanan. Menurut teori Keynes, efek perubahan penawaran uang dalam teori Keynes akan menimbulkan perubahan atas suku bunga, selanjutnya perubahan suku bunga akan mempengaruhi investasi. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa bahwa suku bunga tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap investasi.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori Keynes dan hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lubis et.al. (2015) yang menyatakan bahwa suku bunga memiliki pengaruh terhadap investasi asing langsung pada sektor Perkebunan di Indonesia dan hasil

penelitian Septifany, et.al (2015) yang menyatakan bahwa suku bunga memiliki efek terhadap penanaman modal asing di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa perubahan suku bunga tidak begitu berpengaruh terhadap investasi sub sektor perikanan di Indonesia pada tahun 2012-2017. Pengaruh suku bunga terhadap investasi menurut teori Keynes ialah, penurunan tingkat bunga akan meningkatkan investasi (Mankiw, 2006: 300). Namun, penelitian ini mendapatkan hasil yang berbeda. Hal tersebut dapat dilihat melalui tabel hubungan suku bunga dan realisasi pada sub sektor perikanan di bawah ini.

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun 2014, ketika suku bunga naik sebesar 1,07% tidak diikuti dengan penurunan investasi, kenaikan suku bunga pada tahun 2014 sebaliknya menaikkan investasi sebesar Rp 331.451.200.000 dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 juga terlihat bahwa penurunan suku bunga sebesar 1,52% tidak diikuti dengan kenaikan investasi, sebaliknya penurunan suku bunga pada tahun 2016 diikuti dengan penurunan investasi sebesar Rp 409.421.000.000.

Tabel 28: Hubungan Suku bunga dan Realisasi Investasi pada Sub Sektor Perikanan di Indonesia

Tahun	Suku Bunga (%)	Investasi
2012	5.77	Rp 287.822.000.000
2013	6.47	Rp 109.720.000.000
2014	7.54	Rp 441.205.200.000
2015	7.52	Rp 989.166.700.000
2016	6	Rp 579.745.700.000
2017	4.56	Rp 827.501.400.000

Sumber: data diolah peneliti, 2019

d. Pengaruh Suku Bunga terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Hasil hipotesis menunjukkan bahwa suku bunga berpengaruh terhadap PDRB sub sektor perikanan. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa bahwa suku bunga tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Hasil penelitian tidak sesuai dengan teori Keynes dan tidak sejalan dengan penelitian Adam dan Hermawan (2011) yang menyatakan bahwa suku bunga memiliki pengaruh terhadap PDB pertanian.

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa perubahan suku bunga tidak begitu berpengaruh terhadap PDRB sub sektor perikanan di Indonesia pada tahun 2012-2017. Pengaruh suku bunga terhadap PDRB menurut teori Keynes ialah, penurunan tingkat bunga akan meningkatkan PDD (Mankiw, 2006: 300). Namun, penelitian ini mendapatkan hasil yang berbeda. Pada tahun 2013 dan 2014 kenaikan suku bunga tidak diikuti dengan penurunan PDRB pada seluruh sampel yang menjadi penelitian ini, sebaliknya penurunan suku bunga diikuti dengan kenaikan PDRB.

Hal tersebut dapat dilihat melalui tabel hubungan suku bunga dengan PDRB sub sektor perikanan salah satu sampel, yaitu Provinsi Jawa Timur, sebagai provinsi dengan PDRB sub sektor perikanan tertinggi di bawah ini. Berdasarkan tabel dapat terlihat bahwa pada tahun 2013 kenaikan suku bunga sebesar 1,04 tidak diikuti dengan penurunan PDRB tahun 2013 sebaliknya meningkatkan PDRB sebesar Rp 4.583.200.000.000. Pada tahun

2014 juga terlihat bahwa kenaikan suku bunga sebesar 1,07 tidak diikuti dengan penurunan PDRB sebaliknya meningkatkan PDRB sebesar Rp 5.370.000.000.000.

Tabel 29: Hubungan Suku bunga dan PDRB Sub Sektor Perikanan Provinsi Jawa Timur

Tahun	Suku Bunga (%)	PDRB Sub Sektor Perikanan
2012	5.77	Rp 27.520.900.000.000
2013	6.47	Rp 32.104.100.000.000
2014	7.54	Rp 37.474.100.000.000
2015	7.52	Rp 42.090.400.000.000
2016	6	Rp 45.943.100.000.000
2017	4.56	Rp 50.993.100.000.000

Sumber: data diolah peneliti

e. Pengaruh Nilai Tukar terhadap Investasi

Hasil hipotesis menunjukkan bahwa nilai tukar berpengaruh terhadap investasi. Dari hasil pengujian melalui analisa jalur atau *path analysis* menunjukkan bahwa bahwa nilai tukar memiliki pengaruh dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Mundell Fleming yang menyebutkan bahwa nilai tukar berpengaruh terhadap PDB melalui ekspor dan impor. Selanjutnya tingkat dampak ekspor dan impor juga mempengaruhi tingkat investasi di Indonesia. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Lubis (2015), yang menyatakan bahwa nilai tukar dalam jangka pendek memiliki pengaruh yang positif terhadap investasi asing langsung di sektor perkebunan dan tidak sejalan dengan hasil penelitian

Septifany et.al (2015) yang menyatakan bahwa nilai tukar memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap penanaman modal asing di Indonesia.

f. Pengaruh Nilai Tukar terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai tukar tidak berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto sub sektor perikanan tahun 2012-2017. Berdasarkan data nilai tukar dan PDRB sub sektor perikanan menunjukkan bahwa pengaruh antara nilai tukar dan PDRB sub sektor perikanan di seluruh sampel pada penelitian ini menunjukkan kesesuaian dengan teori Mundell-Flemming, bahwa depresiasi nilai tukar berpengaruh pada peningkatan Pendapatan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel hubungan nilai tukar dan PDRB sub sektor perikanan Provinsi Jawa Timur, sebagai salah satu sampel dengan dengan PDRB sub sektor perikanan tertinggi di bawah ini.

Tabel 30: Hubungan Nilai tukar dan PDRB sub sektor perikanan Provinsi Jawa Timur 2012-2017

Tahun	Nilai Rupiah	PDRB Sub Sektor Perikanan
2012	Rp 9.418	Rp 27.520.900.000.000
2013	Rp 10.562	Rp 32.104.100.000.000
2014	Rp 11.884	Rp 37.474.100.000.000
2015	Rp 13.457	Rp 42.090.400.000.000
2016	Rp 13.329	Rp 45.943.100.000.000
2017	Rp 13.398	Rp 50.993.100.000.000

Sumber: data diolah peneliti, 2019

Berdasarkan tabel, dapat terlihat bahwa depresiasi nilai tukar terjadi pada tahun 2013, 2014, 2015, dan 2017. Penurunan nilai tukar pada tahun tersebut

selalu diikuti dengan peningkatan PDRB sub sektor perikanan. Pada tahun 2013, penurunan nilai tukar sebesar Rp 1.114 diikuti dengan peningkatan PDRB sebesar Rp 4.583.200.000.000. Pada tahun 2014 penurunan nilai tukar sebesar Rp 1.322 diikuti dengan peningkatan PDRB sebesar Rp 5.370.000.000.000.

Pada tahun 2015, penurunan nilai tukar sebesar Rp 1.573 diikuti dengan peningkatan PDRB sebesar Rp 4.616.300.000.000 dan pada tahun 2017 penurunan nilai tukar sebesar Rp 69 diikuti dengan peningkatan PDRB sebesar Rp 5.050.000.000.000. Hal tersebut sesuai dengan teori Mundell-Fleming namun, pada hasil uji pengaruh tidak menunjukkan ada pengaruh antara nilai tukar dan PDRB. Berdasarkan hal tersebut, di duga bahwa nilai tukar bukan lah indikator dalam mempengaruhi peningkatan PDRB sub sektor perikanan.

Menurut *website* Indonesia Investments (2018), berdasarkan data Bank Dunia, disimpulkan bahwa penurunan ekonomi global yang disebabkan oleh krisis finansial global di akhir 2000-an memiliki dampak yang relatif kecil pada perekonomian Indonesia dibandingkan dengan dampak yang dialami negara-negara lain. Meskipun terjadi penurunan tajam harga-harga komoditi, turunnya pasar saham, yield obligasi domestik dan internasional yang lebih tinggi, dan melemahnya nilai tukar, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh dengan layak. Kesuksesan tersebut disebabkan oleh berlanjutnya konsumsi domestik yang subur.

Pada tahun 2010, Bank dunia melaporkan bahwa karena suburnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, setiap tahunnya sekitar 7 juta penduduk Indonesia masuk dalam kelas menengah negara ini. Meskipun pertumbuhan penduduk kelas menengah sudah tidak secepat itu karena perlambatan perekonomian Indonesia yang terjadi di antara tahun 2001-2015, Indonesia masih tetap memiliki kekuatan konsumen yang mendorong perekonomian dan telah secara signifikan memicu pertumbuhan investasi domestik dan asing sejak 2010.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa peningkatan pertumbuhan Indonesia dipengaruhi oleh konsumsi domestik. Di duga bahwa nilai tukar bukan merupakan faktor yang paling berpengaruh peningkatan PDRB sub sektor perikanan, melainkan konsumsi domestik pada sub sektor perikanan. Hal tersebut ditunjukkan pada gambar 10 di bawah tren konsumsi ikan dari tahun 2012-2017 selalu mengalami peningkatan. Diindikasi bahwa peningkatan konsumsi ikan tersebut, yang menjadi salah satu faktor yang meningkatkan PDRB sub sektor perikanan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Pridayanti (2014) dan Ahmad et.al (2015) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif nilai tukar terhadap pertumbuhan ekonomi.



Gambar 11: Konsumsi Ikan Nasional tahun 2012-2017

Sumber: kkp.go.id

g. Pengaruh Inflasi terhadap Investasi

Hasil hipotesis menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh terhadap investasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap investasi. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori Keynes, yang menyebutkan bahwa inflasi merupakan suatu gejala moneter yang dipengaruhi karena adanya perubahan nilai uang. Inflasi yang serius akan cenderung mengurangi investasi dan kecenderungan tersebut akan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian Lubis (2015), yang menyatakan bahwa inflasi memiliki pengaruh terhadap investasi, dilihat dari Indeks Harga Konsumen dalam jangka pendek maupun panjang memiliki dampak negatif terhadap Investasi asing langsung sektor perkebunan di Indonesia dan hasil penelitian Septifany et.al (2015) yang menyatakan bahwa

inflasi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap penanaman modal asing di Indonesia. Tidak adanya pengaruh inflasi terhadap investasi diduga karena tingkat inflasi yang rendah (*creeping inflation*), yang kurang dari 10% pertahun, yang menyebabkan tidak adanya dampak inflasi terhadap investasi sub sektor perikanan.

h. Pengaruh Inflasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Hasil hipotesis menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh terhadap PDRB. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap PDRB. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori Keynes, yang menyebutkan bahwa inflasi merupakan suatu gejala moneter yang dipengaruhi karena adanya perubahan nilai uang. Inflasi yang serius akan cenderung mengurangi investasi dan kecenderungan tersebut akan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian Ahmad et.al (2013) dan Larasati (2018), yang menyatakan bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap PDB. Tidak adanya pengaruh inflasi terhadap PDRB sub sektor perikanan diduga karena tingkat inflasi yang rendah (*creeping inflation*), yang kurang dari 10% pertahun, yang menyebabkan tidak adanya dampak inflasi terhadap PDRB sub sektor perikanan.

i. Pengaruh Investasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto

Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi berpengaruh dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi investasi pada sub sektor perikanan maka akan semakin meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto sub sektor perikanan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ahmad et.al (2013) dan Mahdi (2014).

Penelitian Ahmad et.al (2013), menyatakan FDI berdampak positif terhadap PDB di Pakistan. Penelitian Mahdi (2014), menyatakan bahwa investasi dalam dan luar negeri berpengaruh terhadap PDD sektor pertanian. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan Lumbantobing (2017), yang menyebutkan bahwa investasi dalam dan luar negeri tidak berpengaruh terhadap PDRB di DKI Jakarta.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti pengaruh pengeluaran pemerintah, suku bunga, nilai tukar, dan inflasi terhadap investasi dan dampaknya terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Berdasarkan hasil analisa pada penelitian, maka dapat disimpulkan hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap investasi sub sektor perikanan di Indonesia periode 2012-2017. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bahtiar (2013) dan penelitian Rahman *et.al* (2015). Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wang (2005).
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Indonesia 2012-2017. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Keynes yang menyatakan bahwa ada pengaruh positif antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini Produk Domestik Regional Bruto. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Chandio *et.al* (2016) dan Lumbantobing (2017).

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suku bunga tidak memiliki pengaruh terhadap investasi sub sektor perikanan di Indonesia periode 2012-2017. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori Keynes yang menyatakan bahwa perubahan suku bunga akan mempengaruhi investasi. Hasil penelitian juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lubis et.al (2015)
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suku bunga tidak memiliki pengaruh terhadap investasi sub sektor perikanan di Indonesia periode 2012-2017. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori Keynes yang menyatakan bahwa perubahan suku bunga akan mempengaruhi PDRB. Hasil penelitian juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adam dan Hermawan (2011)
5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai tukar memiliki pengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Indonesia 2012-2017. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Mundell-Fleming yang menyatakan bahwa nilai tukar berpengaruh terhadap PDB melalui ekspor dan impor. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Lubis (2015).
6. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai tukar tidak memiliki pengaruh terhadap PDRB sub sektor perikanan di Indonesia periode 2012-2017. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Pridayanti (2014) dan Ahmad et.al (2015). Hal tersebut diduga bahwa nilai tukar bukan indikator yang mempengaruhi peningkatan PDRB sub sektor perikanan.

7. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap investasi sub sektor perikanan di Indonesia periode 2012-2017. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Septifany *et.al* (2015). Hal tersebut diduga karena tingkat inflasi pada tahun 2012-2017 tergolong rendah (*creeping inflation*), yang kurang dari 10% pertahun
8. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap PDRB sub sektor perikanan di Indonesia periode 2012-2017. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Ahmad *et.al* (2015) dan Larasati (2018). Hal tersebut diduga karena tingkat inflasi pada tahun 2012-2017 tergolong rendah (*creeping inflation*), yang kurang dari 10% pertahun
9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi memiliki pengaruh positif terhadap PDRB sub sektor perikanan periode 2012-2017. Analisis Jalur menunjukkan bahwa hanya variabel pengeluaran pemerintah dan nilai tukar yang mempengaruhi PDRB melalui investasi Hasil perhitungan ketepatan model menunjukkan bahwa kontribusi yang diberikan untuk menjelaskan keenam variabel yang ada di dalam penelitian ini adalah sebesar 58,02167%. Sisanya sebesar 41,97832% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti.

B. Saran

Saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk meneliti pengaruh pengeluaran pemerintah, suku bunga, nilai tukar, dan inflasi terhadap sub sektor perikanan melalui investasi dan dampaknya terhadap Produk Domestik Regional Bruto, diharapkan pada penelitian selanjutnya menambahkan variabel makroekonomi lainnya seperti variabel ekspor dan konsumsi.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan pemerintah untuk lebih memperhatikan faktor makroekonomi yang berpengaruh terhadap investasi dan Produk Domestik Regional Bruto sub sektor perikanan.
- b. Berdasarkan hasil penelitian bahwa nilai tukar memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap investasi sub sektor perikanan. Oleh karena itu, kebijakan menjaga nilai tukar pada level yang tepat merupakan kebijakan yang perlu dilakukan agar investasi pada sub sektor perikanan di Indonesia dapat meningkat.
- c. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto. Oleh karena itu, kebijakan fiskal terhadap pengeluaran pemerintah perlu diperhatikan agar dapat meningkatkan pertumbuhan sub sektor perikanan di Indonesia melalui peningkatan Produk Domestik Regional Bruto.
- d. Berdasarkan hasil penelitian bahwa suku bunga tidak memiliki pengaruh terhadap investasi dan Produk Domestik Bruto. Oleh karena itu,

pemerintah perlu memperhatikan suku bunga untuk dapat menarik investor sehingga dapat meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto melalui peningkatan investasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Adam, L., & Hermawan, I. (2011). Pengaruh aspek fiskal dan moneter terhadap PDB sektor pertanian. *Jurnal ekonomi dan kebijakan publik*, 459.
- Ahmad , A., Ahmad, N., & Ali, S. (2013). Exchange Rate and Economic Growth in Pakistan (1975-2011). *Journal of Basic and Applied Scientific Research*, 740-746.
- Amir, Hidayat., & Fithra Faisal H, (2015). Kebijakan Fiskal Merespon Ketidakpastian Global. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Badan Informasi Geospasial. (2015, Januari 12). *Pentingnya Informasi Geospasial untuk Menata Laut Indonesia*. Retrieved Februari 7, 2019, from Badan Informasi Geospasial: <http://big.go.id/berita-surta/show/pentingnya-informasi-geospasial-untuk-menata-laut-indonesia>
- Badan Koordinasi Penanaman Modal. (---). Pentingnya Pembangunan Infrastruktur Indonesia Untuk Investasi, diakses pada tanggal 9 Juli 2019, dari Invest Indonesia: <https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/pentingnya-pembangunan-infrastruktur-indonesia-untuk-investasi>
- Badan Pusat Statistika. (-, - -). *Produk Domestik Regional Bruto*. diakses pada tanggal 27 Februari 2019, dari Badan Pusat Statistika: <https://www.bps.go.id/subject/52/produk-domestik-regional-bruto--lapangan-usaha->
- Bahtiar, Y. (2013). Dampak Pengeluaran Pemerintah terhadap Investasi Swasta. *Diponegoro University Institutional Repository*.
- Bank Indonesia. (-, - -). *Transmisi Kebijakan Moneter*. diakses pada tanggal 27 Februari 2019, dari Bank Indonesia : <https://www.bi.go.id/id/moneter/transmisi-kebijakan/Contents/Default>
- Bank Indonesia. (2018, July 31). *Tujuan Kebijakan Moneter Bank Indonesia*. diakses pada tanggal 2 Februari 2019, dari Bank Indonesia: <https://www.bi.go.id/id/moneter/tujuan-kebijakan/Contents/Default>
- Bungin, B. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Chandio, A. A., Jiang, Y., Rehman, A., & Jingdong, L. (2016). Impact of Government Expenditure on Agricultural Sector and Economic Growth in

- Pakistan. *International Journal of Advanced Biotechnology and Research (IJBR)*.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gilarso, T. (2004). *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro, Edisi Revisi*. Yogyakarta: KANISIUS.
- Hasnul, A. G. (2015). The effects of government expenditure on economic growth: the case of Malaysia. *Munich Personal RePEc Archive*, 1.
- Hasoloan, J. (2014). *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: deepublish.
- Hasyim, A. I. (2017). *Ekonomi Makro*. Depok: Kencana.
- JabarProv. (-,--). Visi dan Misi Pemerintah Jawa Barat. diakses pada tanggal 15 Juni 2019, dari <https://jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1352>
- JatengProv. (---). Visi dan Misi. diakses pada tanggal 15 Juni 2019, dari <https://jatengprov.go.id/visi-dan-misi/>
- JatimProv, (2015, Agust 10). Visi dan Misi. diakses pada tanggal 15 Juni 2019, dari <http://jatimprov.go.id/read/profil/visi-misi>
- Kuncoro, M. (2009). *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Larasati, I. S., & Sulasmiyati, S. (2018). Pengaruh Inflasi, Ekspor, dan Tenaga Kerja terhadap Produk Domestik Bruto. *Jurnal Administtrasi Bisnis*.
- Lipsey, G. R., Courant, N. P., Purvis, D. D., & Steiner, O. P. (1997). *Pengantar Makroekonomi Edisi Kesepuluh*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Lubis, R. P., Firdaus, M., & Sasongko, H. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi Investasi Asing Langsung pada Sektor Perkebunan di Indonesia. *Jurnal Bisnis & Manajemen*, 80-89.
- Lumbantobing, I. P. (2017). Pengaruh Investasi Dalam Negeri, Investasi Luar Negeri, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto di DKI Jakarta. *Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen*.
- Machmud, Amir (2016). *Perekonomian Indonesia: Pasca Reformasi*. Jakarta: Erlangga
- Mahdi. (2014). Elastisitas Investasi dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan PDB Sektor Pertanian di Indonesia. *Jurnal Serambi Ekonomi dan Bisnis*, 5-10.
- Mankiw, N. G. (2006). *Makroekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

- Martono, N. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Data Sekunder*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Noor, J. (2015). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Nopirin. (2012). *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: BPFE.
- Notohamijoyo, A. (2019, Maret 27). *Tantangan Investasi Yang Berkelanjutan Di Sektor Perikanan*. diakses pada tanggal 18 April 2019, dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia: <https://kkp.go.id/artikel/9667-tantangan-investasi-yang-berkelanjutan-di-sektor-perikanan>
- Pardede, Ratlan dan Rendhard Manurung. 2014. *Analisis Jalur: Path Analysis dan Aplikasi Dalam Riset Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta
- Pemerintah Aceh. (2017, July 11). Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Periode 2017-2022. diakses pada tanggal 15 Juni 2019, dari <https://acehprov.go.id/profil/read/2017/07/09/113/visi-dan-misi-gubernur-wakil-gubernur-aceh-periode-2017-2022.html>
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. (-,--). Visi Kaltim Berdaulat 2023. diakses pada tanggal 15 Juni 2019, dari <https://kaltimprov.go.id/halaman/visi-dan-misi>
- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. (-,--). Visi dan Misi. diakses pada tanggal Retrieved 15 Juni 2019, dari <http://www.sumutprov.go.id/tentang-provsu/visi-dan-misi>
- PPID DKI Jakarta. (-,--). Visi dan Misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Retrieved June 15, 2019, from <https://ppid.jakarta.go.id/visi-misi>
- Pratama, R. (2014). *Teori Ekonomi Makro; Suatu Pengantar, edisi kelima*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Priadana, M. S., & Muis, S. (2009). *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Pridayanti, A. (2014). Pengaruh Ekspor, Impor, dan Nilai tukar, terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia periode 2002-2012. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Univesitas Negri Surabaya*.
- Produk Domestik Bruto Indonesia*. (2018, Mei 7). diakses pada tanggal 5 Juli 2019, dari Indonesia Investment: <https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/produk-domestik-bruto-indonesia/item253>

- Provinsi Sulawesi Selatan. (-,--). Visi Misi Pemprov Sulses 2018-2023. Retrieved June 5, 2019, from <https://sulselprov.go.id/pages/visimisi>
- Putong, I. (2013). *Pengantar Mikro dan Makro*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rahardja, P., & Manurung, M. (2008). *Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Univesitas Indonesia.
- Rahman, U.R., Ullah I., Khalil, J. (2015). Effects of Government Expenditure on Private Investment: Evidence from Pakistan. *Journal of Basic and Applied Scientific Research*
- Sajono, H., & Julianita, W. (2013). *SPSS vs Lisrel Sebuah Pengantar, Aplikasi untuk Riset*. Jakarta: Salemba Empat.
- Septifany, A. T., Hidayat, R. R., & Sulasmiyati, S. (2015). Analisis Pengaruh Inflasi, Tingkat Suku Bunga, Nilai Tukar Rupiah dan Cadangan Devisa terhadap Penanaman Modal Asing di Indonesia. *Jurnal Administrasi Bisnis*.
- Statistics Times. (2018, November 20). *List of Countries by GDP Sector Composition*. diakses pada tanggal 8 April 2019, dari Statistics Times: <http://statisticstimes.com/economy/countries-by-gdp-sector-composition.php>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiarto, Eddy Cahyono (2012). *Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi*. diakses pada tanggal 27 April 2019, dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia: <http://www.setkab.go.id/artikel-6616-investasi-dan-pertumbuhan-ekonomi.html>
- Sukirno, S. (2013). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- SulutProv. (-,--). Visi dan Misi. diakses pada tanggal 15 Juni 2019, dari <https://sulutprov.go.id/mengenal-sulut/visi-misi/konten>.
- Suparmoko. (2000). *Pengantar Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFEE.
- Suparmoko, M. (2007). *Ekonomi SMA kelas X*. Jakarta: Yudhistira.
- Suseno, & Astiyah, S. (2009). *Inflasi*. Jakarta: PPSK BI.
- Syarifuddin, F. (2015). *Konsep, dinamika dan respon kebijakan nilai tukar di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia Institute.

- Syarifuddin, F. (2016). *Konsep, Dinamika dan Respon Kebijakan Nilai Tukar Di Indonesia*. Jakarta: BI Insitute.
- Wang, B. (2005). Effects of government expenditure on private investment: Canadian empirical evidence. *Empirical Economics*, 493-504.
- Warjiyo, P., & Solikin. (2003). *Kebijakan Moneter di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebansentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Yuana, K. A. (2010). *The Greatest Philosophers: 100 Tokoh Filsuf Barat dari Abad 6 SM- Abad 21 yang menginspirasi Dunia Bisnis*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Zulganef. (2013). *Metode Penelitian Sosial & Bisnis*. Yoyakarta: Graha Ilmu.



LAMPIRAN

Lampiran 1: Uji Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengeluaran Pemerintah	60	5748,7	10597,8	8173,817	2038,393
Suku Bunga	60	4,56	7,54	6,310	1,046
Nilai Tukar	60	9418	13457	12008,000	1572,601
Inflasi	60	3,53	6,96	5,225	1,400
PDRB	60	600,55	50993,10	12817,118	11428,051
Valid N (listwise)	60				

Lampiran 2: Hasil Uji t dengan Z (Investasi)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1318,987	217,338		-6,069	,000
	Pengeluaran Pemerintah	22,842	19,270	,153	1,185	,241
	Suku Bunga	25,958	32,914	,089	,789	,434
	Nilai tukar	,135	,024	,700	5,569	,000
	Inflasi	-22,385	25,660	-,103	-,872	,387

a. Dependent Variable: Investasi

Lampiran 3 Lampiran 4: Hasil Uji t dengan Z (Produk Domestik Regional Bruto

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-36,728	14,101		-2,605	,012
	Pengeluaran Pemerintah	3,636	1,250	,550	2,908	,005
	Suku Bunga	3,399	2,135	,264	1,592	,117
	Nilai tukar	,001	,002	,079	,432	,667
	Inflasi	-1,120	1,665	-,116	-,672	,504

a. Dependent Variable: PDRB

Lampiran 5: Hasil Uji Z (Investasi) dengan Y (Produk Domestik Regional Bruto)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,942	2,823		,688	,494
	Investasi	,027	,005	,620	6,016	,000

a. Dependent Variable: PDRB

Lampiran 6: Hasil Uji R² dengan Z (Investasi)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,856 ^a	,732	,713	162,738048

a. Predictors: (Constant), Inflasi, Nilai tukar, Suku Bunga, Pengeluaran Pemerintah

Lampiran 7: Hasil Uji R² dengan Y (Produk Domestik Regional Bruto)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,654 ^a	,428	,386	10,558494

a. Predictors: (Constant), Inflasi, Nilai tukar, Suku Bunga, Pengeluaran Pemerintah

Lampiran 8: APBN-P Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2012

TABEL 6
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2007-2013 (1)
(miliar rupiah)

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
			LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBN-P	APBN
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	141,8	159,1	211,8	204,8	320,6	623,2	732,7
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	1.068,7	1.283,4	1.538,7	1.792,4	1.742,9	2.706,6	2.998,3
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	847,4	1.258,8	1.590,9	1.974,2	2.087,3	2.674,8	2.903,4
4	005	MAHKAMAH AGUNG	2.663,6	4.001,2	3.950,5	3.895,8	4.734,9	5.055,6	5.325,9
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	1.590,8	1.622,0	1.602,1	2.636,7	3.311,3	3.789,4	4.362,2
6	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	1.174,5	1.105,6	1.342,0	1.530,4	1.611,0	1.977,2	2.473,2
7	008	WAKIL PRESIDEN	-	-	-	-	-	-	-
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	3.118,2	5.303,0	8.315,1	12.110,8	13.386,3	16.722,1	15.782,6
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	3.376,2	3.707,0	4.106,8	3.751,9	4.005,4	4.996,8	5.590,1
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	30.611,1	31.348,7	34.332,5	42.391,6	51.201,6	72.935,5	81.963,6
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	3.574,3	3.845,9	3.903,9	4.832,1	6.374,8	6.949,5	7.575,3
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	6.999,2	12.051,1	11.759,2	12.955,0	14.852,9	16.913,7	18.234,4
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	6.532,3	7.203,9	7.676,5	8.016,1	15.986,0	17.097,8	17.819,5
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	1.484,5	1.414,8	1.444,9	1.492,7	1.958,0	2.443,0	3.269,9
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	5.141,6	5.442,5	6.577,2	5.543,6	9.017,5	16.286,3	18.803,9
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	9.070,4	13.477,1	15.557,3	15.562,1	20.110,0	38.147,1	36.679,2
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	40.475,8	43.546,9	59.558,6	59.347,9	61.060,5	77.179,8	73.087,5
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	15.530,6	15.871,9	18.001,5	22.428,3	26.871,3	31.204,5	34.582,0
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	13.298,9	14.874,7	24.957,6	28.008,1	33.208,3	39.375,8	43.960,5
19	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.451,1	2.352,5	2.837,8	2.763,9	3.682,1	4.101,4	4.863,1
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	2.766,0	3.213,5	3.255,1	3.470,9	3.957,4	4.549,9	5.605,6
21	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	1.761,0	3.174,7	2.110,2	3.290,9	4.756,7	5.686,8	6.717,5
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.343,1	2.398,9	3.205,6	3.139,5	5.176,0	6.014,1	7.077,4
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	22.769,5	30.670,0	40.082,7	32.746,9	51.305,9	74.977,1	77.978,0
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	179,9	176,3	176,2	194,3	467,5	405,1	518,2
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	58,7	78,8	77,2	96,9	233,5	212,0	281,1

Nota Keuangan dan

Lampiran I

Data Pokok APBN

Lampiran 9: APBN-P Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2013

8

TABEL 6
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2008-2014 (1)
(miliar rupiah)

NO.	KODE RA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
			LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBNP	APBN
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	159,1	211,8	204,8	320,6	522,2	730,9	809,6
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	1.283,4	1.538,7	1.792,4	1.742,9	2.016,4	2.898,6	3.260,1
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	1.238,8	1.590,9	1.974,2	2.087,3	2.248,3	2.828,7	2.895,7
4	005	MAHKAMAH AGUNG	4.001,2	3.950,5	3.895,8	4.734,9	4.798,1	7.254,6	7.225,1
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	1.622,0	1.602,1	2.636,7	3.311,3	3.524,8	4.347,2	3.862,9
6	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	1.105,6	1.342,0	1.530,4	1.611,0	1.622,7	2.439,9	2.119,7
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	5.303,0	8.315,1	12.110,8	13.386,3	16.767,2	15.701,1	14.903,1
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	3.707,0	4.106,8	3.754,9	4.005,4	4.117,8	5.680,1	5.237,2
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	31.348,7	34.332,5	42.391,6	51.201,6	61.305,3	83.528,0	86.376,7
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	3.845,9	3.903,9	4.832,1	6.374,8	6.227,2	7.774,4	7.534,5
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	12.051,1	11.759,2	12.955,0	14.852,9	15.709,8	18.381,5	18.711,7
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	7.203,9	7.676,5	8.016,1	15.986,0	18.247,1	16.380,1	15.470,6
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	1.414,8	1.444,9	1.492,7	1.958,0	2.693,2	3.087,8	2.922,3
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	5.442,5	6.577,2	5.543,6	9.017,5	9.887,0	17.371,5	16.263,2
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	13.477,1	15.537,3	15.562,1	20.110,0	30.083,6	35.269,3	40.370,5
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN *)	43.546,9	59.358,6	59.347,9	61.060,5	67.585,4	79.707,7	80.661,0
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	15.871,9	18.004,5	22.428,3	26.871,3	30.575,6	36.592,2	46.459,0
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	14.874,7	24.937,6	28.008,1	33.208,3	36.896,8	45.419,6	49.402,2
19	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.352,5	2.837,8	2.763,9	3.682,1	3.784,0	4.956,7	4.520,8
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	3.213,5	3.255,1	3.470,9	3.957,4	4.422,5	16.014,1	7.683,6
21	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	3.174,7	2.110,2	3.290,9	4.756,7	5.230,7	6.357,5	5.314,0
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.398,9	3.205,6	3.139,5	5.176,0	5.954,5	6.976,5	6.521,5
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	30.670,0	40.082,7	32.746,9	51.305,9	67.976,4	83.328,6	84.148,1
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	176,3	176,2	194,3	467,5	360,0	518,2	514,3
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	78,8	77,2	96,9	233,5	191,7	281,1	317,5
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESELIAHTERAAN RAKYAT	87,1	88,1	84,4	211,3	220,7	299,3	218,4
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF **)	1.021,2	1.049,4	1.590,0	1.906,0	2.227,2	1.933,1	1.704,9
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	148,3	129,0	92,8	110,0	93,4	134,6	131,6

Nota Keuangan dan APBN 2013

*) dan tahun 2009-2011 adalah KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

Lampiran I

Data Pokok APBN 2008-2013

Lampiran 10: APBN-P Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2014

TABEL 5
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2010 – 2015 (t)
(miliar rupiah)

NO.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBNP	APBN
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	204,8	320,6	522,2	649,4	713,1	612,3
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	1.792,4	1.742,9	2.016,4	2.335,3	2.888,2	3.556,7
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	1.974,2	2.087,3	2.248,3	2.385,9	2.595,0	2.915,5
4	005	MAHKAMAH AGUNG	3.895,8	4.734,9	4.798,1	6.647,1	7.159,9	7.037,9
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	2.636,7	3.311,3	3.524,8	3.860,8	3.570,2	4.208,9
6	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	1.530,4	1.611,0	1.622,7	2.673,0	2.005,5	2.054,8
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	12.110,8	13.386,3	16.767,2	14.448,2	13.797,0	7.240,9
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	3.751,9	4.005,4	4.117,8	5.094,8	4.885,8	5.533,9
9	012	KEMENTERIAN PEJANTHANAN	42.391,6	51.201,6	61.305,3	87.706,7	83.300,3	96.935,7
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	4.832,1	6.374,8	6.227,2	6.996,2	7.607,5	9.688,7
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	12.955,0	14.852,9	15.709,8	16.678,3	18.204,8	18.727,2
12	018	KEMENTERIAN PEJANTAN	8.016,1	15.986,0	18.247,1	15.931,3	13.613,0	15.879,3
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	1.492,7	1.958,0	2.693,2	2.797,7	2.629,3	2.743,3
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	5.543,6	9.017,5	9.887,0	11.186,1	14.341,5	10.023,5
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	15.562,1	20.110,0	30.083,6	31.718,3	36.003,2	44.933,9
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN *)	59.347,9	61.060,5	67.585,4	71.829,8	76.557,9	88.309,1
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	22.428,3	26.871,3	30.575,6	35.360,5	47.476,5	47.758,8
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	28.008,1	33.208,3	36.896,8	41.887,4	51.568,5	56.440,0
19	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.763,9	3.682,1	3.784,0	4.574,9	3.961,9	5.251,9
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	3.470,9	3.957,4	4.422,5	15.822,0	6.684,3	8.079,4
21	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	3.290,9	4.756,7	5.230,7	6.113,0	4.507,3	5.643,2
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.139,5	5.176,0	5.954,5	6.569,7	5.748,7	6.726,0

*) dari tahun 2009-2011 adalah KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

Nota Keuangan dan APBN 2015

5

Lampiran II

Data Pokok APBN 2010 - 2015

Lampiran 11: APBN-P Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015

Lampiran

Data Pokok APBN 2010-2016

TABEL 6
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2015-2016
BERDASARKAN NOMENKLATUR K/L BARU (1)
 (miliar rupiah)

No.	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2015	2016
		APBNP	APBN
1	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	977,3	953,3
2	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	5.191,7	5.223,3
3	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	3.015,5	3.471,2
4	MAHKAMAH AGUNG	8.575,7	8.964,9
5	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	4.735,2	4.527,6
6	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	2.083,9	2.158,5
7	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	6.110,7	5.124,5
8	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	6.251,8	7.331,3
9	KEMENTERIAN PERTAHANAN	102.283,3	99.462,1
10	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	11.178,6	9.531,9
11	KEMENTERIAN KEUANGAN	25.686,3	39.278,3
12	KEMENTERIAN PERTANIAN	32.798,0	31.507,2
13	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	4.548,3	3.256,7
14	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	15.070,5	8.563,9
15	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	64.954,1	48.465,6
16	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	53.278,5	49.232,8
17	KEMENTERIAN KESEHATAN	51.277,3	63.481,6
18	KEMENTERIAN AGAMA	60.284,4	57.120,5
19	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	4.223,1	3.801,7
20	KEMENTERIAN SOSIAL	22.421,8	14.681,0
21	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN ^{*)}	6.667,8	6.113,9
22	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	10.597,8	13.801,2
23	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT ^{*)}	118.546,1	104.080,7
24	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	519,6	292,7

Lampiran 12: APBN-P Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2016

TABEL 6
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2015-2017
BERDASARKAN NOMENKLATUR K/L BARU (1)
(miliar rupiah)

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2015	2016	2017
			LKPP	APBNP	APBN
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	723,6	768,3	902,8
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	3.598,0	4.722,7	4.257,7
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	2.795,7	3.439,2	2.744,0
4	005	MAHKAMAH AGUNG	7.945,9	8.795,7	8.181,3
5	006	KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA	4.550,6	5.293,7	4.104,7
6	007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	1.989,3	2.092,9	1.688,1
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	3.163,9	3.786,9	3.303,5
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	5.902,1	6.954,9	7.417,4
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	101.363,0	108.732,8	108.011,8
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	9.258,4	11.252,5	9.371,8
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	28.245,5	38.070,6	40.774,1
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	28.679,5	27.630,9	22.107,1
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	3.646,7	2.987,2	2.827,9
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	9.628,1	7.741,8	7.027,2
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	47.118,0	42.902,5	45.983,7
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	48.853,8	43.605,9	39.823,1
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	48.852,6	62.720,9	58.267,1
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	53.826,6	56.248,6	60.166,3
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	3.302,2	2.964,0	3.467,9
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	21.139,2	13.098,9	17.525,3
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	5.817,4	5.895,7	6.772,4
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	9.276,5	10.567,5	9.299,6
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	109.469,4	97.073,1	101.496,5
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	759,2	280,9	281,1
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	232,5	359,2	350,4
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	314,0	393,5	381,5
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	2.102,4	4.224,4	3.824,0
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	124,8	249,9	243,9

Lampiran 13 : APBN-P Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2017

Nota Keuangan beserta APBN 2018

TABEL 6
BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA, 2015-2018
BERDASARKAN NOMENKLATUR K/L BARU (2)
(miliar rupiah)

No.	KODE BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2015	2016	2017	2018
			LKPP	LKPP	APBNP ⁴⁾	APBN
19	026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	3.302,2	2.319,3	3.232,0	3.991,2
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	21.139,2	12.299,8	17.318,9	41.295,7
21	029	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	5.817,4	4.883,1	6.463,3	8.025,6
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	9.276,5	6.482,4	9.138,3	7.287,6
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	109.469,4	83.262,6	104.343,3	107.386,3
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	759,2	244,1	282,9	283,7
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	232,5	302,3	463,8	414,4
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	314,0	279,9	321,5	382,1
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA	2.102,4	3.299,8	3.567,2	3.733,4
28	041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	124,8	177,9	198,9	247,0
29	042	KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI	39.096,0	37.671,5	39.487,6	41.284,0
30	044	KEMENTERIAN KOOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	1.319,3	956,8	960,8	944,5
31	047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	201,0	651,0	503,1	553,8
32	048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	137,4	153,5	184,3	357,4
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	2.571,0	2.187,5	9.829,1	5.646,2
34	051	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA ⁴⁾	1.494,6	1.546,0	1.361,9	969,3
35	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	140,8	141,8	168,7	42,4
36	054	BADAN PUSAT STATISTIK	4.430,9	4.610,9	4.138,0	4.760,2

9

Lampiran

Data Pokok APBN 2013-2018

Lampiran 14: Suku Bunga

Variabel	BI Rate											
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
	6	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75
	2013											
	5.75	5.75	5.75	5.75	5.75	6	6.5	7	7.25	7.25	7.5	7.5
	2014											
	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.75	7.75
BI Rate	2015											
	7.75	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	2016											
	7.25	7	6.75	6.75	6.75	6.5	6.5	5.25	5	4.75	4.75	4.75
	2017											
	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.75	4.5	4.25	4.25	4.25	4.25

Source : Bank Indonesia.



Lampiran 15: Nilai Tukar

Tahun	USD	JPY	DEM	NLG	GBP	FRF	CHF	SGD	MYR	HKD	AUD	CAD
2012												
Januari	9.000,00	11.792,00	0,00	0,00	14.152,00	0,00	9.836,00	7.176,00	2.954,00	1.160,00	9.573,00	8.997,00
Februari	9.085,00	11.275,00	0,00	0,00	14.468,00	0,00	10.156,00	7.287,00	3.031,00	1.171,00	9.827,00	9.144,00
Maret	9.180,00	11.176,00	0,00	0,00	14.670,00	0,00	10.168,00	7.309,00	2.996,00	1.182,00	9.555,00	9.218,00
April	9.190,00	11.467,00	0,00	0,00	14.961,00	0,00	10.128,00	7.425,00	3.029,00	1.184,00	9.604,00	9.370,00
Mei	9.565,00	12.141,00	0,00	0,00	14.803,00	0,00	9.851,00	7.425,00	3.007,00	1.232,00	9.284,00	9.292,00
Juni	9.480,00	11.963,00	0,00	0,00	14.732,00	0,00	9.826,00	7.415,00	2.967,00	1.222,00	9.524,00	9.181,00
Juli	9.485,00	12.135,00	0,00	0,00	14.911,00	0,00	9.688,00	7.616,00	3.013,00	1.223,00	9.974,00	9.477,00
Agustus	9.560,00	12.174,00	0,00	0,00	15.097,00	0,00	9.963,00	7.631,00	3.060,00	1.233,00	9.838,00	9.634,00
September	9.588,00	12.364,00	0,00	0,00	15.586,00	0,00	10.251,00	7.826,00	3.132,00	1.237,00	10.038,00	9.794,00
Oktober	9.615,00	12.090,00	0,00	0,00	15.461,00	0,00	10.319,00	7.882,00	3.149,00	1.241,00	9.984,00	9.621,00
November	9.605,00	11.644,00	0,00	0,00	15.412,00	0,00	10.369,00	7.872,00	3.156,00	1.239,00	10.011,00	9.674,00
Desember	9.670,00	11.197,00	0,00	0,00	15.579,00	0,00	10.597,00	7.907,00	3.160,00	1.247,00	10.025,00	9.722,00
2013												
Januari	9.698,00	10.676,00	0,00	0,00	15.325,00	0,00	10.655,00	7.934,00	3.133,00	1.250,00	10.113,00	9.677,00
Februari	9.667,00	10.460,00	0,00	0,00	14.663,00	0,00	10.406,00	7.822,00	3.125,00	1.246,00	9.926,00	9.451,00
Maret	9.719,00	10.323,00	0,00	0,00	14.714,00	0,00	10.191,00	7.816,00	3.133,00	1.252,00	10.130,00	9.564,00
April	9.722,00	9.925,00	0,00	0,00	15.055,00	0,00	10.368,00	7.879,00	3.207,00	1.253,00	10.057,00	9.606,00
Mei	9.802,00	9.705,00	0,00	0,00	14.927,00	0,00	10.276,00	7.786,00	3.185,00	1.263,00	9.476,00	9.516,00
Juni	9.929,00	10.035,00	0,00	0,00	15.159,00	0,00	10.528,00	7.841,00	3.124,00	1.280,00	9.184,00	9.473,00
Juli	10.278,00	10.486,00	0,00	0,00	15.660,00	0,00	11.061,00	8.086,00	3.166,00	1.325,00	9.296,00	9.983,00
Agustus	10.924,00	11.129,00	0,00	0,00	16.950,00	0,00	11.745,00	8.563,00	3.307,00	1.409,00	9.766,00	10.372,00
September	11.613,00	11.869,00	0,00	0,00	18.770,00	0,00	12.826,00	9.234,00	3.564,00	1.498,00	10.798,00	11.262,00
Oktober	11.234,00	11.415,00	0,00	0,00	18.014,00	0,00	12.490,00	9.068,00	3.561,00	1.449,00	10.675,00	10.723,00
November	11.977,00	11.680,00	0,00	0,00	19.596,00	0,00	13.234,00	9.537,00	3.712,00	1.545,00	10.858,00	11.299,00
Desember	12.189,00	11.617,00	0,00	0,00	20.097,00	0,00	13.732,00	9.628,00	3.708,00	1.572,00	10.876,00	11.443,00

Lanjutan lampiran 16

2014												
Januari	12.226,00	11.955,00	0,00	0,00	20.240,00	0,00	13.652,00	9.578,00	3.654,00	1.574,00	10.669,00	10.933,00
Februari	11.634,00	11.419,00	0,00	0,00	19.410,00	0,00	13.098,00	9.193,00	3.549,00	1.499,00	10.433,00	10.459,00
Maret	11.404,00	11.165,00	0,00	0,00	18.956,00	0,00	12.860,00	9.050,00	3.482,00	1.470,00	10.594,00	10.358,00
April	11.532,00	11.261,00	0,00	0,00	19.403,00	0,00	13.048,00	9.178,00	3.533,00	1.487,00	10.699,00	10.531,00
Mei	11.611,00	11.435,00	0,00	0,00	19.422,00	0,00	12.938,00	9.254,00	3.610,00	1.498,00	10.818,00	10.718,00
Juni	11.989,00	11.815,00	0,00	0,00	20.380,00	0,00	13.435,00	9.583,00	3.729,00	1.544,00	11.265,00	11.215,00
Juli	11.591,00	11.390,00	0,00	0,00	19.691,00	0,00	12.843,00	9.342,00	3.646,00	1.496,00	10.914,00	10.789,00
Agustus	11.717,00	11.297,31	0,00	0,00	19.432,06	0,00	12.800,58	9.382,23	3.712,03	1.511,84	10.960,67	10.791,14
September	12.212,00	11.170,37	0,00	0,00	19.835,35	0,00	12.840,56	9.585,18	3.728,86	1.572,82	10.654,98	10.952,48
Oktober	12.082,00	11.043,38	0,00	0,00	19.317,92	0,00	12.626,86	9.454,58	3.680,18	1.557,91	10.662,98	10.790,41
November	12.198,00	10.322,48	0,00	0,00	19.178,22	0,00	12.643,80	9.386,06	3.623,84	1.573,09	10.391,00	10.755,81
Desember	12.440,00	10.424,88	0,00	0,00	19.370,34	0,00	12.582,82	9.422,11	3.561,93	1.603,67	10.218,23	10.734,33
2015												
Januari	12.625,00	10.699,16	0,00	0,00	19.035,36	0,00	13.687,16	9.338,36	3.481,33	1.628,57	9.829,84	10.002,38
Februari	12.863,00	10.784,32	0,00	0,00	19.841,20	0,00	13.503,07	9.480,40	3.561,69	1.659,64	10.011,94	10.284,64
Maret	13.084,00	10.894,72	0,00	0,00	19.357,14	0,00	13.515,85	9.508,03	3.523,84	1.687,25	10.002,74	10.310,90
April	12.937,00	10.888,36	0,00	0,00	19.959,22	0,00	13.761,33	9.795,19	3.640,64	1.669,19	10.334,75	10.753,96
Mei	13.211,00	10.682,04	0,00	0,00	20.254,45	0,00	14.014,77	9.806,28	3.626,41	1.703,93	10.129,55	10.635,17
Juni	13.332,00	10.895,72	0,00	0,00	20.969,92	0,00	14.390,36	9.894,62	3.526,99	1.719,77	10.217,66	10.733,88
Juli	13.481,00	10.873,97	0,00	0,00	21.035,77	0,00	13.928,81	9.813,65	3.532,76	1.739,04	9.845,85	10.372,79
Agustus	14.027,00	11.574,88	0,00	0,00	21.645,08	0,00	14.605,41	9.937,31	3.343,76	1.809,88	10.005,47	10.593,21
September	14.657,00	12.232,01	0,00	0,00	22.208,30	0,00	15.081,56	10.274,45	3.297,05	1.891,21	10.270,17	10.916,89
Oktober	13.639,00	11.279,84	0,00	0,00	20.894,28	0,00	13.792,10	9.732,43	3.168,19	1.759,84	9.685,75	10.364,78
November	13.840,00	11.273,58	0,00	0,00	20.791,85	0,00	13.420,64	9.783,70	3.239,71	1.785,75	9.939,21	10.342,64
Desember	13.795,00	11.452,42	0,00	0,00	20.451,11	0,00	13.951,29	9.751,19	3.209,65	1.779,83	10.064,16	9.948,09
2016												
Januari	13.846,00	11.675,04	0,00	0,00	19.875,26	0,00	13.645,45	9.707,31	3.329,58	1.776,71	9.826,51	9.863,94
Februari	13.395,00	11.814,79	0,00	0,00	18.562,80	0,00	13.446,12	9.492,61	3.164,06	1.722,69	9.540,61	9.899,14
Maret	13.276,00	11.818,24	0,00	0,00	19.057,71	0,00	13.746,86	9.830,09	3.389,34	1.712,12	10.162,13	10.221,75
April	13.204,00	12.301,68	0,00	0,00	19.335,96	0,00	13.693,58	9.832,09	3.394,79	1.702,07	10.090,50	10.533,30
Mei	13.615,00	12.256,39	0,00	0,00	19.998,40	0,00	13.726,91	9.873,82	3.310,65	1.752,57	9.852,51	10.448,97
Juni	13.180,00	12.831,02	0,00	0,00	17.682,30	0,00	13.454,52	9.770,57	3.278,21	1.698,77	9.816,47	10.186,27
Juli	13.094,00	12.587,98	0,00	0,00	17.270,35	0,00	13.369,42	9.699,27	3.228,71	1.688,30	9.872,22	9.965,76
Agustus	13.300,00	12.917,02	0,00	0,00	17.425,01	0,00	13.530,73	9.758,26	3.283,56	1.714,55	10.012,92	10.161,99
September	12.998,00	12.873,78	0,00	0,00	16.847,37	0,00	13.456,22	9.521,66	3.136,59	1.676,08	9.911,63	9.879,91
Oktober	13.051,00	12.444,94	0,00	0,00	15.896,78	0,00	13.198,19	9.371,68	3.103,33	1.682,95	9.916,81	9.726,49
November	13.563,00	12.080,17	0,00	0,00	16.925,95	0,00	13.403,53	9.525,59	3.037,98	3.037,98	10.151,91	10.102,80
Desember	13.438,00	11.540,48	0,00	0,00	16.507,50	0,00	13.177,76	9.298,92	2.996,10	1.732,47	9.724,31	9.971,43

Lanjutan lampiran 17

2017												
Januari	13.343,00	11.774,10	0,00	0,00	16.700,77	0,00	13.420,20	9.402,12	3.012,31	1.719,86	10.100,00	10.189,39
Februari	13.347,00	11.856,10	0,00	0,00	16.592,33	0,00	13.229,92	9.495,26	3.003,38	1.719,84	10.254,51	10.119,80
Maret	13.321,00	11.884,74	0,00	0,00	16.639,94	0,00	13.308,36	9.532,04	3.009,38	1.714,34	10.185,92	9.986,51
April	13.327,00	11.990,65	0,00	0,00	17.203,84	0,00	13.406,77	9.545,54	3.064,74	1.713,09	9.955,95	9.769,10
Mei	13.321,00	11.988,49	0,00	0,00	17.080,20	0,00	13.652,07	9.612,85	3.113,85	1.709,89	9.930,14	9.895,26
Juni	13.319,00	12.000,73	0,00	0,00	16.867,86	0,00	13.697,75	9.590,65	3.109,74	1.707,67	10.051,20	9.997,37
Juli	13.323,00	12.061,93	0,00	0,00	17.499,78	0,00	13.763,44	9.819,08	3.114,68	1.706,15	10.636,43	10.687,48
Agustus	13.351,00	12.084,00	0,00	0,00	17.242,15	0,00	13.851,74	9.826,32	3.126,34	1.706,13	10.546,63	10.560,41
September	13.492,00	11.980,12	0,00	0,00	18.099,53	0,00	13.889,24	9.926,07	3.190,74	1.727,12	10.577,73	10.842,61
Oktober	13.572,00	12.001,59	0,00	0,00	17.913,01	0,00	13.625,84	9.969,89	3.206,62	1.739,61	10.431,45	10.573,81
November	13.514,00	12.066,62	0,00	0,00	18.205,40	0,00	13.739,34	10.033,79	3.307,80	1.730,80	10.251,73	10.507,75
Desember	13.548,00	12.021,84	0,00	0,00	18.218,01	0,00	13.842,15	10.133,52	3.335,31	1.732,87	10.557,28	10.778,91

Lampiran 18: Inflasi

LAPORAN INFLASI (Indeks Harga Konsumen)
Berdasarkan perhitungan inflasi tahunan

 Grafik Time Series

FILTER DATA

Januari 2012 s.d. Desember 2017 Cari

Bulan Tahun	Tingkat Inflasi
Desember 2017	3.61 %
Nopember 2017	3.30 %
Oktober 2017	3.58 %
September 2017	3.72 %
Agustus 2017	3.82 %
Juli 2017	3.88 %
Juni 2017	4.37 %
Mei 2017	4.33 %
April 2017	4.17 %
Maret 2017	3.61 %
Februari 2017	3.83 %
Januari 2017	3.49 %
Desember 2016	3.02 %
Nopember 2016	3.58 %
Oktober 2016	3.31 %

Lanjutan Lampiran 17: Inflasi

September 2016	3.07 %
Agustus 2016	2.79 %
Juli 2016	3.21 %
Juni 2016	3.45 %
Mei 2016	3.33 %
April 2016	3.60 %
Maret 2016	4.45 %
Februari 2016	4.42 %
Januari 2016	4.14 %
Desember 2015	3.35 %
Nopember 2015	4.89 %
Oktober 2015	6.25 %
September 2015	6.83 %
Agustus 2015	7.18 %
Juli 2015	7.26 %
Juni 2015	7.26 %
Mei 2015	7.15 %
April 2015	6.79 %
Maret 2015	6.38 %
Februari 2015	6.29 %
Januari 2015	6.96 %
Desember 2014	8.36 %
Nopember 2014	6.23 %
Oktober 2014	4.83 %
September 2014	4.53 %
Agustus 2014	3.99 %
Juli 2014	4.53 %
Juni 2014	6.70 %
Mei 2014	7.32 %
April 2014	7.25 %
Maret 2014	7.32 %
Februari 2014	7.75 %
Januari 2014	8.22 %
Desember 2013	8.38 %
Nopember 2013	8.37 %
Oktober 2013	8.32 %
September 2013	8.40 %
Agustus 2013	8.79 %
Juli 2013	8.61 %
Juni 2013	5.90 %
Mei 2013	5.47 %
April 2013	5.57 %
Maret 2013	5.90 %

Lanjutan Lampiran 17: Inflasi

Februari 2013	5.31 %
Januari 2013	4.57 %
Desember 2012	4.30 %
Nopember 2012	4.32 %
Oktober 2012	4.61 %
September 2012	4.31 %
Agustus 2012	4.58 %
Juli 2012	4.58 %
Juni 2012	4.53 %
Mei 2012	4.45 %
April 2012	4.50 %
Maret 2012	3.97 %
Februari 2012	3.58 %
Januari 2012	3.65 %

Lampiran 19: Realisasi Investasi Dalam Negeri Menurut Sektor Ekonomi 2012-2017

Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Sektor Ekonomi ¹⁾ (miliar rupiah), 2000-2017

Sektor Ekonomi	Investment					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1. Pertanian, Perburuan, Kehutanan, dan Perikanan :	9 888.1	6 953.4	13 379.9	13 112.8	21 671.0	22 947
Pertanian	9 728.9	6 949.2	13 357.9	12 366.4	21 464.6	22 884
Kehutanan	144.5	0.1	0.3	471.8	203.8	30
Perikanan	14.7	4.1	21.7	274.6	2.6	33
2. Pertambangan dan Pengalihan	10 480.9	18 762.2	3 140.7	3 946.8	6 033.6	20 635
3. Perindustrian	49 889.1	51 171.1	59 034.7	89 045.3	106 783.7	99 187
4. Listrik, Gas, dan Air	3 796.8	25 831.3	36 296.8	21 946.8	22 794.5	25 428
5. Konstruksi	4 586.6	6 033.2	12 097.7	17 165.4	14 039.1	30 334
6. Perdagangan Besar dan Eceran, Restoran, dan Hotel :	2 045.4	3 606.7	2 249.3	5 403.9	6 073.3	8 510
Perdagangan	1 030.4	2 204.9	518.5	1 426.6	4 513.4	3 712
Restoran dan Hotel	1 015.0	1 401.8	1 730.8	3 977.3	1 559.9	4 797
7. Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	8 612.0	13 178.4	15 715.0	21 333.9	26 769.6	34 474
8. Real Estate dan Jasa Perusahaan	58.0	2 152.4	13 111.8	6 509.9	9 192.8	17 247
9. Jasa Masyarakat, Sosial, dan Perorangan	2 825.1	462.0	1 100.4	1 000.9	2 873.2	3 589
Jumlah	92 182.0	128 150.6	156 126.3	179 465.9	216 230.8	262 351

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

Catatan :

¹⁾ Angka diperbaiki

¹⁾ Tidak termasuk Sektor Minyak & Bumi, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Investasi yang perizinannya dikeluarkan oleh instansi teknis atau sektor, Investasi Porto Folio (Pasar Modal) dan Rumah Tangga

Lampiran 20 : Realisasi Investasi Dalam Negeri Menurut Sektor Ekonomi 2012-2017

Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Menurut Sektor Ekonomi ¹⁾ (juta US\$), 2000-2017

Sektor Ekonomi	Investasi					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1. Pertanian, Perburuan, Kehutanan, dan Perikanan :	1 677.60	1 655.50	2 326.20	2 219.20	1 759.50	1 700.20
Pertanian	1 621.70	1 616.60	2 237.50	2 147.10	1 638.10	1 592.80
Kehutanan	26.90	28.80	53.30	19.00	78.20	48.10
Perikanan	29.00	10.00	35.30	53.10	43.30	59.30
2. Pertambangan dan Penggalian	4 255.40	4 816.40	4 665.10	4 017.20	2 742.40	4 375.90
3. Perindustrian	11 769.90	15 858.80	13 019.30	11 763.10	16 687.60	13 148.70
4. Listrik, Gas, dan Air	1 514.60	2 221.80	1 248.80	3 028.90	2 139.60	4 241.40
5. Konstruksi	239.60	526.80	1 383.60	954.50	186.90	224.70
6. Perdagangan Besar dan Eceran, Restoran, dan Hotel :	1 251.80	1 069.00	1 379.80	1 275.30	1 558.20	2 383.70
Perdagangan	483.60	606.50	866.80	625.10	670.40	1 294.10
Restoran dan Hotel	768.80	462.50	513.10	650.20	887.80	1 089.60
7. Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	2 808.20	1 449.90	3 000.80	3 289.90	750.20	1 899.60
8. Real Estate dan Jasa Perusahaan	401.80	677.70	1 168.40	2 433.60	2 321.50	2 873.70
9. Jasa Masyarakat, Sosial, dan Perorangan	645.80	341.70	337.50	294.30	818.20	1 391.90
Jumlah	24 564.70	28 617.50	28 529.60	29 275.90	28 964.10	32 239.80

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

Catatan :

¹⁾ Angka diperbaiki

¹⁾ Tidak termasuk Sektor Minyak & Bumi, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Investasi yang perizinannya dikeluarkan oleh instansi teknis atau sektor, Investasi Porto Folio (Pasar Modal) dan Rumah Tangga

Lampiran 21 : Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah tahun 2012

Lampiran 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha 2011-2015 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	110 425 442,74	119 706 873,00	131 450 708,11	140 621 915,57	157 496 096,77
1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	98 959 086,13	107 478 359,09	117 822 861,00	125 582 474,77	140 904 322,94
a. Tanaman Pangan	40 579 025,30	47 624 177,42	50 707 483,02	47 797 812,11	56 032 050,63
b. Tanaman Hortikultura	29 086 696,97	27 708 277,76	31 125 412,77	37 493 486,98	41 223 003,65
c. Tanaman Perkebunan	10 558 524,75	11 290 324,60	12 055 991,11	14 284 113,93	15 321 104,14
d. Peternakan	16 726 889,65	18 418 060,57	21 166 715,61	23 194 900,91	25 374 980,66
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	2 007 949,47	2 437 518,75	2 767 258,49	2 812 760,84	2 953 183,86
2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	4 457 083,21	4 500 608,76	4 936 439,80	5 457 032,84	6 074 351,08
3 Perikanan	7 009 273,40	7 727 905,15	8 691 407,31	9 582 407,96	10 519 422,75
B Pertambangan dan Penggalian	13 955 271,38	14 734 641,69	16 069 715,58	19 621 174,23	23 019 684,02
1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	1 521 373,61	1 521 207,27	1 639 212,53	1 896 474,17	1 962 137,30
2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pertambangan Bijih Logam	19 343,32	4 526,12	569,79	0,00	0,00
4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	12 414 554,25	13 208 908,30	14 429 933,26	17 724 700,06	21 057 546,72
C Industri Pengolahan	241 531 779,47	263 739 825,69	292 260 728,16	331 604 500,57	357 506 666,49
1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	45 138 077,58	40 535 616,61	46 421 511,57	47 763 806,84	50 318 867,18
2 Industri Makanan dan Minuman	77 280 549,42	82 614 009,87	90 129 827,32	106 242 911,10	124 738 497,06
3 Industri Pengolahan Tembakau	51 781 848,77	62 270 320,02	67 644 126,37	79 076 910,27	78 322 853,75
4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	18 623 002,61	21 697 839,08	24 883 114,39	26 449 948,70	27 220 732,51
5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	1 970 898,28	2 365 744,93	2 784 591,54	3 207 886,53	3 430 558,16
6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	12 348 238,41	13 145 075,07	14 986 420,62	17 191 110,62	18 783 886,36
7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	2 324 274,83	2 375 603,49	2 440 428,43	2 875 376,52	3 289 473,25
8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	12 369 269,82	15 996 659,36	17 481 709,88	20 714 494,81	22 356 288,76
9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	3 380 125,41	3 866 274,36	4 031 622,14	4 436 270,99	4 365 088,05
10 Industri Barang Galian bukan Logam	4 750 674,45	5 693 762,12	6 207 080,89	6 698 627,69	7 268 070,50
11 Industri Logam Dasar	2 401 214,79	2 677 825,97	2 885 970,73	3 250 477,20	3 245 423,87
12 Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik	3 464 144,86	4 187 726,15	5 042 494,64	5 632 938,08	5 417 222,57
13 Industri Mesin dan Perlengkapan	865 327,29	1 068 439,67	1 150 503,53	1 248 509,96	1 262 011,71
14 Industri Alat Angkutan	1 436 173,02	1 640 222,57	1 983 632,91	2 101 714,25	2 178 900,19
15 Industri Furnitur	2 426 267,56	2 578 143,33	3 119 547,19	3 548 939,20	4 074 281,71
16 Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dari Peralatan	972 192,17	1 026 563,27	1 068 146,01	1 164 577,81	1 236 510,86
D Pengadaan Listrik dan Gas	689 709,97	744 856,32	768 193,30	800 275,37	814 898,98
1 Kelenagalstribkan	669 461,69	720 896,79	739 233,31	767 481,12	779 379,73
2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	20 248,28	23 959,53	28 959,99	32 794,25	35 519,25
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	560 383,54	551 254,05	567 119,85	601 324,81	632 697,15

Lampiran 22 : Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah tahun 2013 - 2017

LAMPIRAN

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2013–2017
Table 1. Gross Regional Domestic Product of Jawa Tengah at Current Market Prices by Industry (Billion Rupiah), 2013–2017

Kategori/ Category	Lapangan Usaha/ Industry	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry & Fishing	131 450,71	140 435,09	157 201,72	164 596,66	167 246,89
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian/Agriculture, Livestock, Hunting and Agriculture Services	117 822,86	125 570,47	141 029,15	147 657,73	149 415,16
	a. Tanaman Pangan/Food Crops	50 707,48	47 797,81	56 032,05	57 840,50	57 343,21
	b. Tanaman Hortikultura/ Horticultural Crops	31,13	37,49	41,22	43,47	43,04
	c. Tanaman Perkebunan/Plantation Crops	12,06	14,28	15,32	16,32	16,75
	d. Peternakan/Livestock	21 166,72	23 194,30	25 499,80	26 952,30	29 066,25
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan/ Agriculture Services and Hunting	2 767,26	2 800,76	2 953,18	3 076,31	3 213,95
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu/Forestry and Logging	4 936,44	5 282,20	5 653,15	5 516,30	5 591,37
	3. Perikanan/Fishery	8 691,41	9 582,41	10 519,42	11 422,62	12 240,36
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining & Quarrying	16 069,72	19 653,82	23 228,24	27 479,90	30 022,90
	1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi/ Crude Petroleum, Natural Gas, and Geothermal	1 639,21	1 926,22	1 957,51	4 287,33	4 848,75
	2. Pertambangan Batubara dan Lignit/Coal and Lignite Mining	-	-	-	-	-
	3. Pertambangan Bijih Logam/Iron Ore Mining	0,57	-	-	-	-
	4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya/Other Mining and Quarrying	14 429,93	17 727,60	21 270,73	23 192,57	25 174,15
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	292.260,73	329 025,31	354 642,14	381 462,63	414 988,83
	1. Industri Batubara dan Pengilangan Minas/ Manufacture of Coal and	46 421,51	47 763,81	49 305,43	45 780,96	48 508,42

Lampiran 23 : Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur tahun 2012

Tabel 1 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2012 - 2016 (miliar rupiah)
Table *Gross Regional Domestic Product of Jawa Timur Province at Current Market Prices by Industry, 2012 - 2016 (billion rupiahs)*

Lapangan Usaha/ Industry	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry and Fishing	168 232,6	186 038,3	208 613,6	232 282,8	246 981,6
1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian/ Agriculture, Livestock, Hunting and Agriculture Services	134 184,8	146 635,1	162 876,9	180 988,9	192 035,4
a. Tanaman Pangan / Food Crops	56 484,2	62 032,0	67 330,5	76 078,8	79 026,5
b. Tanaman Hortikultura/ Horticultural Crops	15 278,2	16 023,0	18 025,9	20 097,7	22 820,6
c. Tanaman Perkebunan/ Plantation Crops	26 836,3	28 775,0	32 961,9	35 910,3	37 321,0
d. Peternakan/ Livestock	33 735,7	37 761,1	42 254,0	46 242,2	49 995,0
e. Jasa Pertanian dan Perburuan/ Agriculture Services and Hunting	1 850,4	2 044,0	2 304,6	2 659,9	2 872,2
2 Kehutanan dan Penebangan Kayu/ Forestry and Logging	6 527,0	7 299,2	8 262,7	9 203,5	8 984,1
3 Perikanan/ Fishery	27 520,9	32 104,1	37 474,1	42 090,4	45 962,1
B Pertambangan dan Penggalian/ Mining and Quarrying	66 133,8	73 777,3	78 535,1	66 526,2	69 900,3
1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi/ Crude Petroleum, Natural Gas, and Geothermal	46 585,5	53 195,0	54 741,6	40 428,9	41 779,4
2 Pertambangan Batubara dan Lignit/ Coal and Lignite Mining	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Pertambangan Bijih Logam/ Iron Ore Mining	543,4	518,5	630,8	518,1	529,3
4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya/ Other Mining and Quarrying	19 005,0	20 063,7	23 162,7	25 579,2	27 591,6
C Industri Pengolahan/ Manufacturing	365 694,8	397 997,7	445 279,8	495 699,7	536 473,9
1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas/ Manufacture of Coal and Refined Petroleum Products	744,3	898,9	909,9	915,7	909,3
2 Industri Makanan dan Minuman/ Manufacture of Food Products and Beverages	99 357,6	107 791,9	122 086,8	142 846,9	163 287,1
3 Industri Pengolahan Tembakau/ Manufacture of Tobacco Products	95 862,3	104 380,1	115 692,6	129 790,7	145 211,4
4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi/ Manufacture of Textiles; and	5 829,4	6 350,1	7 007,9	7 542,2	8 338,6

Lampiran 24 : Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur tahun 2013-2017

Tabel 1 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2013 - 2017 (miliar rupiah)
Table Gross Regional Domestic Product of Jawa Timur Province at Current Market Prices by Industry, 2013 - 2017 (billion rupiahs)

Lapangan Usaha/ Industry	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	186 038,3	208 613,6	230 942,5	249 457,2	258 428,1
1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian/ <i>Agriculture, Livestock, Hunting and Agriculture Services</i>	146 635,1	162 876,9	179 648,5	194 503,3	197 451,0
a. Tanaman Pangan / <i>Food Crops</i>	62 032,0	67 330,5	74 921,1	81 589,7	78 749,9
b. Tanaman Hortikultura/ <i>Horticultural Crops</i>	16 023,0	18 025,9	20 097,7	22 732,5	23 732,7
c. Tanaman Perkebunan/ <i>Plantation Crops</i>	28 775,0	32 961,9	35 910,3	37 321,0	37 630,2
d. Peternakan/ <i>Livestock</i>	37 761,1	42 254,0	46 242,2	50 112,1	54 461,3
e. Jasa Pertanian dan Perburuan/ <i>Agriculture Services and Hunting</i>	2 044,0	2 304,6	2 477,3	2 748,0	2 876,8
2 Kehutanan dan Penebangan Kayu/ <i>Forestry and Logging</i>	7 299,2	8 262,7	9 203,5	9 010,8	9 984,1
3 Perikanan/ <i>Fishery</i>	32 104,1	37 474,1	42 090,4	45 943,1	50 993,1
B Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	73 777,3	78 535,1	66 526,2	69 900,3	80 846,2
1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi/ <i>Crude Petroleum, Natural Gas, and Geothermal</i>	53 195,0	54 741,6	40 428,9	41 779,4	50 540,1
2 Pertambangan Batubara dan Lignit/ <i>Coal and Lignite Mining</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Pertambangan Bijih Logam/ <i>Iron Ore Mining</i>	518,5	630,8	518,1	529,3	557,3
4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya/ <i>Other Mining and Quarrying</i>	20 063,7	23 162,7	25 579,2	27 591,6	29 748,8
C Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	397 997,7	445 279,8	495 751,8	536 442,9	586 258,6
1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas/ <i>Manufacture of Coal and Refined Petroleum Products</i>	898,9	909,9	915,7	909,3	1 054,2
2 Industri Makanan dan Minuman/ <i>Manufacture of Food Products and Beverages</i>	107 791,9	122 086,8	142 809,6	163 287,1	185 823,4
3 Industri Pengolahan Tembakau/ <i>Manufacture of Tobacco Products</i>	104 380,1	115 692,6	129 880,2	145 180,4	156 032,0

Lampiran 25 : Produk Domestik Regional Bruto Jawa Barat tahun 2012

Tabel 1. PDRB Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2012–2016
Table Gross Regional Domestic Product of Jawa Barat Province at Current Market Prices by Industry (million rupiahs), 2012–2016

Lapangan Usaha/Industry		2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishing	100,784,620,9	114,042,321,7	120,787,231,5	132,497,853,5	147,068,412,8
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian/Agriculture, Livestock, Hunting and Agriculture Services	90,026,679,1	101,806,616,4	106,863,707,2	116,843,937,9	130,107,606,3
a.	Tanaman Pangan/Food Crops	49,040,837,7	56,493,689,8	57,679,405,8	63,869,736,7	71,635,661,4
b.	Tanaman Hortikultura/Horticultural Crops	16,396,670,7	20,115,636,6	22,401,612,6	23,951,773,2	27,202,835,4
c.	Tanaman Perkebunan/Plantation Crops	9,253,563,5	10,107,649,1	10,176,206,7	10,224,028,9	10,492,862,8
d.	Peternakan/Livestock	11,716,886,1	13,344,393,6	14,774,347,9	16,795,376,7	18,546,849,0
e.	Jasa Pertanian dan Perburuan/Agriculture Services and Hunting	1,616,809,1	1,745,245,3	1,831,934,1	2,003,022,4	2,230,397,7
2	Kehutanan dan Penambangan Kayu/Forestry and Logging	1,076,320,8	1,112,775,7	1,162,920,1	1,236,468,5	1,262,530,4
3	Perikanan/Fishery	9,681,621,0	11,122,729,6	12,760,604,2	14,415,447,1	15,698,276,1
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	36,863,496,5	34,829,948,3	33,622,738,0	26,025,115,0	25,347,017,3
1	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi/Crude Petroleum, Natural Gas, and Geothermal	29,415,769,9	27,213,025,7	25,437,637,2	17,444,572,7	16,781,459,5
2	Pertambangan Batubara dan Lignit/Coal and Lignite Mining	-	-	-	-	-
3	Pertambangan Bijih Logam/Iron Ore Mining	1,263,937,7	1,119,695,8	1,004,266,5	874,167,4	880,759,2
4	Pertambangan dan Penggalian Lainnya/Other Mining and Quarrying	6,163,786,9	6,497,226,8	7,180,634,3	7,706,354,9	7,884,796,6
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	487,760,808,0	544,183,777,9	604,759,573,1	656,140,108,3	702,139,263,5
1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas/Manufacture of Coal and Refined Petroleum Products	25,256,739,6	26,076,517,9	27,616,225,8	26,866,781,0	25,135,610,1
2	Industri Makanan dan Minuman/Manufacture of Food Products and Beverages	42,862,844,9	48,295,695,9	56,286,693,4	65,376,473,0	74,965,174,8
3	Industri Pengolahan Tembakau/Manufacture of Tobacco Products	2,179,352,9	2,223,221,1	2,639,135,9	3,065,141,6	3,165,447,6
4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi/Manufacture of Textiles and Wearing Apparel	66,490,991,0	77,121,960,1	88,262,184,9	98,223,254,3	105,045,456,7
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki/Manufacture of Leather and Related Products and Footwear	6,238,610,1	7,127,276,2	8,078,701,9	9,199,509,6	10,186,767,8
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya/Manufacture of Wood and of Products of Wood and Cork, and Articles of Straw and Plaiting Materials	4,932,759,6	5,507,916,7	5,749,146,3	5,767,729,6	5,914,431,9
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman/Manufacture of Paper and Paper Products, Printing and Reproduction of Recorded Media	14,264,430,1	14,460,348,5	14,919,941,5	15,748,920,4	17,427,470,6
8	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional/Manufacture of Chemicals and Pharmaceuticals and Botanical Products	26,864,486,0	30,830,634,5	32,893,365,1	36,416,805,1	38,577,689,1
9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik/Manufacture of Rubber, Rubber Products and Plastics Products	17,448,984,3	17,164,874,9	18,706,672,0	19,099,825,5	19,873,901,8
10	Industri Barang Galian bukan Logam/Manufacture of Other Non-Metallic Mineral Products	10,717,694,9	11,117,191,0	11,149,632,3	11,655,841,0	12,716,993,6
11	Industri Logam Dasar/Manufacture of Basic Metals	14,515,226,6	16,901,822,3	17,564,273,9	17,832,356,1	18,036,176,4
12	Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik/Manufacture of Fabricated Metal Products, Computer, and Optical Products, and Electrical Equipment	115,303,206,8	129,467,895,2	136,777,467,7	149,571,485,0	156,864,613,0
13	Industri Mesin dan Perlengkapan/Manufacture of Machinery and Equipment	43,459,251,3	45,547,666,0	55,756,495,3	62,029,061,8	68,264,066,1
14	Industri Alat Angkutan/Manufacture of Transport Equipment	88,073,962,2	104,694,598,0	119,058,727,7	125,296,141,4	135,214,474,8
15	Industri Furnitur/Manufacture of Furniture	2,147,742,0	2,480,355,0	2,918,342,2	3,195,733,0	3,503,676,5
16	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Perbaikan dan Pemasangan Mesin dan Peralatan/Other Manufacturing, Repair and Installation of Machinery and Equipment	4,943,476,8	5,215,635,7	6,180,547,2	6,789,049,7	7,247,310,8
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	7,775,965,2	8,783,322,2	11,068,528,5	11,437,568,8	11,920,087,4
1	Ketengalistrikan/Electricity	1,505,696,9	1,448,297,9	1,748,532,3	2,202,942,0	2,661,700,2
2	Pengadaan Gas dan Produksi Es/Manufacture of Gas and Production of Ice	6,270,278,3	7,335,024,3	9,320,000,0	9,234,626,9	9,258,387,2
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste	837,627,0	965,503,3	1,019,867,6	1,160,269,6	1,343,138,1
F	Konstruksi/Construction	88,024,137,6	99,103,612,4	112,073,459,8	125,923,144,0	134,113,402,0
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Vehicles and Motorcycles	179,461,165,1	199,720,305,3	211,469,531,5	232,322,871,0	250,299,838,6
1	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya/Wholesale and Retail Trade and Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	24,502,599,4	26,122,675,2	29,961,260,2	33,437,731,2	36,492,766,2
2	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale Trade and Retail Trade Except of Motor Vehicles and Motorcycles	154,958,565,7	171,597,630,2	181,508,271,4	198,885,139,7	213,807,072,4

Lampiran 26 : Produk Domestik Regional Bruto Jawa Barat tahun 2013-2017

LAMPIRAN

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Jawa Barat Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2013–2017
Table 1. Gross Regional Domestic Product of Jawa Barat at Current Market Prices by Industry (Billion Rupiah), 2013–2017

Kategori/ Category	Lapangan Usaha/ Industry	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry & Fishery	114.042,32	120.787,23	132.497,85	146.816,71	153.693,12
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian/Agriculture, Livestock, Hunting and Agriculture Services	101.806,82	106.863,71	116.843,94	129.730,25	135.087,74
	a. Tanaman Pangan/Food Crops	56.493,69	57.679,41	63.869,74	71.264,77	70.558,06
	b. Tanaman Hortikultura/Horticultural Crops	20.115,84	22.401,81	23.951,77	27.202,84	30.132,48
	c. Tanaman Perkebunan/Plantation Crops	10.107,65	10.176,21	10.224,03	10.492,86	11.857,06
	d. Peternakan/Livestock	13.344,39	14.774,35	16.795,38	18.545,85	20.224,37
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan/Agriculture Services and Hunting	1.745,25	1.831,93	2.003,02	2.223,93	2.315,77
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu/Forestry and Logging	1.112,78	1.162,92	1.238,47	1.262,53	1.320,67
	3. Perikanan/Fishery	11.122,73	12.760,60	14.415,45	15.823,93	17.284,71
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining & Quarrying	34.829,95	33.622,74	26.025,12	25.347,02	25.481,69
	1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi/ Crude Petroleum, Natural Gas, and Geothermal	27.213,03	25.437,84	17.444,57	16.781,46	17.183,69
	2. Pertambangan Batubara dan Lignit/Coal and Lignite Mining	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Pertambangan Bijih Logam/Iron Ore Mining	1.119,70	1.004,27	874,19	880,76	879,51
	4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya/Other Mining and Quarrying	6.497,23	7.180,63	7.706,35	7.684,80	7.418,48
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	544.183,78	604.759,57	656.824,39	703.516,39	755.387,26

Lampiran 27 : Produk Domestik Regional Bruto Aceh tahun 2012

Tabel A. PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2012-2016 (juta rupiah);
Table GRDP of Aceh Province at Current Market Prices by Industry, 2012-2016 (million rupiahs)

Lapangan Usaha/Industry		2012	2013	2014 ^a	2015 ^a	2016 ^{a*}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
A	Pertanian, Kehutanan, & Perikanan/Agriculture, Forestry & Fishing	29.643.043,4	32.254.068,2	34.376.593,7	37.594.064,7	40.374.030,5
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan & Jasa Pertanian/Agriculture, Husbandry, Hunting & Agriculture Serv.	22.886.797,4	26.124.022,5	26.828.110,4	29.486.980,2	31.798.496,7
a.	Tanaman Pangan /Food Crops	6.143.967,2	6.984.672,3	7.276.278,6	8.439.198,7	8.846.108,3
b.	Tanaman Hortikultura/Horticultural Crops	4.153.121,7	4.427.086,8	4.865.045,8	5.222.982,0	5.718.902,1
c.	Tanaman Perkebunan/Plantation Crops	7.376.921,6	8.046.070,2	8.544.631,1	9.071.591,6	9.872.258,7
d.	Peternakan/Husbandry	4.004.323,6	4.428.537,6	4.879.078,0	5.499.987,5	6.022.337,8
e.	Jasa Pertanian & Perburuan/Agriculture Services & Hunting	1.178.463,3	1.237.655,4	1.263.078,8	1.293.223,4	1.338.892,7
2	Kehutanan & Penebangan Kayu/Forestry & Logging	1.596.907,1	1.655.743,0	1.776.030,4	1.829.643,8	1.944.107,6
3	Perikanan/Fishery	5.189.338,9	5.474.302,7	5.772.452,9	6.277.470,7	6.631.426,2
B	Pertambangan & Penggalian/Mining & Quarrying	15.363.815,0	14.745.738,5	13.578.025,9	7.341.694,0	6.148.647,4
1	Pertambangan Minyak, Gas & Panas Bumi/Crude Petroleum, Natural Gas, & Geothermal	11.214.339,5	10.620.267,0	9.412.340,0	3.510.614,8	2.799.511,8
2	Pertambangan Batu bara & Lignit/Coal & Lignite Mining	1.298.438,7	1.037.276,0	974.212,8	915.863,9	510.913,3
3	Pertambangan Bijih Logam/Non Ore Mining	1.136.848,9	1.212.257,6	1.138.993,9	766.981,3	584.989,7
4	Pertambangan & Penggalian Lainnya/Other Mining & Quarrying	1.714.187,9	1.875.937,9	2.052.679,2	2.148.063,9	2.253.652,5
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	9.859.254,3	9.759.312,0	9.481.098,7	7.718.443,2	7.356.513,3
1	Industri Batu bara & Pengilangan Migas/Mfg. of Coal & Refined Petroleum Products	4.302.279,7	4.255.347,6	3.534.889,1	1.364.781,1	1.255.763,6
2	Industri Makanan & Minuman/Mfg. of Food Products & Beverages	1.667.582,6	1.859.963,0	2.120.959,6	2.378.221,1	2.642.601,8
3	Industri Pengolahan Tembakau/Mfg. of Tobacco Products	37.785,4	38.984,1	42.608,1	38.717,0	39.062,7
4	Industri Tekstil & Pakaian Jadi/Mfg. of Textiles & Wearing Apparel	9.649,5	10.497,6	11.513,9	12.424,2	14.532,4
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit & Ales Kaki/Mfg. of Leather & Related Products & Footwear	6.873,0	7.127,6	7.235,9	7.165,4	7.445,8
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu & Gabus & Barang Anyaman dari Bambu, Rotan & Sejenisnya/ Mfg. of Wood & Products of Wood & Cork, & Articles of Straw & Plating Materials	31.966,3	32.144,4	35.627,6	40.310,5	46.980,8
7	Industri Kertas & Barang dari Kertas; Percetakan & Reproduksi Media Rekaman/Mfg. of Paper & Paper Products, Printing & Reproduction of Recorded Media	63.478,6	69.049,7	73.452,9	79.480,2	102.766,3
8	Industri Kimia, Farmasi & Obat Tradisional/Mfg. of Chemicals & Pharmaceuticals & Botanical Products	3.100.584,2	2.794.849,1	2.912.010,1	3.048.753,4	2.538.766,4
9	Industri Karet, Barang dari Karet & Plastik/Mfg. of Rubber, Rubber Products & Plastics Products	173.788,9	179.960,2	191.686,2	182.236,9	153.232,0
10	Industri Barang Galian bukan Logam/Mfg. of Other Non-Metallic Mineral Products	157.696,2	177.021,0	191.571,9	214.555,5	226.681,7
11	Industri Logam Dasar/Mfg. of Basic Metals	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik, & Perakitan Listrik/Mfg. of Fabricated Metal Products, Computer, & Optical Products, and Electrical Equipment	28.158,0	30.870,3	31.761,3	32.314,4	32.652,3
13	Industri Mesin & Perlengkapan/Mfg. of Machinery & Equipment	45.964,4	50.394,1	53.308,0	53.924,7	52.529,3
14	Industri Alat Angkutan/Mfg. of Transport Equipment	25.458,2	27.817,0	28.587,4	28.932,2	28.257,5
15	Industri Furnitur/Mfg. of Furniture	203.330,4	220.037,7	239.506,7	230.060,5	208.313,4
16	Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Perbaikan & Pemasangan Mesin & Perakitan/Other Manufacturing, Repair & Installation of Machinery & Equipment	4.758,9	5.268,6	6.109,0	6.566,1	6.927,3
D	Pengadaan Listrik & Gas/Electricity & Gas	120.162,5	121.834,1	135.461,6	147.898,4	166.986,9
1	Kelistrikan/Electricity	88.452,1	67.250,2	79.333,5	95.327,6	119.721,4
2	Pengadaan Gas & Produksi Es/Mfg. of Gas & Production of Ice	51.710,4	54.583,9	56.128,1	52.570,8	47.265,5
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management & Remediation Activities	32.476,2	35.738,8	39.475,2	45.404,3	58.089,5
F	Konstruksi/Construction	9.622.105,0	10.396.155,3	11.482.858,2	12.327.862,0	14.094.508,2
G	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor/Wholesale & Retail Trade; Repair of Motor Vehicles & Motorcycles	16.390.462,2	17.513.910,4	18.970.314,7	20.335.091,5	22.412.215,9
1	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor & Reparasinya/Wholesale & Retail Trade & Repair of Motor Vehicles & Motorcycles	1.582.269,9	1.715.437,0	1.845.962,9	2.022.168,7	2.270.339,0
2	Perdagangan Besar & Eceran, Bukan Mobil & Sepeda Motor/Wholesale Trade & Retail Trade Except of Motor Vehicles & Motorcycles	14.808.192,3	15.798.473,4	17.124.351,8	18.312.922,8	20.141.876,9
H	Transportasi & Pergudangan/Transportation & Storage	8.605.698,1	9.345.929,4	9.847.543,0	10.199.451,7	9.756.328,6
1	Angkutan Rel/Railways Transport	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Angkutan Darat/Land Transport	7.465.876,6	8.020.185,2	8.422.038,2	8.682.229,2	8.198.609,2
3	Angkutan Laut/Sea Transport	233.643,5	257.430,8	268.766,9	285.195,6	182.350,8
4	Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan/River, Lake, & Ferry Transport	7.263,3	8.069,3	9.007,0	10.303,8	12.156,2
5	Angkutan Udara/Air Transport	833.887,1	989.271,8	1.069.449,7	1.164.665,5	1.270.182,8
6	Pergudangan & Jasa Penunjang Angkutan, Pos & Kuri/Warehousing & Support Services for Transportation, Postal & Courier	65.025,5	70.972,1	78.261,2	87.057,6	93.029,6
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum/Accommodation & Food Service Activities	1.145.553,3	1.290.932,1	1.456.284,3	1.633.116,3	1.874.331,3
1	Penyediaan Akomodasi/Accommodation	138.203,2	160.032,9	185.028,6	215.062,1	218.906,1
2	Penyediaan Makan Minum/Food & Beverage Service Activities	1.007.350,1	1.130.899,2	1.271.255,7	1.418.054,1	1.655.425,2
J	Informasi & Komunikasi/Information & Communication	3.741.282,0	3.921.163,3	3.972.744,0	4.102.331,7	4.222.046,0
K	Jasa Keuangan & Asuransi/Financial & Insurance Activities	1.876.869,2	2.106.944,4	2.238.873,4	2.396.954,2	2.701.721,9
1	Jasa Perantara Keuangan/Financial Intermediary Services	1.775.570,0	1.999.369,0	2.125.091,3	2.272.560,0	2.565.446,3
2	Asuransi & Dana Pensiun/Insurance & Pension Fund	33.367,7	35.435,1	37.116,8	41.418,5	48.247,1
3	Jasa Keuangan Lainnya/Other Financial Services	67.205,1	71.368,9	75.885,6	82.097,6	87.106,1
4	Jasa Penunjang Keuangan/Financial Supporting Service	726,4	771,4	806,7	878,1	922,3
L	Retail Retail/Trade Activities	1.470.178,1	1.846.664,9	1.889.449,6	1.889.189,4	1.110.006,4

Lampiran 28 : Produk Domestik Regional Bruto Aceh tahun 2013-2017

LAMPIRAN

Tabel 1. PDRB Provinsi Aceh Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2013-2017 (milyar rupiah);
Table 1. GRDP of Aceh Province at Current Market Prices by Industry, 2013-2017 (billion rupiahs)

Lapangan Usaha/Industry		2013	2014	2015 ^a	2016 ^a	2017 ^{**}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, & Perikanan/Agriculture, Forestry & Fishing	32.254,067	34.376,59	37.590,85	40.245,35	43.404,30
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan & Jasa Pertanian/Agriculture, Husbandry, Hunting & Agriculture Serv.	25.124,02	26.828,11	29.440,51	31.634,66	34.205,98
a.	Tanaman Pangan /Food Crops	6.984,67	7.276,28	8.459,20	8.826,76	9.789,44
b.	Tanaman Hortikultura/Horticultural Crops	4.427,09	4.865,05	5.222,95	5.718,90	6.127,86
c.	Tanaman Perkebunan/Plantation Crops	8.046,07	8.544,63	9.071,59	9.872,26	10.504,92
d.	Peternakan/Husbandry	4.426,54	4.879,08	5.400,52	5.854,16	6.307,96
e.	Jasa Pertanian & Perburuan/Agriculture Services & Hunting	1.237,66	1.263,08	1.306,25	1.360,58	1.475,80
2	Kehutanan & Penebangan Kayu/Forestry & Logging	1.855,74	1.776,02	1.824,86	1.926,49	1.991,80
3	Perikanan/Fishing	5.874,30	5.772,45	6.333,47	6.684,21	7.266,52
B	Pertambangan & Penggalian/Mining & Quarrying	14.745,74	13.578,03	7.495,69	6.397,11	6.796,26
1	Pertambangan Minyak, Gas & Panas Bumi/Crude Petroleum, Natural Gas, & Geothermal	10.620,27	9.412,34	3.647,06	2.978,93	3.403,71
2	Pertambangan Batubara & Lignit/Coal & Lignite Mining	1.037,25	974,21	915,86	542,38	896,96
3	Pertambangan Bijih Logam/Iron Ore Mining	1.212,26	1.198,59	762,22	576,61	411,23
4	Pertambangan & Penggalian Lainnya/Other Mining & Quarrying	1.875,94	2.052,88	2.170,55	2.299,20	2.096,95
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	9.759,31	9.481,10	7.718,44	7.356,58	7.533,24
1	Industri Batubara & Pengilangan Migas/Mfg. of Coal & Refined Petroleum Products	4.255,35	3.534,89	1.364,78	1.255,76	1.352,11
2	Industri Makanan & Minuman/Mfg. of Food Products & Beverages	1.859,96	2.120,96	2.378,22	2.642,60	3.251,19
3	Industri Pengolahan Tembakau/Mfg. of Tobacco Products	38,96	42,61	36,72	39,06	35,49
4	Industri Tekstil & Pakaian Jadi/Mfg. of Textiles, & Wearing Apparel	10,50	11,51	12,42	14,59	15,83
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit & Aas Kulit/Mfg. of Leather & Related Products & Footwear	7,13	7,24	7,17	7,45	6,79
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu & Gabus & Barang Anyaman dari Bambu, Rotan & Sejenisnya/ Mfg. of Wood & Products of Wood & Cork, & Articles of Straw & Plating Materials	32,14	35,63	40,31	46,98	55,01
7	Industri Kertas & Barang dari Kertas; Percetakan & Reproduksi Media Rekaman/Mfg. of Paper & Paper Products, Printing & Reproduction of Recorded Media	69,05	73,45	79,48	102,77	106,94
8	Industri Kimia, Farmasi & Obat Tradisional/Mfg. of Chemicals & Pharmaceuticals & Botanical Products	2.794,85	2.912,01	3.048,75	2.538,77	1.998,16
9	Industri Karet, Barang dari Karet & Plastik/Mfg. of Rubber, Rubber Products & Plastics Products	179,96	191,99	182,04	153,23	138,23
10	Industri Barang Galian bukan Logam/Mfg. of Other Non-Metallic Mineral Products	177,02	191,57	214,56	226,68	235,19
11	Industri Logam Dasar/Mfg. of Basic Metals	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik, & Peralatan Listrik/Mfg. of Fabricated Metal Products, Computer, & Optical Products, and Electrical Equipment	30,87	31,76	32,31	32,65	33,00
13	Industri Mesin & Perlengkapan /Mfg. of Machinery & Equipment	50,39	53,31	53,92	52,53	51,49
14	Industri Alat Angkutan/Mfg. of Transport Equipment	27,82	28,56	28,93	28,28	30,04
15	Industri Furnitur/Mfg. of Furniture	220,04	239,51	230,06	208,31	216,05
16	Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi & Pemasangan Mesin & Peralatan/Other Manufacturing, Repair & Installation of Machinery & Equipment	5,27	6,11	6,57	6,93	7,71
D	Pengadaan Listrik & Gas/Electricity & Gas	121,83	135,46	147,97	168,12	193,20
1	Ketenagalistikan/Electricity	67,25	79,33	95,33	119,72	140,98
2	Pengadaan Gas & Produksi Es/Mfg. of Gas & Production of Ice	54,58	56,13	52,64	48,40	52,22
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management & Remediation Activities	35,74	39,48	45,40	55,74	62,51
F	Konstruksi/Construction	10.396,16	11.482,86	12.327,86	14.094,51	13.767,71
G	Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor/Wholesale & Retail Trade; Repair of Motor Vehicles & Motorcycles	17.513,91	18.970,31	20.335,09	22.412,22	23.841,45
1	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor & Reparasinya/Wholesale & Retail Trade & Repair of Motor Vehicles & Motorcycles	1.715,44	1.845,96	2.022,17	2.270,34	2.240,37
2	Perdagangan Besar & Eceran, Bukan Mobil & Sepeda Motor/Wholesale Trade & Retail Trade Except of Motor Vehicles & Motorcycles	15.798,47	17.124,35	18.312,93	20.141,88	21.601,08
H	Transportasi & Pergudangan/Transportation & Storage	9.345,93	9.847,54	10.179,76	9.746,50	10.189,72
1	Angkutan Rel/Railways Transport	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Angkutan Darat/Land Transport	8.020,19	8.422,04	8.670,13	8.182,25	8.503,38
3	Angkutan Laut/Sea Transport	257,43	268,77	255,20	199,45	196,96
4	Angkutan Sungai Danau & Penyeberangan/River, Lake, & Ferry Transport	8,07	9,01	9,93	11,59	12,91
5	Angkutan Udara/Air Transport	989,27	1.069,45	1.158,32	1.261,23	1.373,59

Lampiran 29 : Produk Domestik Regional Bruto DKI Jakarta tahun 2012

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DKI Jakarta
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2012-2016

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1 488,29	1 628,41	1 718,56	1 867,25	1 985,31
1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	887,74	961,94	1 007,74	1 099,13	1 163,70
a. Tanaman Pangan	24,49	26,35	28,17	31,48	35,81
b. Tanaman Hortikultura Semusim	33,15	35,31	36,57	41,10	44,70
c. Perkebunan Semusim	-	-	-	-	-
d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	745,57	805,74	842,23	919,56	970,78
e. Perkebunan Tahunan	-	-	-	-	-
f. Peternakan	72,97	80,95	86,36	91,24	95,55
g. Jasa Pertanian dan Perburuan	11,55	13,59	14,41	15,75	16,85
2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	-	-	-	-	-
3 Perikanan	600,55	666,47	710,82	768,12	821,61
B Pertambangan dan Penggalian	4 011,42	4 288,00	4 540,98	5 043,04	5 181,43
C Industri Pengolahan	188 822,07	209 488,83	239 228,10	274 522,77	295 043,44
1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	63,73	70,98	83,32	86,85	94,42
2 Industri Makanan dan Minuman	11 112,18	12 564,76	14 427,24	18 506,06	20 559,05
3 Pengolahan Tembaku	-	-	-	-	-
4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	11 234,64	12 290,21	13 395,96	14 888,32	16 702,71
5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	243,46	271,23	292,61	334,75	345,71
6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu	364,03	417,85	464,15	480,19	563,74
7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Re	5 947,66	6 605,17	7 499,32	8 525,99	9 602,10
8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	26 177,13	28 750,63	30 366,27	32 247,29	37 604,76
9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	4 035,80	4 746,78	4 988,62	5 165,01	5 032,50
10 Industri Barang Galian bukan Logam	1 963,57	2 212,57	2 331,45	2 324,36	2 485,20
11 Industri Logam Dasar	6 058,95	6 601,95	7 177,65	7 321,08	7 289,72
12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan	12 953,84	14 954,08	16 283,54	17 904,94	19 363,83
13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	284,23	308,83	355,26	404,42	419,06
14 Industri Alat Angkutan	104 217,88	114 982,42	136 073,45	159 874,84	167 054,58
15 Industri Furnitur	1 972,01	2 233,07	2 581,34	2 850,82	3 531,85
16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan perali	2 199,97	2 488,10	2 907,92	3 607,86	4 394,19
D Pengadaan Listrik, Gas	5 150,90	5 078,08	5 687,25	6 198,80	6 330,89
1 Ketenagalistrikan	1 436,96	1 381,95	1 677,24	2 077,92	2 189,33
2 Gas	3 713,94	3 696,13	4 010,02	4 120,88	4 141,56
E Pengadaan Air	611,52	653,08	702,53	757,21	798,27
F Konstruksi	188 935,08	210 889,99	235 090,03	261 158,15	280 432,27
G Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	224 375,98	281 040,40	304 598,40	330 319,57	358 898,31
1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	37 958,49	45 405,88	52 298,75	50 958,06	54 810,37
2 Perdagangan Besar dan Eceran	186 417,47	215 634,53	252 299,74	279 361,51	304 087,94
H Transportasi dan Pergudangan	37 475,33	44 137,98	54 884,15	66 004,50	76 403,05
1 Angkutan Rel	495,35	561,96	615,59	635,08	681,10
2 Angkutan Darat	17 277,43	21 419,63	25 381,25	31 495,51	35 552,60
3 Angkutan Laut	5 199,09	5 602,56	6 175,36	6 588,61	7 009,20
4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	23,45	24,62	26,03	27,73	29,86
5 Angkutan Udara	191,19	196,81	3 392,06	5 006,96	8 420,11
6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	14 288,82	16 332,39	19 273,85	22 250,60	24 710,18
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	89 531,50	79 798,17	91 228,28	101 818,43	109 181,70
1 Penyediaan Akomodasi	10 446,58	13 238,00	15 507,11	16 411,45	16 728,76
2 Penyediaan Makan Minum	59 084,91	66 560,17	75 719,17	85 406,98	92 452,94
J Informasi dan Komunikasi	102 750,30	115 909,40	128 657,25	141 791,24	157 158,00

Lampiran 30 : Produk Domestik Regional Bruto DKI Jakarta tahun 2013-2017

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi DKI Jakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2013-2017/*Gross Regional Domestic Product of DKI Jakarta Province at Current Market Prices by Industry (Billion Rupiah), 2013-2017*

Lapangan Usaha/Industry		2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry & Fishing	1 628,41	1 717,94	1 863,91	1 980,90	2 060,96
1.	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian/Agriculture, Livestock, Hunting and Agriculture	961,94	1 007,13	1 095,79	1 159,28	1 189,01
a.	Tanaman Pangan/Food Crops	26,35	27,89	30,29	34,47	36,33
b.	Tanaman Hortikultura/Horticultural Crops	841,05	878,80	959,87	1 013,86	1 037,63
c.	Tanaman Perkebunan/Plantation Crops	-	-	-	-	-
d.	Peternakan/Livestock	80,95	86,03	89,87	94,11	97,32
e.	Jasa Pertanian dan Perburuan/Agriculture Services and	13,59	14,41	15,75	16,85	17,73
2.	Kehutanan dan Penebangan Kayu/Forestry and Logging	-	-	-	-	-
3.	Perikanan/Fishery	666,47	710,82	768,12	821,61	871,95
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining & Quarrying	4 288,00	4 540,96	5 043,04	5 181,43	5 746,50
1.	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi/ Crude Petroleum, Natural Gas, and Geothermal	3 742,42	3 954,10	4 396,40	4 606,60	5 168,19
2.	Pertambangan Batubara dan Lignit/Coal and Lignite Mining	-	-	-	-	-
3.	Pertambangan Bijih Logam/Iron Ore Mining	-	-	-	-	-
4.	Pertambangan dan Penggalian Lainnya/Other Mining and Quarrying	545,58	586,86	646,65	574,84	578,30
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	209 498,63	239 229,10	274 513,85	295 095,47	323 932,12
1.	Industri Batubara dan Pengilangan Migas/Manufacture of Coal and Refined Petroleum Products	70,98	83,32	86,85	94,42	98,87
2.	Industri Makanan dan Minuman/Manufacture of Food Product and Beverages	12 584,76	14 427,24	18 506,06	20 559,05	24 036,98
3.	Industri Pengolahan Tembakau/Manufacture of Tobacco Product	-	-	-	-	-
4.	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi/Manufacture of Textiles;and Wearing Apparel	12 290,21	13 396,96	14 888,32	16 702,71	18 629,06
5.	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki/Manufacture of Leather and Related Product and Footwear	271,23	292,61	334,75	348,39	379,36
6.	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya/Manufacture of Wood and of Product of Wood and Cork, and Articles of Straw and Plaiting	417,85	464,15	480,19	563,74	674,63
7.	Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman/Manufacture of Paper and Paper Products, Printing and Reproduction of Recorded Media	6 605,17	7 499,32	8 525,99	9 602,10	11 527,70
8.	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional /Manufacture of Chemicals and Pharmaceuticals and Botanical Products	28 750,63	30 366,27	32 247,29	37 549,84	38 819,79
9.	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik/Manufacture of Rubber, Rubber Products and Plastics Products	4 746,78	4 988,62	5 156,08	5 099,45	5 679,34
10.	Industri Barang Galian bukan Logam/Manufacture of Other Non- Metallic Mineral Products	2 212,57	2 331,45	2 324,36	2 485,20	2 699,89
11.	Industri Logam Dasar/Manufacture of Basic Metals	6 601,95	7 177,65	7 321,08	7 290,88	8 708,53

Lampiran 31 : Produk Domestik Regional Bruto Sulawesi Selatan tahun 2012

Tabel Lampiran

TABEL 1.1 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA PROVINSI SULAWESI SELATAN ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2012-2016 (Miliar Rp)

Lapangan Usaha/Industry	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry and Fishing	61,414.8	67,387.1	83,486.4	78,736.4	88,314.1
1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian/Agriculture, Livestock, Hunting and Agriculture Services	36,183.6	39,230.7	45,361.1	50,897.2	57,110.8
a. Tanaman Pangan/Food Crops	19,481.0	20,645.2	23,220.3	25,979.1	29,586.7
b. Tanaman Hortikultura/Horticultural Crops	3,183.1	3,484.0	3,980.2	4,434.8	4,927.3
c. Tanaman Perkebunan/Plantation Crops	9,994.5	11,079.9	13,598.4	15,494.1	16,907.4
d. Peternakan/Livestock	2,537.6	2,921.2	3,317.4	3,674.1	4,228.0
e. Jasa Pertanian dan Perburuan/Agriculture Services and Hunting	987.3	1,100.5	1,244.8	1,315.2	1,461.4
2 Kehutanan dan Penebangan Kayu/Forestry and Logging	213.0	230.8	247.8	257.8	256.0
3 Perikanan/Fishery	15,018.2	17,905.6	22,856.6	27,580.5	30,947.3
B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	18,178.2	17,888.8	21,182.0	21,621.0	21,226.9
1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi/Crude Petroleum, Natural Gas, and Geothermal	2,057.2	2,317.8	2,813.4	2,727.9	2,472.7
2 Pertambangan Batu bara dan Lignite/Coal and Lignite Mining	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3 Pertambangan Bijih Logam/iron Ore Mining	10,030.0	10,631.6	11,971.8	10,851.1	9,915.2
4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya/Other Mining and Quarrying	4,090.4	4,933.9	6,396.8	7,842.0	8,838.0
C Industri Pengolahan/Manufacturing	30,788.8	36,488.8	41,862.1	47,260.1	62,787.9
1 Industri Batu bara dan Pengilangan Migas/Manufacture of Coal and Refined Petroleum Products	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2 Industri Makanan dan Minuman/Manufacture of Food Products and Beverages	14,013.3	16,262.4	19,601.7	23,137.4	26,491.3
3 Industri Pengolahan Tembakau/Manufacture of Tobacco Products	33.6	39.4	46.8	53.1	52.9
4 Industri Tekstil dan Pakain Jadi/Manufacture of Textiles and Wearing Apparel	29.2	33.2	36.5	39.9	43.2
5 Industri Kulit Barang dari Kulit dan Aas Kulit/Manufacture of Leather and Related Products and Footwear	174.7	198.7	217.9	227.2	253.3
6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Betyan/Manufacture of Wood and of Products of Wood and Cork, and Articles of Straw and Plating Materials	549.6	581.8	639.8	679.4	765.2
7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman/Manufacture of Paper and Paper Products, Printing and Reproduction of Recorded Media	278.7	307.1	369.3	401.1	378.4
8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional/Manufacture of Chemicals and Pharmaceuticals and Botanical Products	25.4	26.9	27.7	31.7	33.3
9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik/Manufacture of Rubber, Rubber Products and Plastics Products	111.1	117.7	120.1	124.9	127.3
10 Industri Barang Galian bukan Logam/Manufacture of Other Non-Metallic Mineral Products	14,314.5	16,527.9	19,084.0	20,879.8	22,857.1
11 Industri Logam Dasar/Manufacture of Basic Metals	215.3	227.9	254.7	280.0	293.7
12 Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik/Manufacture of Fabricated Metal Products, Computer, and Optical Products, and Electrical Equipment	925.5	1,029.7	1,110.1	1,236.6	1,313.4
13 Industri Mesin dan Peralengkapan/Manufacture of Machinery and Equipment	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14 Industri Alat Angkutan/Manufacture of Transport Equipment	45.8	47.8	53.3	58.0	52.3
15 Industri Furnitur/Manufacture of Furniture	33.4	35.4	38.9	46.0	48.4
16 Industri Pengolahan Lainnya; Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan/Other Manufacturing, Repair and Installation of Machinery and Equipment	48.5	50.9	51.4	53.0	58.1
D Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	178.7	177.4	204.8	189.6	218.9
1 Kelengkapan Listrik/Electricity	170.8	170.5	196.5	184.4	209.9
2 Pengadaan Gas dan Produksi Es/Manufacture of Gas and Production of Ice	5.9	6.9	8.1	9.1	10.0
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities	308.6	364.8	364.8	388.3	384.0
F Konstruksi/Construction	28,680.7	31,618.2	38,016.4	42,181.4	47,601.1
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	30,864.8	33,833.6	37,823.8	43,788.7	60,838.8
1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasi/Wholesale and Retail Trade and Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	7,091.1	8,149.7	9,028.1	10,321.5	11,634.7
2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale Trade and Retail Trade Except of Motor Vehicles and Motorcycles	23,563.2	25,483.7	28,595.7	33,467.2	39,202.1
H Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	8,980.8	10,428.6	11,827.8	14,246.7	18,170.6
1 Angkutan Rel/Railways Transport	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2 Angkutan Darat/Land Transport	2,867.0	3,405.2	4,155.7	5,307.1	5,518.2
3 Angkutan Laut/Sea Transport	625.5	675.1	858.8	898.8	889.8
4 Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan/River, Lake, and Ferry Transport	268.0	292.1	356.7	408.0	448.1
5 Angkutan Udara/Air Transport	3,930.7	4,621.7	4,884.9	5,828.6	7,253.2
6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir/Warehousing and Support Services for Transportation, Postal and Courier	1,269.7	1,432.3	1,571.7	1,803.4	2,061.1
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	3,145.4	3,684.0	4,108.4	4,648.0	4,881.4
1 Penyediaan Akomodasi/Accommodation	879.3	758.2	816.2	877.6	993.9
2 Penyediaan Makan Minum/Food and Beverage Service Activities	2,466.0	2,925.7	3,292.2	3,671.3	3,997.5
J Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	12,128.4	13,786.1	14,684.8	16,716.2	17,573.8
K Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	8,240.8	8,687.1	10,823.8	12,266.8	14,336.6
1 Jasa Perantara Keuangan/Financial Intermediary Services	5,765.9	6,582.1	7,162.1	7,955.4	9,465.7
2 Asuransi dan Dana Pensiun/Insurance and Pension Fund	239.6	291.9	354.6	417.5	464.6
3 Jasa Keuangan Lainnya/Other Financial Services	2,206.4	2,687.3	3,265.2	3,833.8	4,401.9
4 Jasa Penunjang Keuangan/Financial Supporting Service	29.0	35.8	41.8	47.9	53.2
L Real Estate/Real Estate Activities	8,921.8	9,808.8	11,623.1	13,686.8	16,086.6

Lampiran 32 : Produk Domestik Regional Bruto Sulawesi Selatan tahun 2013-2017

LAMPIRAN

Tabel 1 Produk Domestik Regional Bruto Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2013–2017
Table 1 *Gross Domestic Regional Product of Sulawesi Selatan at Current Market Prices by Industry (Billion Rupiah), 2013–2017*

Kategori / Category	Lapangan Usaha / Industry	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan / Agriculture, Forestry & Fishery	57,367.11	68,465.44	78,781.76	88,328.46	95,895.43
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian / Agriculture, Livestock, Hunting and Agriculture Services	39,230.71	45,361.06	50,943.52	57,156.41	60,735.86
	a. Tanaman Pangan / Food Crops	20,645.21	23,220.31	26,025.46	29,661.83	31,512.94
	b. Tanaman Hortikultura / Horticultural Crops	3,483.96	3,980.21	4,434.76	4,927.31	5,162.11
	c. Tanaman Perkebunan / Plantation Crops	11,079.87	13,598.44	15,494.09	16,907.44	17,844.51
	d. Peternakan / Livestock	2,921.17	3,317.36	3,674.05	4,198.43	4,582.58
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan / Agriculture Services and Hunting	1,100.50	1,244.75	1,315.16	1,461.39	1,633.72
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu / Forestry and Logging	230.79	247.81	257.75	257.34	272.68
	3. Perikanan / Fishery	17,905.62	22,856.57	27,580.49	30,914.72	34,886.88
B	Pertambangan dan Penggalian / Mining & Quarrying	17,883.29	21,181.98	21,521.03	21,231.33	22,474.98
	1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi / Crude Petroleum, Natural Gas, and Geothermal	2,317.81	2,813.41	2,727.89	2,478.13	2,429.24
	2. Pertambangan Batubara dan Lignit / Coal and Lignite Mining	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3. Pertambangan Bijih Logam / Iron Ore Mining	10,631.58	11,971.75	10,951.15	9,915.20	10,581.02
	4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya / Other Mining and Quarrying	4,933.91	6,396.82	7,842.00	8,838.01	9,464.72
C	Industri Pengolahan / Manufacturing	35,486.79	41,652.14	47,250.08	53,017.47	57,449.33
	1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas / Manufacture of Coal and Refined Petroleum Products	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Industri Makanan dan Minuman / Manufacture of Food Product and Beverages	16,262.37	19,601.69	23,137.40	26,377.77	30,043.94
	3. Industri Pengolahan Tembakau / Manufacture of Tobacco Product	39.41	46.78	55.06	52.89	67.04
	4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi / Manufacture of Textiles; and Wearing Apparel	33.24	36.45	39.92	43.24	45.90

Lampiran 33 : Produk Domestik Regional Bruto Sulawesi Utara tahun 2012

Lampiran 1 Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2012–2016
Appendix Gross Regional Domestic Product of Sulawesi Utara Province at Current Prices by Industry, (million rupiahs), 2012-2016

Kategori	Lapangan Usaha / Industry	2012	2013	2014*	2015**	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan / Agriculture Forestry & Fishing	14.149.796	15.791.586	17.799.997	19.828.896	21.822.727
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian / Agriculture, Livestock, Hunting & Agriculture Services	8.914.530	9.832.299	10.745.810	12.275.087	13.689.257
a.	Tanaman Pangan / Food Crops	2.585.482	2.723.855	2.862.380	3.162.494	3.489.203
b.	Tanaman Hortikultura / Horticultural Crops	1.434.320	1.581.491	1.759.579	2.166.636	2.618.786
c.	Tanaman Perkebunan / Plantation Crops	3.453.157	3.926.658	4.304.873	4.774.443	5.126.243
d.	Peternakan / Livestock	1.280.917	1.419.493	1.636.185	1.947.959	2.204.294
e.	Jasa Pertanian & Perburuan / Agricultural Services & Hunting	160.654	180.802	182.794	223.556	250.731
2	Kehutanan & Penebangan Kayu / Forestry & Logging	413.788	452.647	435.064	460.570	503.813
3	Perikanan / Fishery	4.821.478	5.506.641	6.619.123	7.091.239	7.629.657
B	Pertambangan dan Penggalian / Mining & Quarrying	3.181.284	3.511.840	3.837.734	4.333.252	4.846.355
1	Pertambangan Minyak, Gas & Panas Bumi / Crude Petroleum, Natural Gas & Geothermal	178.717	186.801	187.112	214.522	154.041
2	Pertambangan Batubara & Lignit/ Coal & Lignite Mining	-	-	-	-	-
3	Pertambangan Bijih Logam / Iron Ore Mining	648.864	717.258	789.634	926.393	1.204.636
4	Pertambangan & Penggalian lainnya / Other Mining & quarrying	2.333.703	2.607.781	2.860.988	3.192.336	3.487.678
C	Industri Pengolahan / Manufacturing Industry	6.792.432	7.267.815	7.919.923	8.626.556	9.042.740
D	Pengadaan Listrik dan Gas / Electricity & Gas Supply	48.679	53.061	61.207	76.843	87.898
1	Ketenagalistrikan / Electricity	46.054	50.039	57.770	72.840	83.693
2	Pengadaan Gas & Produksi Es / Gas Supply & Production of Ice	2.624	3.022	3.437	4.003	4.203
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang / Water Supply, Sewerage, Waste Management & Remedial Activities	92.297	101.834	111.856	120.715	130.817
F	Konstruksi / Construction	7.720.089	8.449.422	9.266.867	10.527.641	11.449.562
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor / Wholesale & Retail Trade; Repair of Motor Vehicle & Motorcycles	7.895.933	8.851.845	9.915.380	11.281.814	12.173.586
H	Transportasi & Pergudangan / Transportation & Warehousing	5.171.513	6.148.888	7.934.836	9.694.432	11.087.353
1	Angkutan Rel / Railways Transport	-	-	-	-	-
2	Angkutan Darat / Land Transport	3.190.233	3.776.964	4.718.562	5.734.493	6.287.429
3	Angkutan Laut / Sea Transport	837.899	978.397	1.288.453	1.530.406	1.707.087
4	Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan / River, Lake & Ferry Transport	17.725	20.372	24.493	28.055	30.078
5	Angkutan Udara / Air Transport	923.954	1.147.420	1.636.357	2.092.076	2.715.375
6	Pengudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir / Warehousing & Support Services for Transportation, Postal & Courier	201.702	225.735	266.771	309.402	347.384
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum / Accommodation & Food Services Activities	1.312.005	1.458.840	1.681.148	1.950.577	2.262.793
1	Penyediaan Akomodasi / Accommodation	830.804	934.904	1.072.890	1.242.714	1.456.260
2	Penyediaan Makan Minum / Food Services	481.201	523.936	608.258	716.862	806.533
J	Informasi dan Komunikasi / Information & Communication	2.540.853	2.755.363	3.044.801	3.490.927	3.887.455

Lampiran 34 : Produk Domestik Regional Bruto Sulawesi Utara tahun 2013-2017

LAMPIRAN

Lampiran 1. PDRB Provinsi Sulawesi Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2013–2017

Appendix 1. GRDP of Sulawesi Utara Province at Current Market Prices by Industry (Million Rupiah), 2013–2017

Lapangan Usaha/Industry		2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry and Fishery	15.791.586	17.799.997	19.769.208	21.828.241	23.704.397
1.	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian/Agriculture, Livestock, Hunting and Agricultural Services	9.832.299	10.745.810	12.230.399	13.693.272	14.838.985
a.	Tanaman Pangan/Food Crops	2.723.855	2.862.380	3.149.944	3.489.203	3.823.007
b.	Tanaman Hortikultura/Horticultural Crops	1.581.491	1.759.579	2.146.486	2.621.886	2.815.479
c.	Tanaman Perkebunan/Plantation Crops	3.926.658	4.304.872	4.762.455	5.127.157	5.534.464
d.	Peternakan/Livestock	1.419.493	1.636.185	1.947.959	2.204.294	2.398.724
e.	Jasa Pertanian dan Perburuan/Agricultural Services and Hunting	180.802	182.794	223.556	250.731	267.311
2.	Kehutanan dan Penebangan Kayu/Forestry and Logging	452.647	435.064	460.570	503.813	499.616
3.	Perikanan/Fishery	5.506.641	6.619.123	7.078.239	7.631.157	8.365.795
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	3.511.840	3.837.734	4.333.252	4.846.605	5.329.459
1.	Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi/ Crude Petroleum, Natural Gas, and Geothermal Mining	186.801	187.112	214.522	154.291	280.188
2.	Pertambangan Batubara dan Lignit/Coal and Lignite Mining	-	-	-	-	-
3.	Pertambangan Bijih Logam/Metal Ores Mining	717.258	789.634	926.393	1.204.636	1.409.147
4.	Pertambangan dan Penggalian Lainnya/Other Mining and Quarrying	2.607.781	2.860.988	3.192.336	3.487.678	3.640.125
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	7.267.615	7.919.923	8.625.276	9.052.062	10.310.606
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas Supply	53.061	61.207	76.843	87.897	104.622
1.	Ketenagalistrikan/Electricity	50.039	57.770	72.840	83.693	100.043
2.	Pengadaan Gas dan Produksi Es/ Gas Supply and Production of Ice	3.022	3.437	4.003	4.203	4.578
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/Water supply, Sewerage, Waste Management and Remedial Activities	101.634	111.859	120.715	130.617	135.448
F	Konstruksi/Construction	8.449.422	9.266.867	10.544.039	11.451.160	12.647.445
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	8.851.845	9.915.380	11.242.304	12.174.486	13.366.668
1.	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya/Wholesale and Retail Trade and Repair and Maintenance of Motor Vehicles and Motorcycles	3.594.890	3.941.759	4.353.831	4.863.205	5.295.800
2.	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade Except of Motor Vehicles and Motorcycles	5.256.956	5.973.622	6.888.473	7.311.281	8.070.868
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Warehousing	6.148.888	7.934.636	9.682.482	11.084.253	11.974.627
1.	Angkutan Rel/Railways Transport	-	-	-	-	-
2.	Angkutan Darat/Land Transport	3.776.964	4.718.562	5.734.493	6.284.329	6.815.170
3.	Angkutan Laut/Sea Transport	978.397	1.288.453	1.525.506	1.707.087	1.813.809
4.	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan/River, Lake, and Ferry Transport	20.372	24.493	28.005	30.078	31.466
5.	Angkutan Udara/Air Transport	1.147.420	1.636.357	2.085.076	2.715.375	2.921.999
6.	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan Kurir/Warehousing and Support Services for Transportation; Postal and Courier	225.735	286.771	309.402	347.384	392.184
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities	1.458.840	1.681.148	1.959.577	2.260.293	2.445.734
1.	Penyediaan Akomodasi/Accommodation	934.904	1.072.890	1.242.714	1.453.760	1.574.219
2.	Penyediaan Makan Minum/Food and Beverage Service Activities	523.936	608.258	716.862	806.533	871.515

Lampiran 35 : Produk Domestik Regional Bruto Kalimantan Timur tahun 2012

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2012–2016

	Kategori	2012	2013	2014	2015*	2016**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	27 543 007,7	29 348 936,2	36 948 241,9	37 778 646,6	40 855 041,0
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	16 186 780,5	17 431 054,5	24 004 081,3	23 502 191,8	26 213 991,5
	a. Tanaman Pangan	1 063 533,6	1 118 191,5	1 189 250,2	1 233 980,0	990 439,7
	b. Tanaman Hortikultura	1 307 967,9	1 374 413,2	1 474 270,9	1 601 611,8	1 731 496,1
	c. Tanaman Perkebunan	12 435 225,5	13 443 066,6	19 775 586,3	18 968 882,1	21 625 779,2
	d. Peternakan	1 201 470,7	1 300 886,8	1 345 398,7	1 484 636,0	1 633 450,1
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	178 582,7	194 496,4	219 575,2	213 082,0	232 826,3
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	5 985 758,2	5 775 885,5	6 108 475,9	6 708 033,3	6 799 526,2
	3. Perikanan	5 370 469,0	6 141 996,2	6 835 684,7	7 568 421,5	7 841 523,3
B	Pertambangan dan Penggalian	287 478 744,5	286 637 783,2	264 883 355,1	227 448 003,6	219 760 099,5
	1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	80 943 651,3	75 196 541,9	67 787 877,5	47 102 114,9	43 494 880,2
	2. Pertambangan Batubara dan Lignit	193 510 671,4	197 396 725,0	181 468 543,1	163 073 486,1	157 350 866,6
	3. Pertambangan Bijih Logam	540 637,4	515 802,4	434 550,0	434 231,6	463 884,9
	4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya	12 483 784,4	13 528 713,9	15 192 384,5	16 838 171,0	18 450 467,8
C	Industri Pengolahan	88 586 161,7	93 315 498,6	101 933 498,1	103 802 236,0	103 992 711,8
	1. Industri Batubara dan Pengilangan Migas	60 789 304,3	62 206 924,8	68 565 010,5	66 815 334,7	64 542 529,7
	2. Industri Makanan dan Minuman	8 011 059,4	8 701 160,1	10 497 092,0	10 786 492,5	12 284 828,8
	3. Industri Pengolahan Tembakau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4. Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	56 963,4	64 551,8	72 079,5	77 154,8	84 012,2
	5. Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	13 835,7	15 618,4	17 912,2	18 308,4	20 232,5
	6. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	3 285 665,8	3 239 940,2	3 301 292,1	3 458 708,6	3 614 541,1
	7. Industri Kertas dan Barang dari Kertas; Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	2 166 139,1	2 273 710,4	2 416 591,2	2 712 903,1	2 954 231,1
	8. Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	11 940 639,4	14 253 595,7	14 136 032,7	16 776 440,0	17 132 330,5
	9. Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	157 087,6	159 174,6	158 653,2	161 984,3	161 243,5
	10. Industri Barang Galian bukan Logam	414 433,7	462 876,6	532 243,0	585 858,8	645 879,0
	11. Industri Logam Dasar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	12. Industri Barang Logam; Komputer, Barang Elektronik, Optik; dan Peralatan Listrik	508 274,3	549 069,5	633 869,4	711 600,6	771 575,7
	13. Industri Mesin dan Peralengkapan	96 663,5	106 577,8	126 565,6	134 508,8	147 262,0

Lampiran 36 : Produk Domestik Regional Bruto Kalimantan Timur tahun 2013 – 2017

LAMPIRAN

Tabel 1. PDRB Provinsi Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2013–2017
(Miliar Rupiah)

LAPANGAN USAHA		2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	115 190,25	121 418,98	125 487,51	134 915,80	146 366,37
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa	100 013,36	104 363,81	106 450,87	114 854,91	124 848,81
a	Tanaman Pangan	18 245,91	18 781,53	21 422,77	24 357,80	25 102,49
b	Tanaman Hortikultura	12 520,36	12 904,32	13 577,11	14 545,13	15 491,12
c	Tanaman Perkebunan	59 743,50	62 076,58	59 807,97	63 172,86	70 307,07
d	Peternakan	8 554,13	9 567,11	10 500,23	11 545,64	12 547,91
e	Jasa Pertanian dan Perburuan	949,46	1 034,27	1 142,80	1 233,47	1 400,22
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	4 559,02	5 025,87	5 504,02	5 421,52	5 453,69
3	Perikanan	10 817,87	12 029,30	13 532,63	14 639,37	16 063,87
B	Pertambangan dan Penggalian	6 581,44	6 899,06	7 662,92	8 474,41	8 870,35
1	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	684,15	735,13	712,79	655,79	665,15
2	Pertambangan Batubara dan Lignit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pertambangan Bijih Logam	1 466,26	1 407,62	1 563,98	1 677,78	1 734,66
4	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	4 431,04	4 756,31	5 386,15	6 140,83	6 470,53
C	Industri Pengolahan	93 241,47	104 239,00	115 720,02	125 513,75	138 823,78
1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	17,72	19,36	18,87	18,28	18,59
2	Industri Makanan dan Minuman	61 870,47	70 123,04	79 961,49	87 757,85	99 152,01
3	Pengolahan Tembaku	1 560,27	1 793,35	1 877,46	2 116,95	2 377,66
4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	276,61	298,02	330,78	354,91	359,80
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	344,22	370,52	402,02	431,96	439,31
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus	1 298,10	1 388,22	1 531,96	1 524,49	1 627,59
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas	1 434,85	1 492,18	1 637,25	1 760,25	2 004,86
8	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	3 357,30	3 501,76	3 285,89	3 408,56	3 619,45
9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	8 073,61	9 010,16	9 100,46	9 455,70	10 310,77
10	Industri Barang Galian bukan Logam	1 769,74	2 004,95	2 262,17	2 447,60	2 461,22
11	Industri Logam Dasar	11 196,17	12 044,57	12 948,91	13 690,04	13 763,60
12	Industri Barang dari Logam, Komputer,	980,35	1 020,72	1 095,09	1 186,35	1 327,46
13	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	300,45	335,16	370,22	408,66	446,92
14	Industri Alat Angkutan	69,28	77,54	83,75	89,35	85,83
15	Industri Furnitur	624,93	683,08	729,35	775,51	735,20
16	Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan	67,39	76,39	84,36	87,30	93,52
D	Pengadaan Listrik, Gas	597,74	642,53	639,59	668,83	788,34
1	Ketenagalistrikan	331,53	385,00	408,50	440,35	502,35
2	Gas	266,21	257,53	231,09	228,48	312,40
E	Pengadaan Air	441,82	501,06	572,26	654,34	766,84
F	Konstruksi	60 232,62	69 460,77	77 801,96	84 232,50	92 589,58
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi	78 324,82	89 597,00	99 822,01	114 009,27	122 584,63
1	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan	7 179,79	8 134,96	8 147,49	8 742,93	9 216,37
2	Perdagangan Besar dan Eceran	71 145,03	81 462,04	91 674,52	105 266,34	113 368,26
H	Transportasi dan Pergudangan	22 990,25	25 898,44	28 511,91	31 832,84	34 277,08
1	Angkutan Rel	100,94	117,39	135,32	152,51	168,62
2	Angkutan Darat	11 212,22	13 006,11	14 414,47	16 280,16	17 697,49
3	Angkutan Laut	2 562,36	2 542,79	2 632,23	2 548,41	2 576,71
4	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	135,67	156,58	180,64	192,58	199,51
5	Angkutan Udara	4 291,02	4 650,01	4 957,36	5 719,04	5 840,83
6	Perhubungan dan Jasa Penunjang Angkutan	4 688,05	5 425,55	6 191,90	6 940,14	7 793,92

Lampiran 37 : Produk Domestik Regional Bruto Bali tahun 2012

Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Bali Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah), 2012-2016

Kategori	Uraian	2012	2013	2014	2015*	2016**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.518.184,6	20.451.528,1	22.912.353,0	26.255.423,9	28.795.929,46
	1 Pertanian, Perikanan, Perburuan dan Jasa Pertanian	13.312.606,1	14.733.387,8	16.227.339,1	18.705.385,4	20.306.905,30
	a. Tanaman Pangan	3.247.046,1	3.387.851,7	3.521.848,9	3.978.836,6	4.195.910,42
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	292.807,7	304.374,4	331.810,2	373.085,0	430.928,06
	c. Perkebunan Semusim	35.978,3	38.203,8	38.873,4	43.709,1	49.907,04
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	2.098.744,9	2.320.892,0	2.643.617,6	3.425.767,0	3.690.940,75
	e. Perkebunan Tahunan	1.875.046,4	1.995.799,4	2.159.796,5	2.587.665,5	2.861.543,39
	f. Perikanan	5.504.850,2	6.396.066,7	7.212.230,3	7.905.016,7	8.618.913,53
	g. Jasa Perikanan dan Perburuan	258.126,6	290.369,9	319.162,3	389.308,5	458.762,11
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	5.670,0	6.232,4	6.652,7	8.003,8	9.017,66
	3 Perikanan	5.199.906,4	5.711.937,9	6.678.161,2	7.541.011,7	8.480.006,51
B	Pertambangan dan Penggalian	1.548.326,7	1.750.245,3	1.955.757,7	1.951.951,8	2.095.830,37
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	2 Pertambangan Batu bara dan Lignit	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	3 Pertambangan Bijih Logam	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	1.548.326,7	1.750.245,3	1.955.757,7	1.951.951,8	2.095.830,37
C	Industri Pengolahan	7.699.337,9	8.656.387,7	9.984.338,7	11.544.672,2	12.423.278,89
	1 Industri Batu bara dan Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	a. Industri Batu Bara	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	b. Industri Pengilangan Migas	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	2 Industri Makanan dan Minuman	2.899.671,6	3.247.065,0	3.824.332,7	4.472.630,2	4.872.781,90
	3 Pengolahan Tembaku	39.789,7	43.965,6	52.615,9	59.082,9	69.003,77
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	515.924,0	569.946,0	631.522,4	744.936,4	830.910,55
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	253.609,4	285.521,9	313.543,2	344.837,7	350.728,32
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	2.455.806,1	2.771.419,4	3.176.970,9	3.616.620,5	3.796.163,61
	7 Industri Kerajinan dan Barang dari Kerajinan, Persebaran dan Reproduksi Media Reklamasi	35.411,9	36.460,8	38.163,2	43.625,3	46.932,17
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	94.753,6	104.272,0	113.901,0	130.009,8	133.175,95
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	174.638,3	191.282,6	207.823,0	219.242,3	227.809,14
	10 Industri Barang Gelas bukan Logam	390.377,9	465.679,3	537.786,1	629.323,0	697.996,67
	11 Industri Logam Dasar	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	101.036,3	110.879,1	120.099,7	138.974,5	152.077,61
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	6.285,4	6.566,6	7.016,7	7.195,1	7.165,03
	14 Industri Alat Angkutan	2.674,5	2.989,2	3.261,7	3.701,7	3.828,80
	15 Industri Furnitur	505.507,4	581.599,0	686.478,0	834.816,4	920.914,70
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	229.850,0	238.711,2	270.624,2	299.676,5	313.988,27
D	Pengadaan Listrik dan Gas	180.884,8	175.411,5	240.675,4	326.824,2	419.189,37
	1 Ketenagalistrikan	178.096,3	172.285,9	237.107,6	322.265,9	414.449,95
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	2.788,6	3.125,6	3.567,9	4.558,2	4.739,42
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	246.476,4	262.977,9	286.673,6	326.072,1	358.111,77
F	Konstruksi	11.959.011,1	13.250.591,5	14.114.257,0	15.835.024,4	17.218.563,50
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.036.397,5	11.173.464,3	12.926.739,4	14.713.877,9	16.209.453,17
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	2.442.942,4	2.799.031,7	3.063.187,4	3.505.031,4	3.900.915,34
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	7.593.455,2	8.374.432,6	9.863.552,0	11.208.846,5	12.308.537,83
H	Transportasi dan Pergudangan	9.364.595,8	11.310.696,3	14.203.195,4	16.443.175,8	18.513.153,97
	1 Angkutan Rel	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	2 Angkutan Darat	1.060.077,2	1.251.178,5	1.475.485,3	1.585.686,0	1.692.575,28
	3 Angkutan Laut	176.890,8	197.043,9	243.541,2	262.173,1	271.907,18
	4 Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	1.969.334,4	2.360.691,4	3.021.569,1	3.599.610,3	3.822.711,08
	5 Angkutan Udara	4.990.167,1	6.220.593,0	8.070.536,4	9.455.665,0	10.969.319,91
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	1.168.126,4	1.261.189,6	1.392.063,4	1.540.036,4	1.756.640,50
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	23.975.775,4	28.936.175,1	36.131.578,6	40.554.457,5	44.594.364,61
	1 Penyediaan Akomodasi	14.165.672,7	17.946.965,0	23.557.176,1	26.448.135,4	28.773.298,48
	2 Penyediaan Makan Minum	9.810.102,6	10.989.190,1	12.574.402,5	14.106.322,1	15.821.066,13
J	Informasi dan Komunikasi	6.938.730,8	7.312.441,4	8.034.798,2	9.140.532,8	10.055.321,30

Lampiran 38 : Produk Domestik Regional Bruto Bali tahun 2013-2017

Tabel 5.1 Produk Domestik Regional Bruto Bali Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2013–2017

Table 5.1 Gross Regional Domestic Product of Bali at Current Market Prices by Industry (Million Rupiah), 2013–2017

Kategori Category	Lapangan Usaha Industry	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ Agriculture, Forestry & Fishing	20 451.53	22 912.35	25 843.65	28 546.38	30 901.94
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian/Agriculture, Livestock, Hunting and Agriculture Services	14 733.36	16 227.34	18 494.65	20 088.42	21 476.77
	a. Tanaman Pangan/Food Crops	3 387.85	3 521.85	3 878.69	4 087.42	4 153.32
	b. Tanaman Hortikultura Semusim/Seasonal Horticultural Crops	304.37	331.81	371.67	430.93	432.87
	c. Perkebunan Semusim/Seasonal Planta- tion Crops	38.20	38.87	43.71	49.91	52.13
	d. Tanaman Hortikultura Setahun/Annual Horticultural Crops	2 320.69	2 643.62	3 425.77	3 690.94	3 780.95
	c. Perkebunan Tahunan/Annual Plantation Crops	1 995.80	2 159.80	2 577.67	2 861.54	3 072.01
	d. Peternakan/Livestock	6 396.07	7 212.23	7 808.02	8 508.91	9 498.56
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan/Agricul- ture Services and Hunting	290.37	319.16	389.23	458.76	486.92
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu/Forestry and Logging	6.23	6.85	7.99	9.02	9.76
	3. Perikanan/Fishery	5 711.94	6 678.16	7 341.01	8 448.94	9 415.41
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining & Quarrying	1 758.25	1 955.76	1 951.95	2 095.83	2 108.91
	1. Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi/ Crude Petroleum, Natural Gas, and Geothermal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Pertambangan Batubara dan Lignit/Coal and Lignite Mining	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3. Pertambangan Bijih Logam/Iron Ore Mining	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4. Pertambangan dan Penggalian Lainnya/	1 758.25	1 955.76	1 951.95	2 095.83	2 108.91

Lampiran 39 : Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Utara tahun 2012

Tabel 5.1. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2012–2016 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	103.933,11	115.190,25	121.418,98	125.902,71	136.048,21
1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan	90.538,10	100.013,36	104.363,81	106.886,16	115.763,02
a Tanaman Pangan	16.890,74	18.245,91	18.781,53	21.352,77	24.199,19
b Tanaman Hortikultura	11.508,50	12.520,36	12.904,32	13.686,31	14.543,61
c Tanaman Perkebunan	53.495,71	59.743,50	62.076,58	60.205,76	64.146,36
d Peternakan	7.790,78	8.554,13	9.567,11	10.524,63	11.644,24
e Jasa Pertanian dan Perburuan	852,37	949,46	1.034,27	1.116,70	1.229,62
2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	4.112,72	4.559,02	5.025,87	5.483,92	5.645,82
3 Perikanan	9.282,29	10.617,87	12.029,30	13.532,63	14.639,37
B Pertambangan dan Pengalihan	4.848,02	6.581,44	6.899,06	7.662,92	8.474,41
1 Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	623,70	684,15	735,13	712,79	655,79
2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pertambangan Bijih Logam	353,73	1.466,26	1.407,62	1.563,98	1.677,78
4 Pertambangan dan Pengalihan Lainnya	3.870,59	4.431,04	4.756,31	5.386,15	6.140,83
C Industri Pengolahan	86.171,93	93.241,47	104.239,00	115.535,02	125.579,55
1 Industri Batubara dan Pengalihan Migas	15,69	17,72	19,36	18,87	18,28
2 Industri Makanan dan Minuman	58.561,12	61.870,47	70.123,04	79.806,49	87.849,65
3 Pengolahan Tembakau	1.416,37	1.560,27	1.793,35	1.877,46	2.116,95
4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	248,61	276,61	298,02	330,78	354,91
5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas	304,23	344,22	370,52	402,02	431,96
6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan	1.288,46	1.298,10	1.388,22	1.531,96	1.524,49
7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas,	1.316,21	1.434,85	1.492,18	1.637,25	1.760,25
8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat	2.971,39	3.357,30	3.501,76	3.285,89	3.408,56
9 Industri Karet, Barang dari Karet dan	7.221,31	8.073,61	9.010,16	9.070,46	9.429,70
10 Industri Barang Galian bukan Logam	1.613,81	1.769,74	2.004,95	2.262,17	2.447,60
11 Industri Logam Dasar	9.404,09	11.196,17	12.044,57	12.948,91	13.690,04
12 Industri Barang dari Logam, Komputer,	863,32	980,35	1.020,72	1.095,09	1.186,35
13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	269,37	300,45	335,16	370,22	408,66
14 Industri Alat Angkutan	61,96	69,28	77,54	83,75	89,35
15 Industri Furnitur	555,10	624,93	683,08	729,35	775,51
16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi	60,89	67,39	76,39	84,36	87,30
D Pengadaan Listrik, Gas	641,93	597,74	642,53	640,09	640,36
1 Ketenagalistrikan	325,50	331,53	385,00	408,50	440,35
2 Gas	316,43	266,21	257,53	231,59	200,01
E Pengadaan Air	399,03	441,82	501,06	572,26	660,56
F Konstruksi	51.426,26	60.232,62	69.460,77	77.801,96	84.232,50
G Perdagangan Besar dan Eceran, dan	70.891,92	78.324,82	89.597,00	99.521,14	112.438,92
1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan	6.298,79	7.179,79	8.134,96	8.147,49	8.742,93
2 Perdagangan Besar dan Eceran	64.593,19	71.145,03	81.462,04	91.373,66	103.695,99
H Transportasi dan Pergudangan	19.056,20	22.990,25	25.898,44	28.556,71	31.828,20
1 Angkutan Rel	87,66	100,94	117,39	136,27	156,90
2 Angkutan Darat	8.945,79	11.212,22	13.006,11	14.414,47	16.239,96
3 Angkutan Laut	2.200,13	2.562,36	2.542,79	2.637,23	2.520,74
4 Angkutan Sungai Danau dan	115,48	135,67	156,58	180,49	195,67
5 Angkutan Udara	3.738,85	4.291,02	4.650,01	4.971,36	5.708,79
6 Pergudangan dan Jasa Penunjang	3.968,28	4.688,05	5.425,55	6.216,90	7.006,14
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.100,94	10.598,78	12.283,32	13.786,21	14.934,25
1 Penyediaan Akomodasi	1.266,87	1.425,38	1.625,23	1.810,34	1.767,83
2 Penyediaan Makan Minum	7.834,07	9.173,39	10.658,09	11.975,87	13.166,43
J Informasi dan Komunikasi	8.957,70	9.594,39	10.287,35	11.124,25	12.194,59
K Jasa Keuangan	13.479,43	15.738,02	17.057,99	19.144,95	20.763,25
1 Bank	9.531,78	11.099,77	11.723,80	13.125,89	13.940,60
2 Asuransi dan Dana Pensiun	1.069,93	1.258,75	1.453,96	1.661,17	1.896,61
3 Jasa Keuangan Lainnya	2.610,87	3.071,47	3.524,48	3.956,86	4.478,19
4 Jasa Penunjang Keuangan	266,84	308,02	355,74	401,03	447,85
L Real Estate	16.358,72	20.078,79	22.786,42	25.712,58	29.716,16
M,N Jasa Perusahan	3.646,33	4.224,04	4.836,42	5.452,33	6.287,02
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan	14.786,94	16.427,96	18.832,08	21.234,54	22.893,55
P Jasa Pendidikan	7.938,01	8.848,51	9.930,60	10.723,83	12.220,60

Lampiran 40 : Produk Domestik Regional Bruto Sumatera Utara tahun 2013-2017

Tabel 1. PDRB Provinsi Sumatera Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2013–2017
(Miliar Rupiah)

LAPANGAN USAHA		2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	115 190,25	121 418,98	125 487,51	134 915,80	146 366,37
1	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa	100 013,36	104 363,81	106 450,87	114 854,91	124 848,81
a	Tanaman Pangan	18 245,91	18 781,53	21 422,77	24 357,80	25 102,49
b	Tanaman Hortikultura	12 520,36	12 904,32	13 577,11	14 545,13	15 491,12
c	Tanaman Perkebunan	59 743,50	62 076,58	59 807,97	63 172,86	70 307,07
d	Peternakan	8 554,13	9 567,11	10 500,23	11 545,64	12 547,91
e	Jasa Pertanian dan Perburuan	949,46	1 034,27	1 142,80	1 233,47	1 400,22
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	4 559,02	5 025,87	5 504,02	5 421,52	5 453,69
3	Perikanan	10 617,87	12 029,30	13 532,63	14 639,37	16 063,87
B	Pertambangan dan Penggalian	6 581,44	6 899,06	7 662,92	8 474,41	8 870,35
1	Pertambangan Minyak dan Gas Bumi	684,15	735,13	712,79	655,79	665,15
2	Pertambangan Batubara dan Lignit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pertambangan Bijih Logam	1 466,26	1 407,62	1 563,98	1 677,78	1 734,66
4	Pertambangan dan Penggalian Lainnya	4 431,04	4 756,31	5 386,15	6 140,83	6 470,53
C	Industri Pengolahan	93 241,47	104 239,00	115 720,02	125 513,75	138 823,78
1	Industri Batubara dan Pengilangan Migas	17,72	19,36	18,87	18,28	18,59
2	Industri Makanan dan Minuman	61 870,47	70 123,04	79 961,49	87 757,85	99 152,01
3	Pengolahan Tembakau	1 560,27	1 793,35	1 877,46	2 116,95	2 377,66
4	Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	276,61	298,02	330,78	354,91	359,80
5	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	344,22	370,52	402,02	431,96	439,31
6	Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus	1 298,10	1 388,22	1 531,96	1 524,49	1 627,59
7	Industri Kertas dan Barang dari Kertas,	1 434,85	1 492,18	1 637,25	1 760,25	2 004,86
8	Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	3 357,30	3 501,76	3 285,89	3 408,56	3 619,45
9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	8 073,61	9 010,16	9 100,46	9 455,70	10 310,77
10	Industri Barang Galian bukan Logam	1 769,74	2 004,95	2 262,17	2 447,60	2 461,22
11	Industri Logam Dasar	11 196,17	12 044,57	12 948,91	13 690,04	13 763,60
12	Industri Barang dari Logam, Komputer,	980,35	1 020,72	1 095,09	1 186,35	1 327,46
13	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	300,45	335,16	370,22	408,66	446,92
14	Industri Alat Angkutan	69,28	77,54	83,75	89,35	85,83
15	Industri Furnitur	624,93	683,08	729,35	775,51	735,20
16	Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan	67,39	76,39	84,36	87,30	93,52
D	Pengadaan Listrik, Gas	597,74	642,53	639,59	668,83	788,34
1	Ketenagalistrikan	331,53	385,00	408,50	440,35	502,35
2	Gas	266,21	257,53	231,09	228,48	312,40
E	Pengadaan Air	441,82	501,06	572,26	654,34	766,84
F	Konstruksi	60 232,62	69 460,77	77 801,96	84 232,50	92 589,58
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi	78 324,82	89 597,00	99 822,01	114 009,27	122 584,63
1	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan	7 179,79	8 134,96	8 147,49	8 742,93	9 216,37
2	Perdagangan Besar dan Eceran	71 145,03	81 462,04	91 674,52	105 266,34	113 368,26
H	Transportasi dan Pergudangan	22 990,25	25 898,44	28 511,91	31 832,84	34 277,08
1	Angkutan Rel	100,94	117,39	135,32	152,51	168,62
2	Angkutan Darat	11 212,22	13 006,11	14 414,47	16 280,16	17 697,49
3	Angkutan Laut	2 562,36	2 542,79	2 632,23	2 548,41	2 576,71
4	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	135,67	156,58	180,64	192,58	199,51
5	Angkutan Udara	4 291,02	4 650,01	4 957,36	5 719,04	5 840,83
6	Perhubungan dan Jasa Penunjang Angkutan	4 688,05	5 425,55	6 191,90	6 940,14	7 793,92



RIZKA SRIHENDA

CURRICULUM VITAE

Place and date of birth



Padang
May 6, 1997

Contact Info



+62 812 7642 10 87



rsrihenda@gmail.com

EDUCATIONAL HISTORY

- 2009 - SMP Negeri 3 Pariaman
- 2012 - SMA Negeri 1 Lubuk Alung
Social Science Majoring
- 2015 - Universitas Brawijaya
Business Administration
Finance Concentration

ORGANIZATIONAL BACKGROUND

2013-2014

PRAMUKA - SMA Negeri 1 Lubuk Alung

2016

BEM FIA UB - STAFF KEUANGAN

2016

BEM FIA UB - STAFF KEUANGANLEMBAGA

EXPERIENCE

2015

TASMAFIA 2 - SECRETARY DIVISION

2016

MALAM KEBUDAYAAN - GENERAL DIVISION II

2016

DEKAN CUP - EVENT DIVISION

2017

SME TOKOPEDIA - GENERAL FINANCE

2017

JAMBOREE JAZZ KAMPUS - GENERAL FINANCE II

2017

JAMBOREE JAZZ KAMPUS - GENERAL FINANCE II

2018

PT SEMEN PADANG - PROCUREMENT (INTERNSHIP)

